

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Ha)
1	Margasari	13	8.683
2	Bumijawa	18	8.856
3	Bojong	17	5.852
4	Balapulang	20	7.491
5	Pagerbarang	13	4.300
6	Lebaksiu	15	4.095
7	Jatinegara	17	7.962
8	Kedungbanteng	10	8.762
9	Pangkah	23	3.551
10	Slawi	10	1.389
11	Dukuhwaru	10	2.630
12	Adiwerna	21	2.386
13	Dukuhturi	18	1.748
14	Talang	19	1.839
15	Tarub	20	2.682
16	Kramat	20	3.849
17	Suradadi	11	5.573
18	Warureja	12	6.231
Jumlah		287	87.878

Sumber : *Selayang Pandang Kab. Tegal 2018*

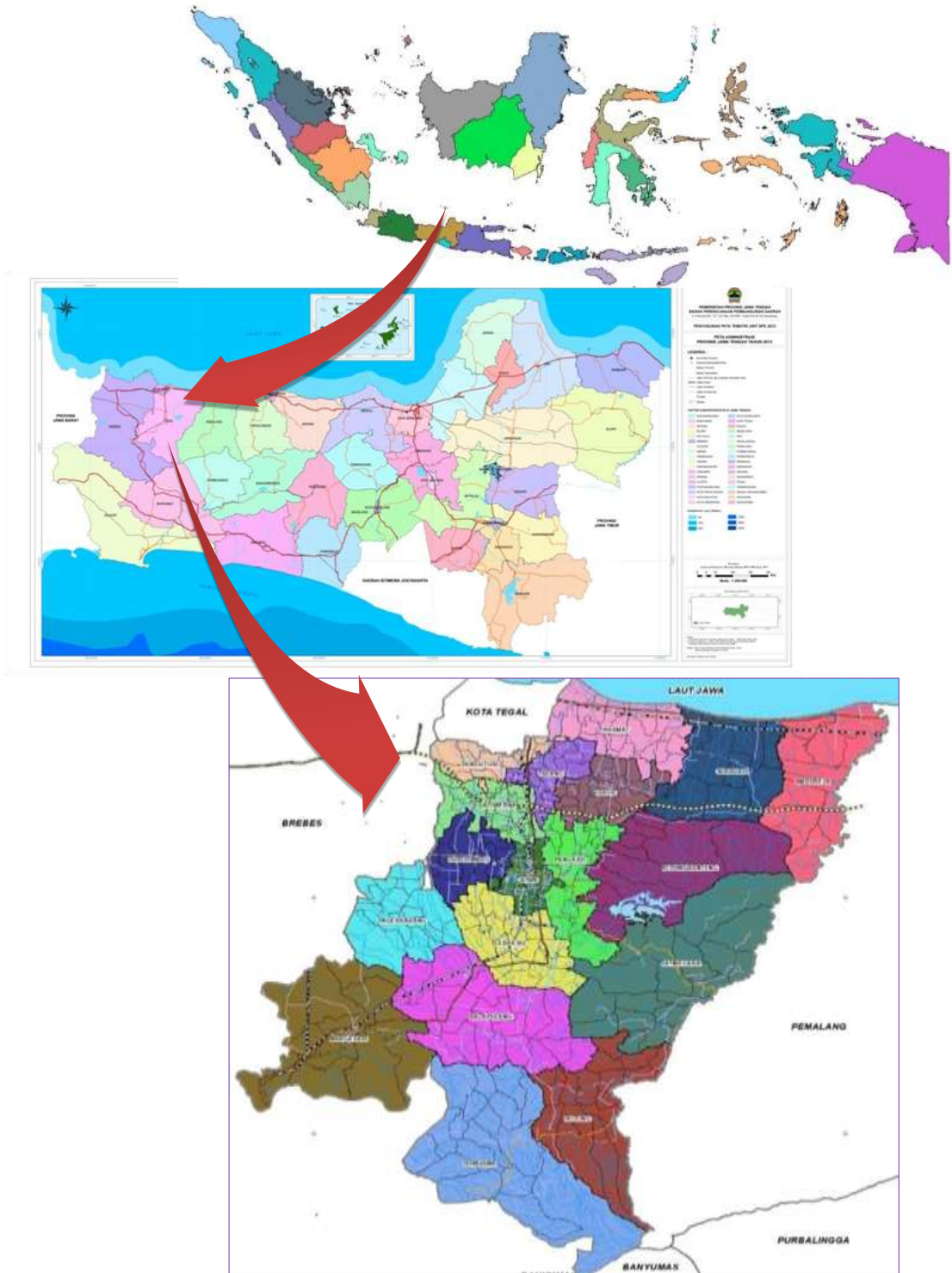
Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah kecamatan Bumijawa (8.856 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (1.389 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

B. Letak dan lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : $108^{\circ} 57'6''$ s/d $109^{\circ} 21'30''$ BT dan antara $6^{\circ} 50'41''$ s/d $7^{\circ} 15'30''$ LS.

Gambar 2. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya



Sumber : RTRW Kab. Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :

- Jalan TOL Pejagan - Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang - Tegal - Cirebon di sebelah utara,
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap.
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta - Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi - Purwokerto

C. Topologi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja
- Daerah dataran rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kab. Tegal



Sumber : RTRW Kab. Tegal Tahun 2012 - 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

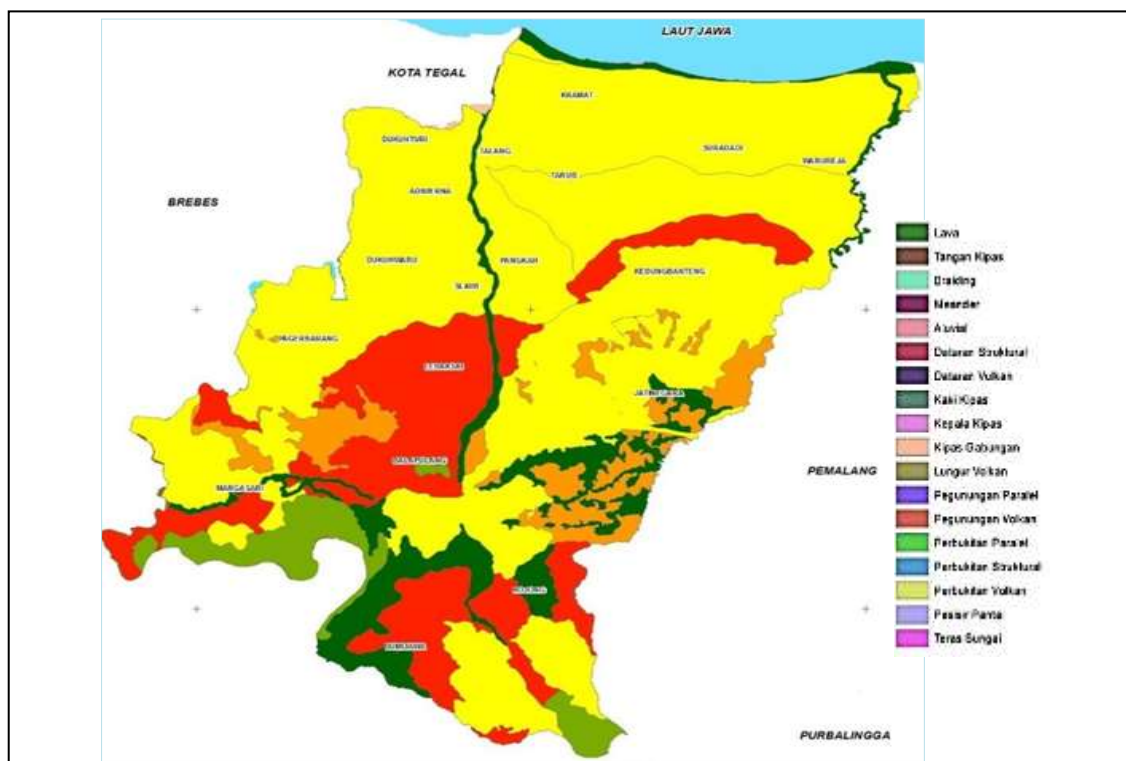
- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

D. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utaman yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kab. Tegal Tahun 2012 - 2032

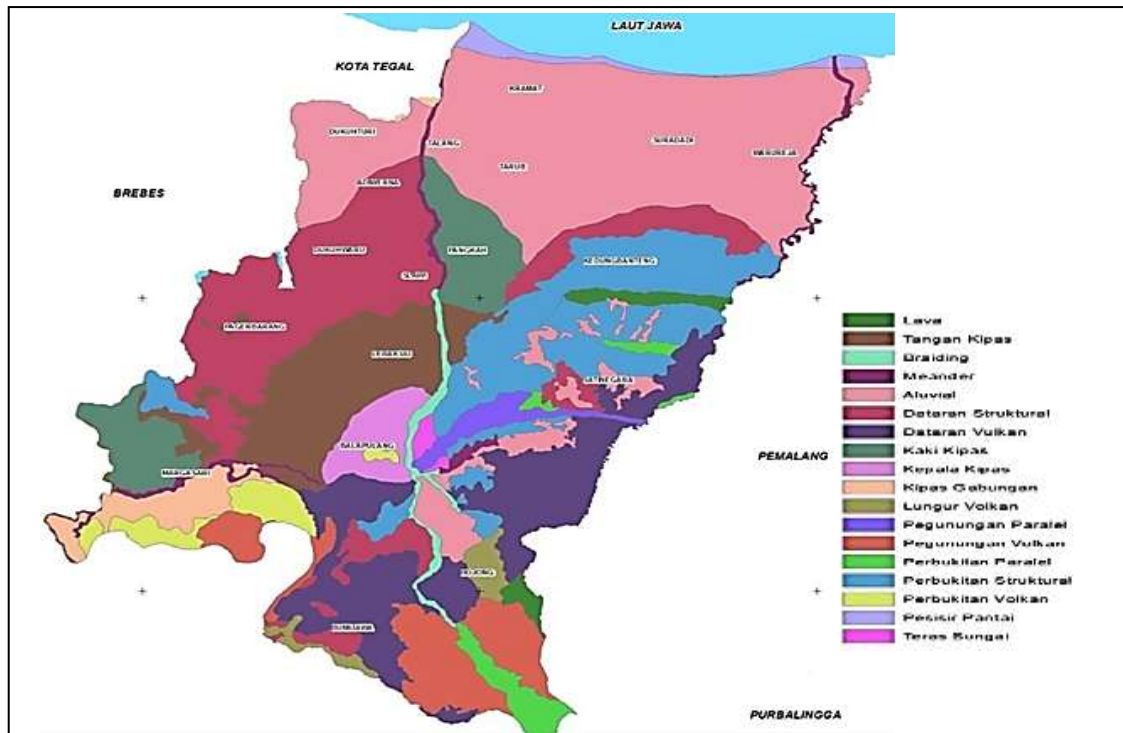
2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.879 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan

daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kab. Tegal Tahun 2012 – 2032

E. Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub

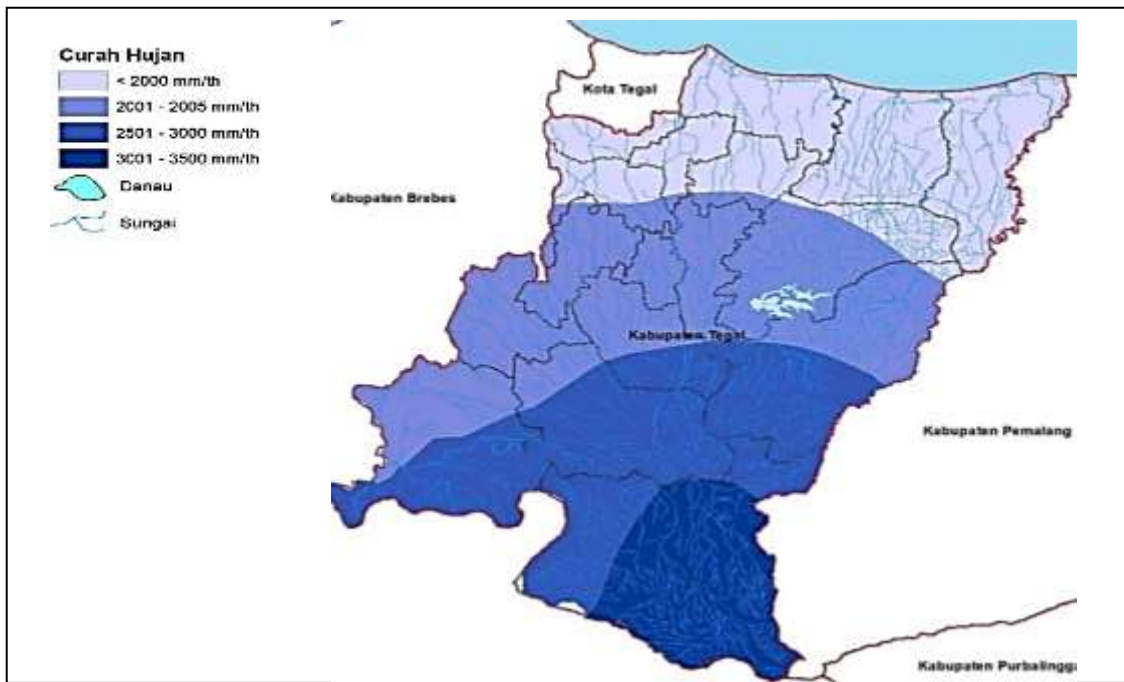
8	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

F. Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyak-nya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

G. Penggunaan Lahan

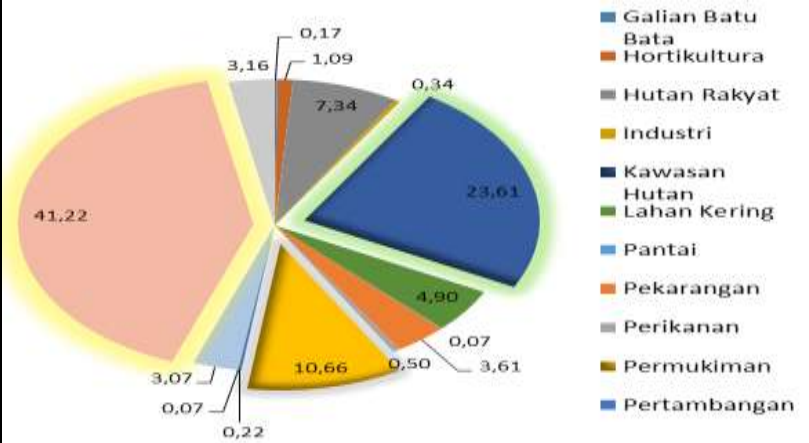
Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Liputan Tahun 2016, Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas wilayah Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Tegal, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila dibandingkan dengan data jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 1.429.371,

dengan demikian secara kepadatan penduduk netto terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²). Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan

Tataguna	Luas (Ha)
Galian Batu Bata	163
Hortikultura	1.073
Hutan Rakyat	7.247
Industri	334
Kawasan Hutan	23.313
Lahan Kering	4.835
Pantai	65
Pekarangan	3.564
Perikanan	491
Permukiman	10.529
Pertambangan	217
Peternakan	64
Sarana Prasana	3.032
Sawah	40.704
Tubuh Air	3.125
Jumlah	98.756



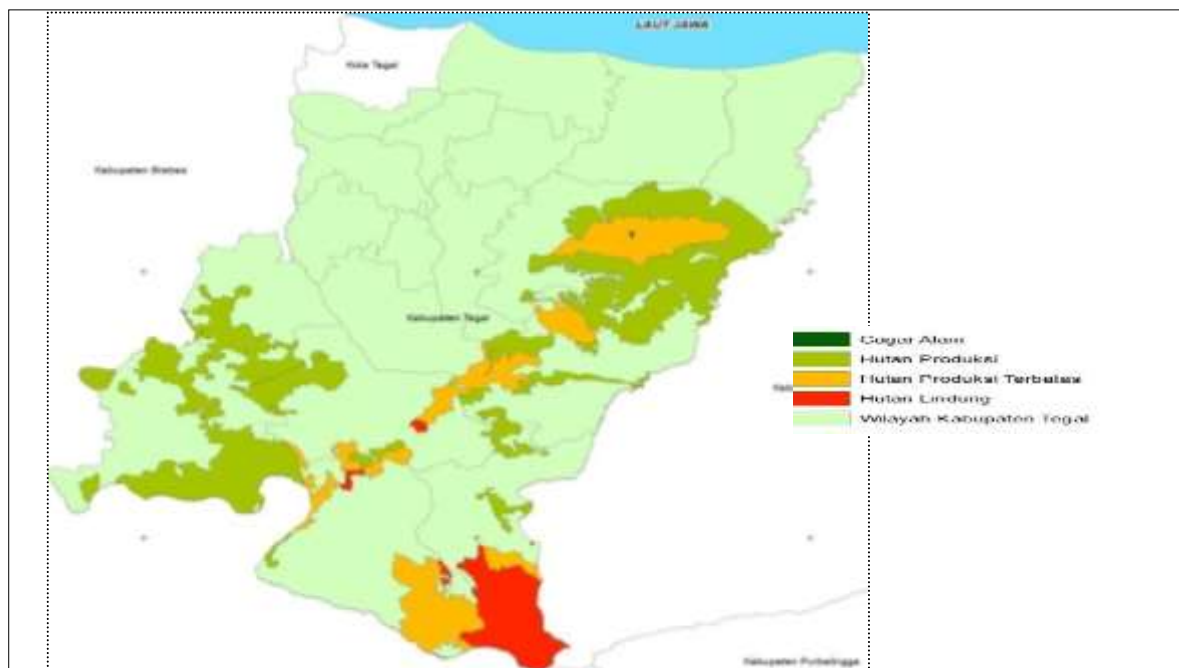
Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi 2017

H. Sumber Daya Hutan

1) Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Luas kawasan Hutan di Kabupaten Tegal adalah 23.313 Ha atau setara dengan 27 % dari wilayah Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Kawasan Hutan



Sumber : RTRW Kab. Tegal Tahun 2012 - 2032

Tabel 2. 4 Status dan Fungsi Hutan

No	Status dan Fungsi hutan	Luas (Ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain	74.686,25	73,01
2	Hutan Lindung	2.961,41	3,37
3	Hutan Poduksi Tebatas	6.672,40	7,58
4	Hutan Produksi	14.097,34	16,03
5	Cagar Alam	8,60	0,01
	Jumlah	98.426,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2) Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit I yaitu KPH Pemalang, KPH Balapulang, dan KPH Pekalongan Barat yang sebagian besar kawasan-nya berada di kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK – HT) dengan komoditas tanamannya jati dan pinus. Selain itu Kabupaten Tegal juga memiliki kawasan Cagar Alam Guci yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan merupakan salah satu objek wisata.

Tabel 2. 5 Pengelolaan Hutan

No	KPH	Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)				Jumlah
		HL	HPT	HP	CA/TW A/SM	
A	KPH BALAPULANG					
	BH Linggapada	-	399,4	2.732,5	-	3.131,9
	BH Margasari	-	-	3.737,6		3.737,6
B	KPH PEMALANG					
	BH Jatinegara	-	2.649,9	5.844,4	6,6	8.500,9
C	KPH PEKALONGAN BARAT					
	BH Bumijawa	2.961,4	3.623,1	1.782,9	2,0	8.369,4
	Jumlah	2.961,4	6.672,4	14.097,3	8,6	23.739,8

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan dengan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

A. Arah Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, Lestari dan berwawasan lingkungan. Memperhatikan kondisi grografis wilayah dan kawasan

strategis di regional maupun di dalam wilayah Kabupaten Tegal. Kabupaten secara regional telah ditetapkan bagian dari kawasan strategis propinsi Bregasmalang yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang, dimana kawasan ini dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah;

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten serta industri menengah dan besar di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten;
- 2) pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten;
- 3) pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat;
- 4) pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten;
- 5) pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur wilayah yang terpadu;
- 6) pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian;
- 7) pemantapan pelestarian kawasan lindung;
- 8) pengembangan kawasan pariwisata; dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

B. Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang, secara hirarki sistem perkotaan Kabupaten Tegal telah ditetapkan menjadi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kecamatan Slawi dan Adiwerna, dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu seluruh Ibukota Kecamatan dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pusat kegiatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA), sistem jaringan prasarana lainnya (SPAM, SPAL, Persampahan)

Strategi pengembangan struktur ruang ini dilakukan melalui Pengembangan sistem perkotaan yang terpadu dan saling bersinergi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan melalui:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana rinci pengembangan sistem pelayanan perkotaan;
- 2) mengoptimalkan fungsi PKL, dan PPK dalam penyediaan ruang bagi sektor informal dan RTH;
- 3) mengembangkan kawasan permukiman dengan menyediakan prasarana dasar dan penyediaan RTH serta pengembangan komunitas dalam permukiman;
- 4) merevitalisasi perdagangan dan jasa dengan penyediaan pasar tradisional bersih yang menampung komoditas lokal; dan
- 5) menetapkan lingkungan siap bangun guna penyediaan perumahan yang tersebar di PKL, dan PPK
- 6) Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan
- 7) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

Sedangkan strategi Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian, dilakukan melalui:

mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi industri, pertanian dan pariwisata;

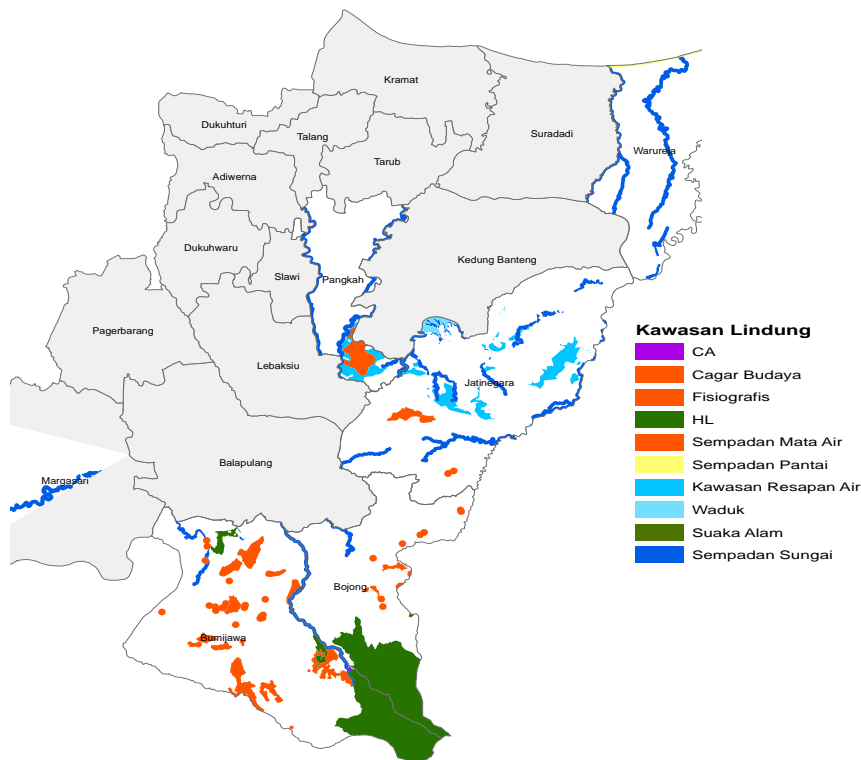
mengembangkan prasarana telematika, yang lebih luas jangkauan pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir;

- 1) mengembangkan prasarana pengairan dan pendukungnya;
- 2) mengembangkan kembali embung-embung/ waduk lapangan;
- 3) menyediakan prasarana energi pada wilayah pelosok dengan pengembangan mikrohidro; dan
- 4) mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional.

C. Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam serta sumber daya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Di kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari: Kawasan hutan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan mata air).

Gambar 2. 7. Peta Pengembangan Kawasan Lindung



Sumber : RTRW Kab. Tegal Tahun 2012 - 2032

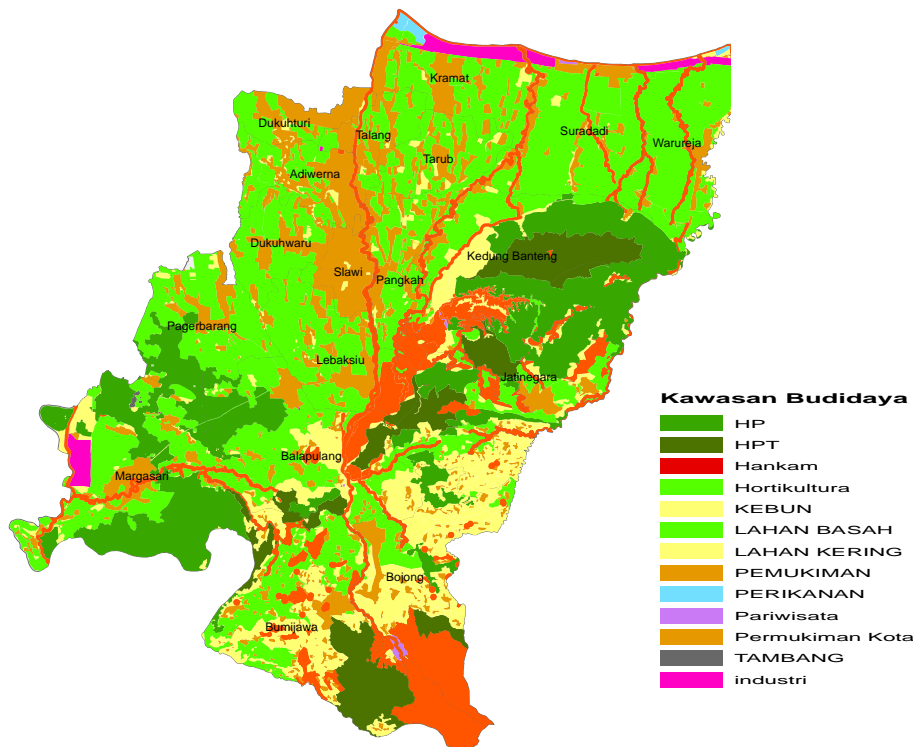
Fokus pengembangan kawasan lindung adalah Pemantapan pelestarian kawasan lindung dengan strategi meliputi:

- a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya
- b. mempertahankan fungsi lindung secara ketat dan melarang alih fungsi pada kawasan lindung;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
- d. mencegah kegiatan penambangan liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; dan
- e. mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan paska penambangan

D. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai. Meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

Gambar 2. 8. Peta Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : RTRW Kab. Tegal Tahun 2012 - 2032

Untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 telah ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 41.296 Ha (47% dari luas wilayah Kabupaten Tegal). Dalam Perda RTRW pengembangan wilayah untuk permukiman penduduk sampai dengan Tahun 2032 dialokasikan 15.951 Ha, sedangkan kondisi eksisting permukiman saat ini adalah 14.093 Ha. Alokasi pengembangan permukiman saat ini hanya terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan di perdesaan pengembangannya belum optimal.

Alokasi pengembangan wilayah untuk industri berada di wilayah pantura dan margaayu seluas 1.214 Ha, Namun kondisi eksisting lahan yang dialokasikan untuk industri khususnya di Pantura merupakan permukiman dan lahan tambak masyarakat, sehingga apabila masyarakat ingin melakukan investasi di bidang industri dapat dilakukan di lokasi tersebut.

Tabel 2. 6. Kawasan Budidaya dan Lindung

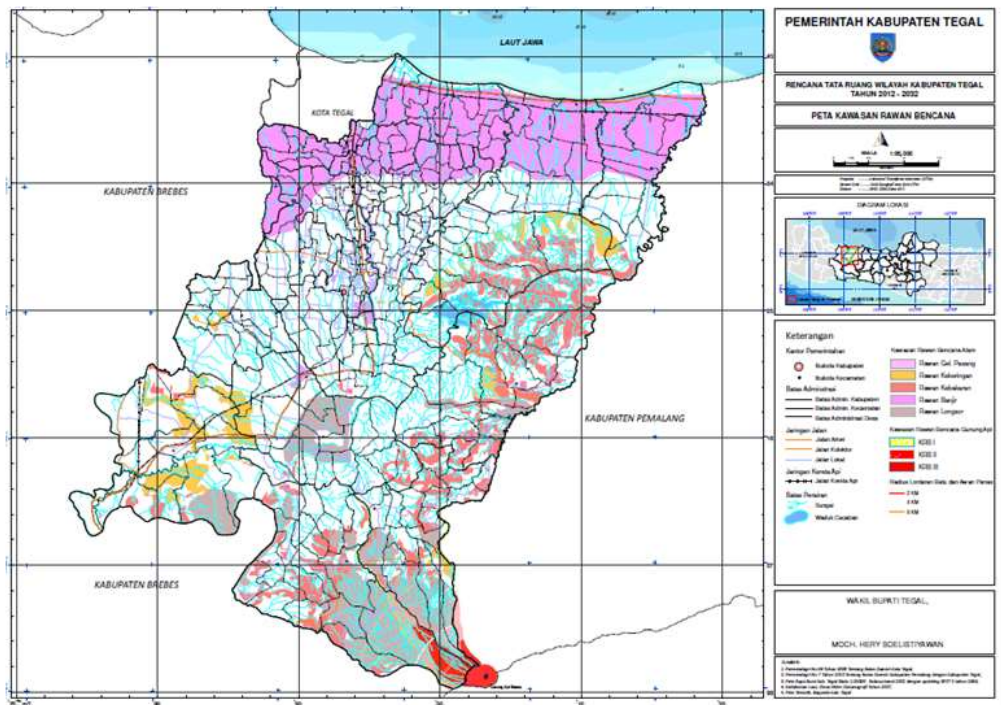
KAWASAN	LUAS (Ha)	KAWASAN	LUAS (Ha)
A. KAWASAN BUDIDAYA	86.200	B. KAWASAN LINDUNG	12.226
Hankam	63	Cagar Alam	10
Hortikultura	786	Cagar Budaya	11
Hutan Produksi	14.770	Fisiografis	1.588
Hutan Produksi Terbatas	6.520	Hutan Lindung	2.753
Industry	1.214	Kawasan Resapan Air	1.571
Kebun	3.966	Sempadan Mata Air	315
Lahan Sawah Basah	35.946	Sempadan Pantai	234
Lahan Sawah Kering	6.629	Sempadan Sungai	5.206
Pariwisata	87	Suaka Alam	13
Permukiman Desa	7.275	Waduk	524
Perikanan	237		
Permukiman Kota	8.676		
Pertambangan	33		

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Apabila dilihat kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Slamet Tegal merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah (tanah longsor), Abrasi, Angin Topan dan dan Kebakaran Hutan.

Gambar 2. 9. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Daerah Rawan Longsor; Daerah yang sering terjadi longsor adalah wilayah bagian selatan yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah. Hal ini lebih disebabkan karena secara topografis daerah tersebut merupakan daerah perbukitan dan kaki Gunung Slamet, serta daerah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi, serta vegetasi tutupan lahan dan merupakan daerah patahan
- Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitarpuncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupalelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gasvulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjirbandang, dan longSORan material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya di daerah Kaki Gunung Slamet meliputi Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa.
- Daerah Rawan Banjir; yaitu kawasan yang mengalami genanganakibat curah hujan tinggi, luapan air sungai, serta tidak adanya/tidak berfungsinya drainase utama di wilayah permukiman khususnya di wilayah perkotaan. Daerah yang rawan banjir adalah yang dilalui oleh Sungai Jembangan meliputi : Kecamatan Slawi. Adiwerna, Talang dan Dukuh Turi, serta wilayah permukiman yang

dilalui oleh Sungai Cacaban khususnya di wilayah Pantura yaitu Kecamatan Suradadi dan Kramat.

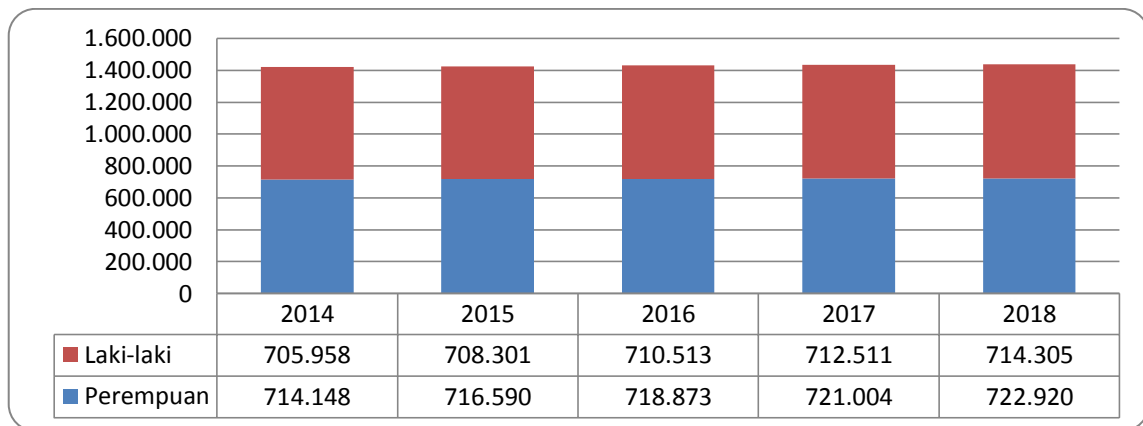
- d. Daerah Rawan Abrasi; Kabupaten memiliki wilayah Pantai Utara sepanjang sekitar 37 Km, beberapa tempat khususnya daerah – daerah yang berdekatan dengan muara sungai menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Wilayah yang sering terjadi abrasi meliputi Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat, Desa Maribaya Kecamatan Kramat, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Desa Demangharja Kecamatan Suradadi, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi, Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi, Purwahamba Kecamatan Suradadi;
- e. Daerah Rawan Angin Topan; dimana angin dengan kecepatan dan dayarusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.
- f. Daerah Rawan Kekeringan; yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam yaitu khususnya pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Warureja.
- g. Daerah Rawan Gelombang Pasang; Untuk rawan gelombang pasang didasarkan pada jarak dengan pantai, karakteristik lahan (morfologi dan ketinggian wilayah) serta ada tidaknya penghalang baik alam maupun buatan, meliputi: Kecamatan Kramat (Desa Kramat dan Desa Maribaya), Kecamatan Suradadi (Desa Bojongsana, Desa Purwahamba, dan Desa Suradadi) dan Kecamatan Warureja (Desa Demangharja)
- h. Daerah Rawan Kebakaran Lahan adalah daerah yang merupakan kawasan hutan khususnya yang komoditas tanamannya tanaman jati yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Margasari, Jatinegara, Kedungbanteng dan Sebagian Warureja.

2.1.4. Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2. 10. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2018.

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 adalah 1.437.225 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 714.305 jiwa dan perempuan 722.920 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 98,81 yang berarti bahwa 100 jumlah penduduk wanita terdapat 99 jumlah penduduk laki-laki. Dengan dependency ratio Kabupaten Tegal adalah 50,78 % dimana setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 51 penduduk usia non- produktif. Angka dependency ratio tersebut menandakan bahwa tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Tegal masih tinggi.

Tabel 2. 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	47.605	48.457	96.062	98,24
Bumijawa	42.251	42.493	84.744	99,43
Bojong	30.225	31.972	62.197	94,54
Balapulang	40.629	41.589	82.218	97,69
Pagerbarang	26.187	26.607	52.794	98,42
Lebaksiu	41.003	43.100	84.103	95,13
Jatinegara	26.815	27.416	54.231	97,81
Kedungbanteng	20.340	20.172	40.512	100,83
Pangkajene	50.865	50.737	101.602	100,25
Slawi	35.613	37.023	72.636	96,19
Dukuhwaru	29.615	30.460	60.075	97,23

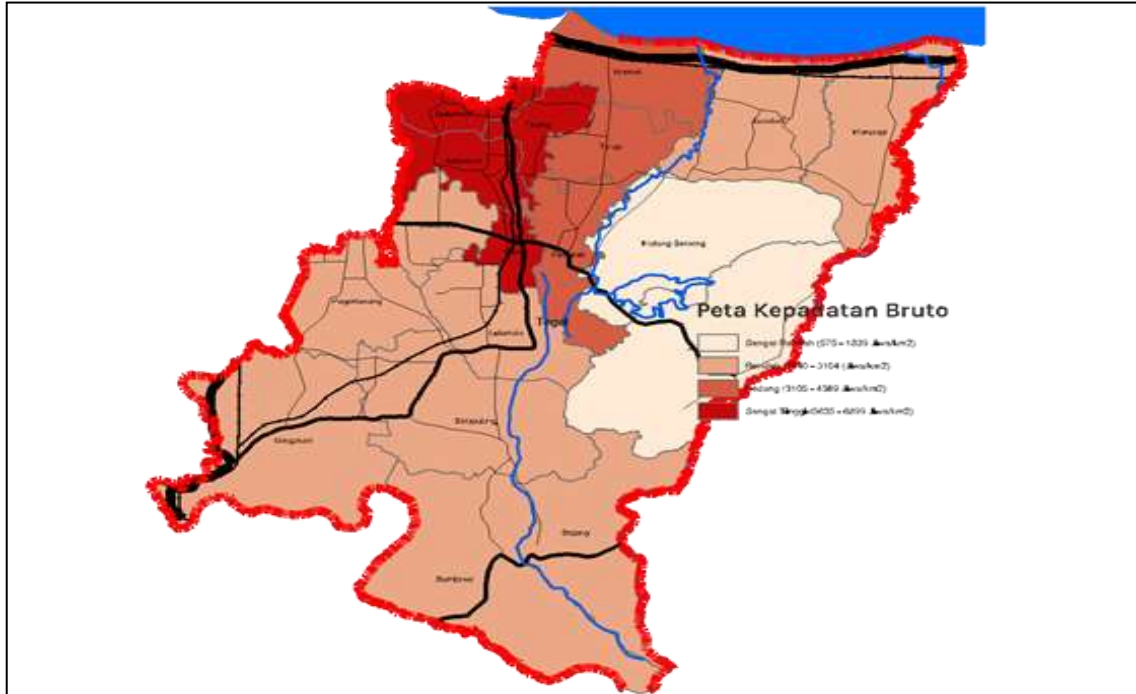
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Rasio
Adiwerna	60.299	59.737	119.966	100,82
Dukuhturi	44.836	44.351	89.187	101,09
Talang	51.686	51.354	103.040	100,65
Tarub	39.643	39.200	78.843	101,13
Kramat	55.826	56.979	112.805	97,98
Suradadi	40.714	41.055	81.769	99,17
Warureja	30.223	30.218	60.441	100,02
Th 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Th 2017	712.511	721.004	1.433.515	99
Th 2016	710.513	718.873	1.429.386	98.84
Th 2015	708.301	716.590	1.424.891	99,00
Th 2014	705.958	714.148	1.420.106	98.86

Sumber : Selayang Pandang Kab. Tegal Tahun 2018

B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedung Banteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

Gambar 2. 11. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk



Sumber : Selayang Pandang Kab. Tegal tahun 2018

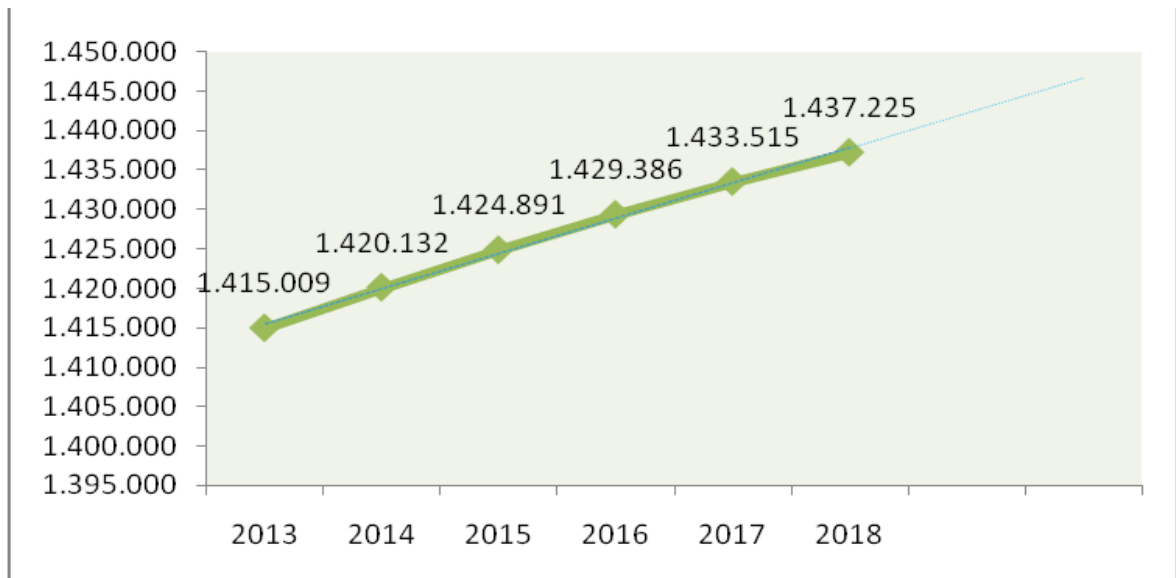
Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan tingkat pelayanan di setiap kecamatan. Oleh karena itu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam

pembangunan nantinya. Untuk melihat kepadatan penduduk secara riil terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²).

C. Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Tegal dari beberapa tahun yang lalu. Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 2012-2017.

Gambar 2. 12. Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir (2013-2018)



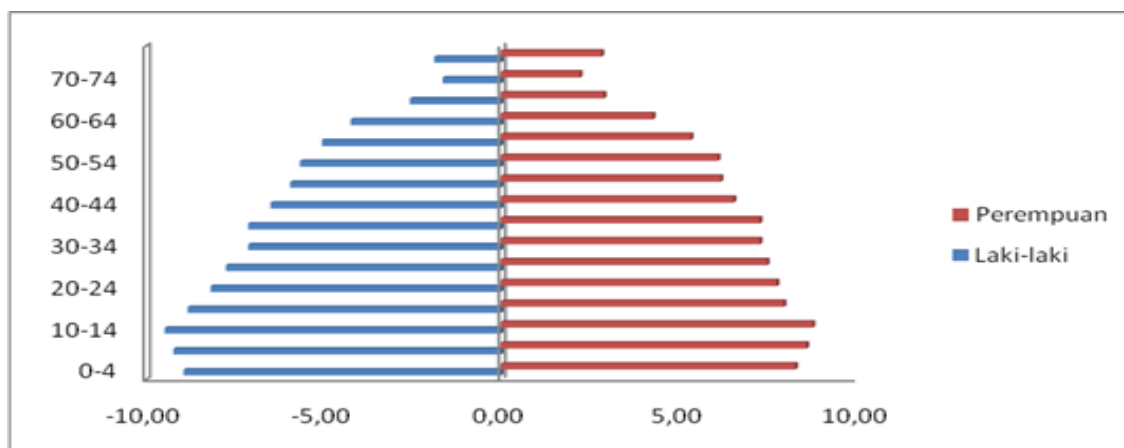
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ke tahun (Proyeksi pertumbuhan penduduk, lihat garis biru putus - putus). Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung menurun. Artinya, penambahan marginal jumlah penduduk dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu, apabila dibandingkan dengan LPP nasional dan LPP Provinsi Jawa Tengah, LPP Kabupaten Tegal cenderung lebih rendah.

D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 adalah 1.437.225 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 714.305 jiwa dan perempuan 722.920 jiwa sehingga sex ratio mencapai 98,81. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2012-2018 tersebut dapat dilihat pada Tabel.

Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2018.

Berdasarkan grafik piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami *bonus demografi*. Namun pada penduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (*fertilitas*) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi penambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal

Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut ;
- 2) Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit ;
- 3) Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
- 4) Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

E. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 949.810 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 483.705.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 50,93 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 51 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Usia	2014	2015	2016	2017	2018
0 - 4	131.184	124.234	127.359	125.515	123.783
5 - 9	130.506	125.050	130.038	129.132	128.043
10 - 14	129.575	129.197	132.020	131.447	131.111
15 - 19	128.175	102.001	122.982	121.999	120.599
20 - 24	113.861	86.494	112.441	113.627	114.588
25 - 29	103.983	117.547	107.145	108.147	109.527
30 - 34	109.998	118.285	106.826	105.112	103.541
35 - 39	106.628	107.324	105.616	104.683	103.564
40 - 44	93.223	105.301	93.835	93.783	93.757
45 - 49	87.375	92.621	87.240	87.274	87.140
50 - 54	80.301	82.794	82.826	83.794	84.609
55 - 59	66.021	70.648	70.870	72.930	74.713
60 - 64	48.733	46.182	55.728	58.461	61.180
65 +	90.569	117.202	94.460	97.611	101.070
Jumlah	1.420.132	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225

Sumber : Selayang Pandang Kab. Tegal Tahun 2018

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 5,38 %, sedangkan tahun 2016 sebesar 5,92 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi sebesar 7,22%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif.

Gambar 2. 14. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2013-2017 (Rp. Triliun)



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2018.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 6,50 %, kategori penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar 6,33%, kategori Real Estat 4,50%, kategori Industri Pengolahan sebesar 6,95 %, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,50%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,09%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,09%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,10%, kategori Petambangan dan Penggalian sebesar 6,50%, kategori Konstruksi sebesar 7,22% kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,09%, kategori Jasa Lainnya 5,43%, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar 1,35%, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,25%, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,09%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,65 %.

Tabel 2. 9Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2013-2017

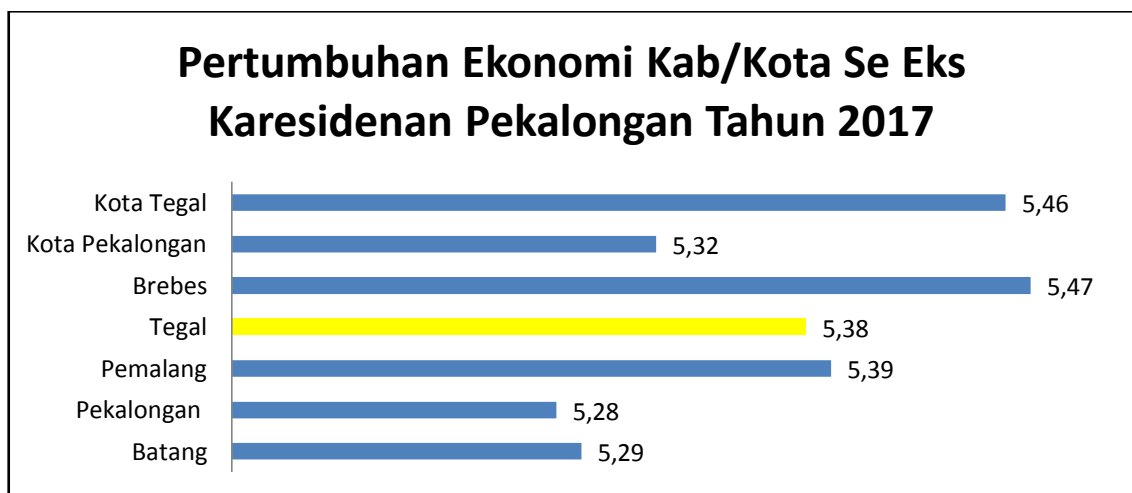
Lapangan Usaha/Industry	2013	2014	2015	2016	2017
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.51	-4.28	2.81	3.06	1.35
B Pertambangan danPenggalian	5.98	6.17	2.10	6.75	6.50
C Industri Pengolahan	12.57	8.13	6.80	7.27	6.95
D Pengadaan Listrik dan Gas	7.31	4.24	3.73	1.65	5.65
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.67	3.91	0.30	2.35	4.09
F Konstruksi	4.32	4.51	5.54	5.35	7.22

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.45	5.17	4.12	5.19	3.80
H	Transportasi dan Pergudangan	9.29	9.11	8.69	6.85	6.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.26	6.94	7.18	6.10	6.33
J	Informasi dan Komunikasi	9.19	8.82	9.00	7.60	7.50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	2.16	3.54	7.05	6.86	5.09
L	Real Estat	4.17	6.10	7.30	7.83	4.50
M	Jasa Perusahaan	11.54	8.10	9.23	8.43	6.50
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.04	0.76	5.10	2.96	3.25
O	Jasa Pendidikan	8.91	9.72	6.92	7.08	6.57
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.70	8.50	4.98	6.93	6.10
Q	Jasa lainnya	9.31	8.73	3.13	4.37	5.43
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		6.73	5.03	5.49	5.92	5.38

Sumber : BPS Kab. Tegal Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2017 adalah 5,38% menduduki peringkat keempat dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (5,28%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (5,47%).

Gambar 2. 15. Pertumbuhan ekonomi Se Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2017



Sumber : BPS Kab. Tegal Tahun 2018

2.2.2. PDRB

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp33.079.234,10 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2018 mencapai Rp23.552.548,37 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstartif untuk maju dan mendorong sektor *tersier* untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan

sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2018 atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.565.019,14	15,43	3.879.322,43	15,15	4.097.190,91	14,62	4.191.174,92	13,79	4.395.637,80	13,29
B	Pertambangan dan Penggalian	965.944,03	4,18	1.138.617,76	4,45	1.253.014,46	4,47	1.367.812,76	4,50	1.501.669,83	4,54
C	Industri Pengolahan	7.561.988,77	32,72	8.516.055,92	33,25	9.604.453,44	34,27	10.607.567,68	34,91	11.694.230,31	35,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.003,50	0,06	16.016,37	0,06	17.334,93	0,06	19.374,69	0,06	21.020,22	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.634,63	0,042	9.922,55	0,39	10.237,01	0,37	10.787,76	0,36	11.320,91	0,03
F	Konstruksi	1.757.421,40	7,61	1.935.916,03	7,74	2.071.862,50	7,56	2.272.526,44	7,48	2.514.327,11	7,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.687.696,94	15,96	3.999.444,07	15,62	4.276.012,13	15,26	4.592.693,59	15,12	4.942.943,53	14,94
H	Transportasi dan Pergudangan	597.093,65	2,58	678.087,35	2,65	735.051,72	2,62	819.818,16	2,70	899.883,09	2,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	947.998,75	4,10	1.069.660,33	4,18	1.196.647,19	4,27	1.300.911,86	4,28	1.402.152,54	4,24
J	Informasi dan Komunikasi	600.478,85	2,60	645.062,14	2,52	708.874,41	2,53	7991.444,75	2,60	863.787,54	2,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	530.164,97	2,29	590.903,79	2,30	643.374,04	2,30	696.744,87	2,29	751.377,45	2,27
L	Real Estat	370.106,44	1,60	409.786,78	1,60	452.379,95	1,61	485.883,21	1,60	535.851,35	1,62
M	Jasa Perusahaan	90.163,90	0,39	103.454,47	0,40	114.790,86	0,41	126.292,27	0,42	141.499,73	0,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	534.057,68	2,31	583.200,27	2,28	675.999,28	2,21	664.248,22	2,19	695.063,70	2,10
O	Jasa Pendidikan	1.183.260,42	5,12	1.288.282,96	5,03	1.424.096,19	5,08	1.575.268,51	5,18	1.766.445,24	5,34
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182.174,35	0,79	198.743,34	0,78	215.363,43	0,77	233.313,25	0,77	256.424,33	0,78
Q	Jasa lainnya	510.444,00	2,21	546.165,87	2,13	586.514,11	2,09	629.951,34	2,07	685.599,42	2,07
	Total	23.108.651,44	100	25.608.642,44	100	28.025.643,38	100	30.383.814,24	100	33.079.234,10	100

Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Tabel 2. 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014- 2018 atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.755.34	-4,28	2.832.654	2,81	2.919,344	3,06	2.958.745,2	1,35	3.001.385,12	12,74
B	Pertambangan dan Penggalian	778.437,77	6,17	794.797,71	2,10	848.474,09	6,75	903.624,91	6,50	950.494,40	4,04
C	Industri Pengolahan	5.920.278,6	8,13	6.322.825,6	6,80	6.782.532,8	7,27	7.245.198,2	6,95	7.737.577,82	32,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.869,27	4,24	15.423,63	3,73	15.677,59	1,65	16.562,92	5,65	17.354,26	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.266,72	3,91	9.294,84	0,30	9.513,22	2,35	9.902,65	4,09	10.328,77	0,04
F	Konstruksi	1.482.494,95	4,51	1.564.698,24	5,54	1.648.467,47	5,35	1.767.539,31	7,22	1.871.005,74	7,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.331.113,77	5,17	3.468.214,13	4,12	3.648.221,49	5,19	3.786.804,37	3,80	3.954.562,55	16,79
H	Transportasi dan Pergudangan	551.915,09	9,11	599.869,73	8,69	640.964,42	6,85	679.998,81	6,09	724.207,50	3,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	846.713,92	6,94	907.506,46	7,18	962.864,89	6,10	1.023.815,80	6,33	1.092.854,31	4,64
J	Informasi dan Komunikasi	635.456,39	8,82	692.670,72	9,00	745.335,96	7,60	801.236,16	7,50	877.419,74	3,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	412.037,35	3,54	441.095,37	7,05	471.375,08	6,86	495.346,36	5,09	516.328,24	2,19
L	Real Estat	340.514,94	6,10	365.375,63	7,30	393.993,84	7,83	411.723,56	4,50	428.500,96	1,82
M	Jasa Perusahaan	76.873,96	8,10	83.967,53	9,23	91.048,23	8,43	96.966,36	6,50	102.918,94	0,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	415.894,01	0,76	437.110,91	5,10	450.068,43	2,96	464.695,65	3,25	480.794,36	2,04
O	Jasa Pendidikan	795.930,56	9,72	851.008,20	6,92	911.281,14	7,08	971.127,23	6,57	1.052.730,62	4,47
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148.536,60	8,50	155.940,58	4,98	166.751,02	6,93	176.922,33	6,10	192.456,53	0,82
Q	Jasa lainnya	443.165,91	8,73	457.021,52	3,13	477.002,67	4,37	502.890,27	5,43	541.628,51	2,30
	Total	18.958.841,04	100	19.999.475,45	100	21.182.917,23	100	22.322.100,13	100	23.552.548,37	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2018.

2.2.3. Laju Inflasi

Selama tahun 2018 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,58 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang selama tahun kalender 2018 walaupun mengalami inflasi hanya sebesar 2,48 persen tetapi memberikan andil inflasi terbesar, yakni 0,76 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang memberikan andil inflasi 0,68 persen; kelompok Bahan Makanan sebesar 0,53 persen; kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,42 persen; kelompok sandang 0,28 persen; kelompok kesehatan 0,17 persen; dan terakhir kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,12 persen.

Gambar 2. 16. Perkembangan Inflasi



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Kenaikan indeks pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakardikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Penyelenggaraan Rumah Tangga yang mengalami inflasi sebesar 3,93persen; sub kelompok Biaya Tempat Tinggal sebesar 3,13 %; sub kelompok Perlengkapan Rumah Tangga sebesar 2,03 persen; dan sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air sebesar 0,81 persen. Sedangkan sub kelompok yang mengalami penurunan indeks yakni sub kelompok lemak dan minyak yang turun sebesar 3,96 persen; utamanya karena penurunan harga minyak goreng,dan sub kelompok Minuman tidak beralkohol yang turun sebesar 0,67 persen, yang utamanya disebabkan turunnya harga gula pasir.

Gambar 2. 17. Pergerakan Inflasi Bulanan Januari 2018 - Desember 2018



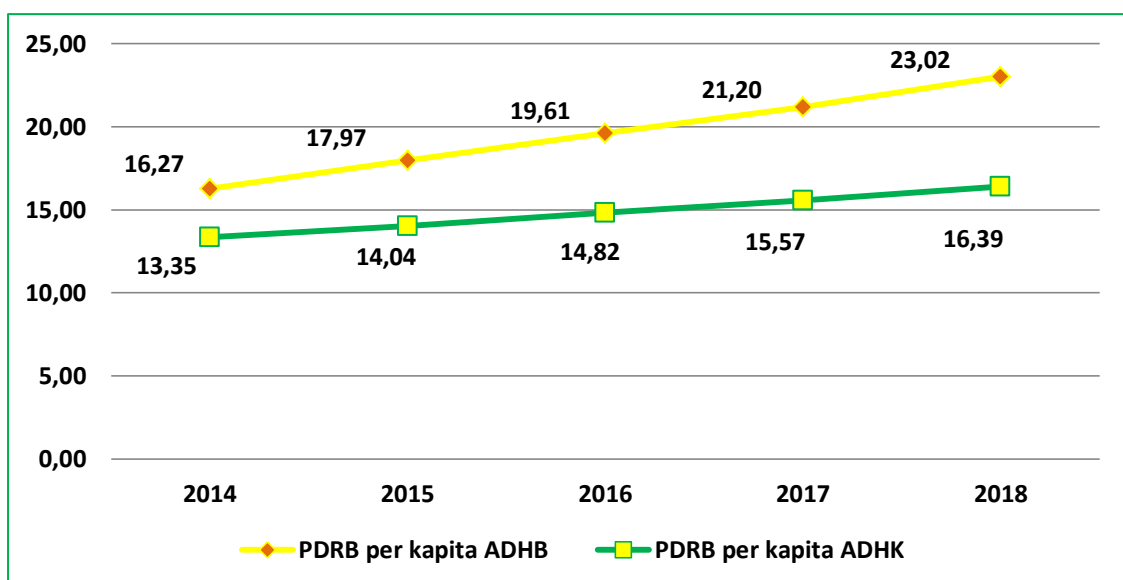
Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018

Kenaikan indeks (inflasi) paling tajam terjadi pada bulan Januari 2018 sebesar 0,91 persen; sedangkan penurunan indeks (deflasi) paling tajam terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,13 persen. Pada bulan-bulan musim panen padi pada setiap subround yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember fluktuasi harga cukup terkendali dan masih dalam rentang harga yang wajar. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa inflasi pada masa musim panen, yakni pada bulan Maret dan Agustus relatif terkendali, bahkan di kedua bulan tersebut terjadi deflasi. Sedangkan fluktuasi harga yang terjadi pada bulan Juni yang menyebabkan terjadi inflasi cukup tinggi pada tahun 2018 adalah karena pada bulan tersebut ada fenomena rutin tahunan seperti tahun ajaran baru, bulan puasa Ramadhan dan perayaan hari raya Idul Fitri. Sementara itu, inflasi yang terjadi pada Bulan Januari sebesar 0,91 persen, utamanya disebabkan karena kenaikan harga beras, yang sempat mengalami kenaikan harga cukup signifikan di awal tahun.

2.2.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 14,68 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 23,02 juta rupiah (lihat tabel). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.



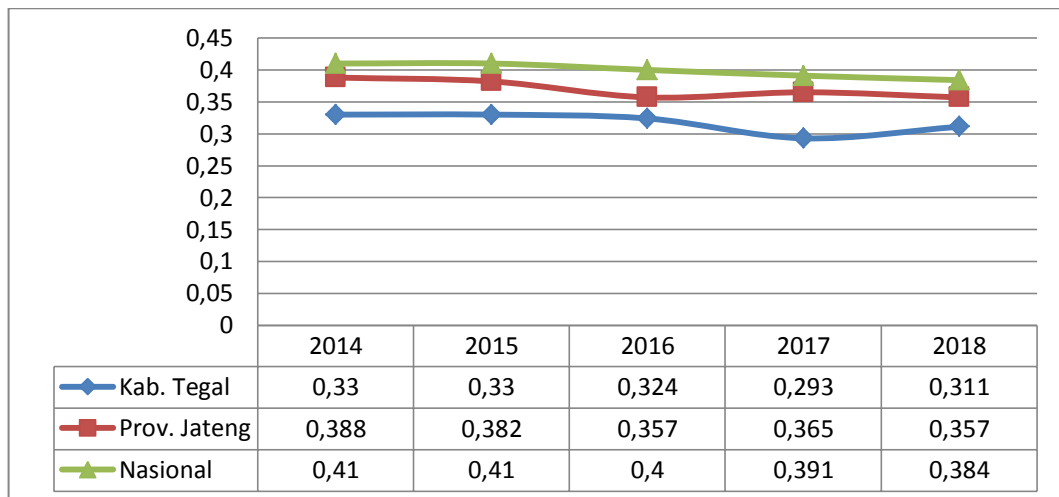
Gambar 2. 18. PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2014-2018

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2018.

2.2.5. Indeks GINI

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kab. Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indek gini.

Gambar 2. 19. Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



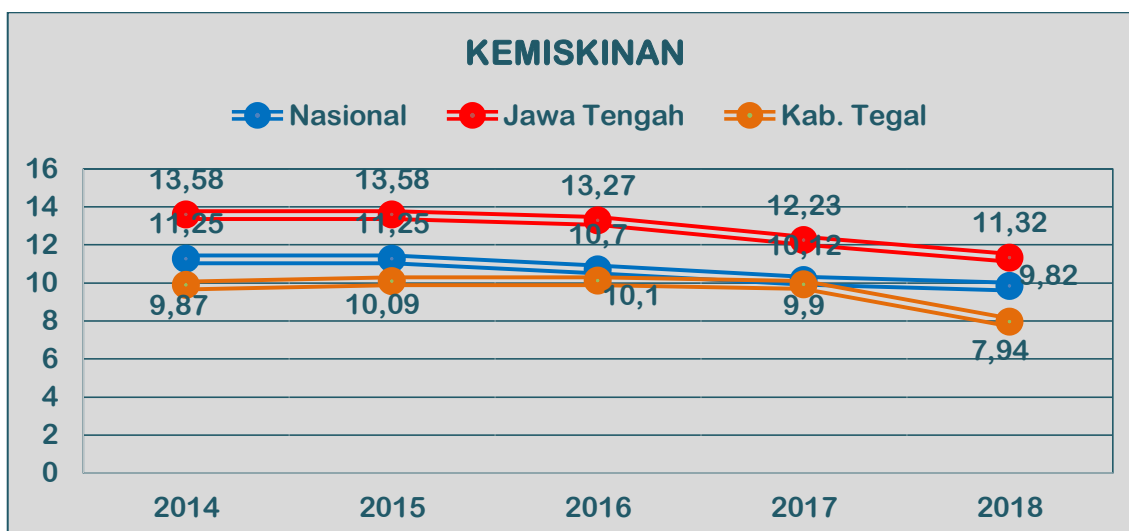
Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah ; bila G antara $0,35 - 0,5$ ketimpangan taraf sedang ; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah $0,35$ sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampakkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

2.2.6. Penduduk Miskin

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal terus mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan pada tahun 2018 dimana penduduk miskin tercatat sebanyak 114,06 ribu jiwa atau 7,94% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 1,96% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017 mencapai 141,80 ribu jiwa atau 9,9%. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2014-2018 secara selalu lebih rendah jika dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 20. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Penurunan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2018 menunjukkan keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada 4 (empat) tahun terakhir seperti Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang memfokuskan pada kegiatan jambanisasi dengan sasaran keluarga miskin; Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni masing-masing sasaran keluarga miskin mendapat bantuan @Rp. 20 juta rupiah; dan **Program Yuh Sekolah Maning**, yaitu memberikan fasilitas dan insentif bagi anak-nak putus sekolah dari keluarga miskin. Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

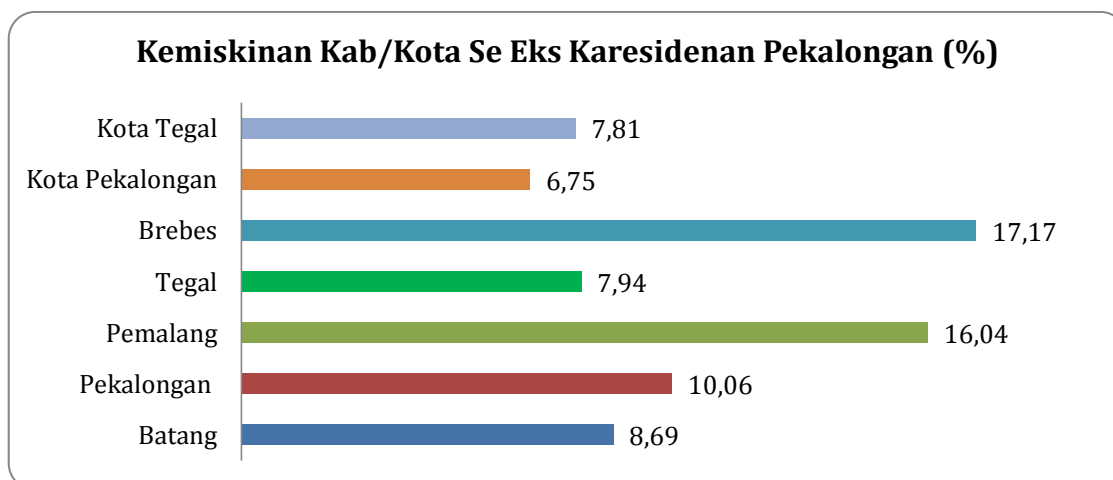
Tabel 2. 12 Penduduk Miskin Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk Miskin	140.308	143.540	144.220	141.800	114.060
2.	Jumlah Penduduk	1.420.106	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225
3.	Persentase (%)	9,87	10,09	10,10	9,9	7,94

Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

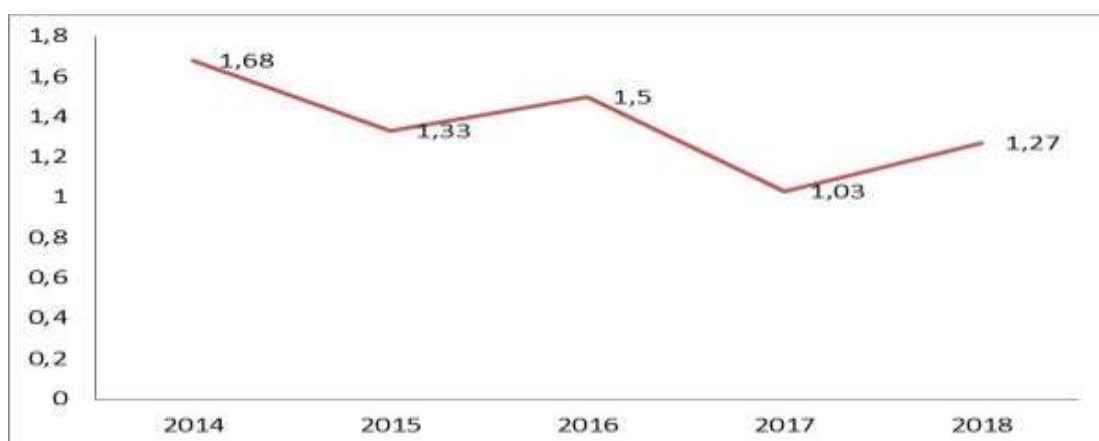
Gambar 2. 21. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang, Tahun 2018

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah 7,94% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (6,75%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,17%). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2012 – 2018 angkanya cukup fluktuatif. Selama tiga tahun terakhir cenderung naik, pada tahun 2016 adalah 1,03, tahun 2017 naik menjadi 1,27 selanjutnya pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi hingga mencapai 1,41. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaen Tegal cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan keimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin dalam. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

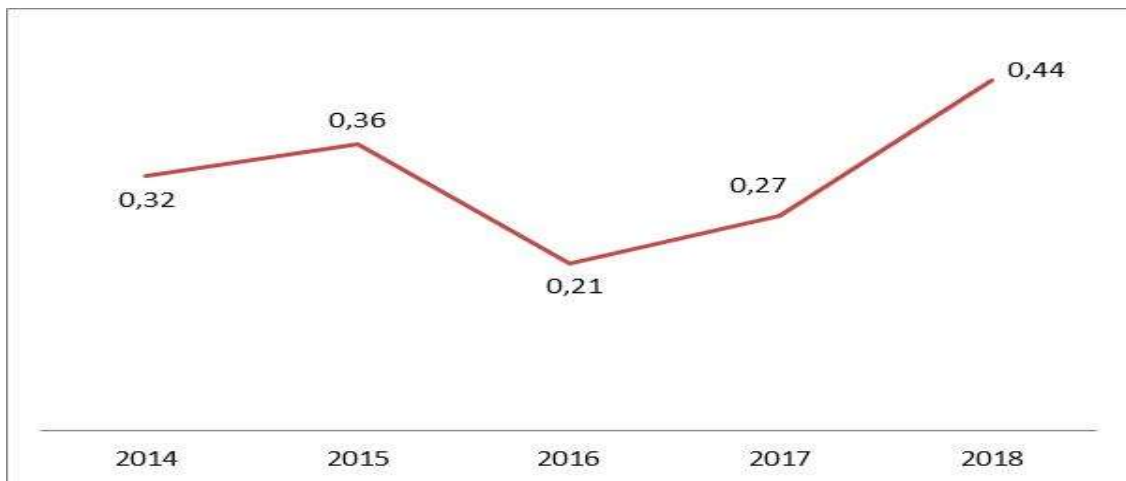
Gambar 2. 22. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2018



Sumber : BPS Kabupaten Tegal

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

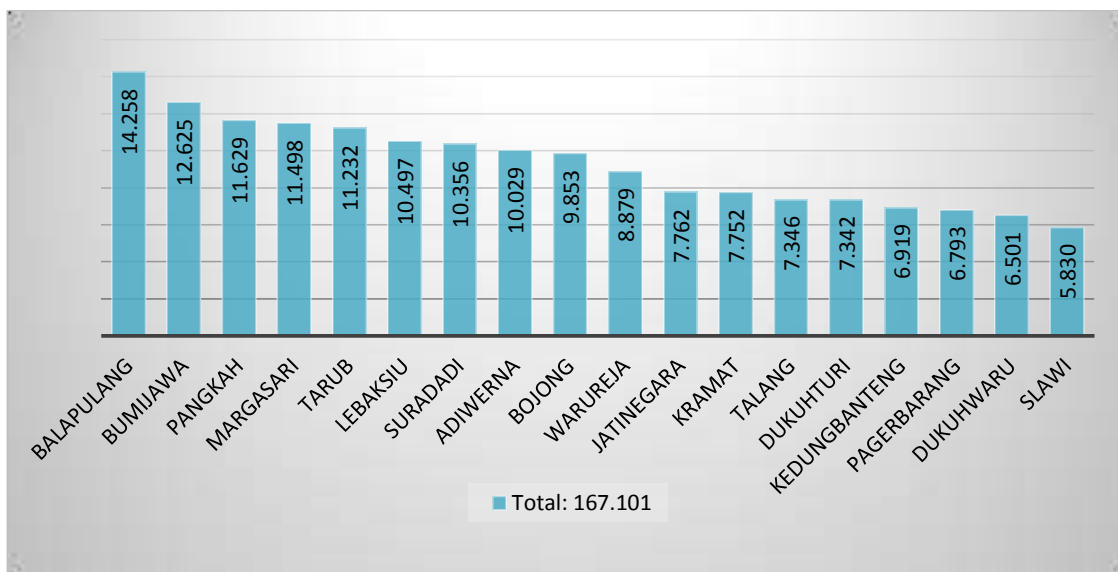
Gambar 2. 23. Indeks Kearifan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2018



Sumber : BPS Kabupaten Tegal

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2014 – 2018 angkanya cukup fluktuatif. Selama tiga tahun terakhir cenderung naik. Dari angka Indeks Kearifan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin tinggi. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin heterogen kasus/karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2015 dapat di ketahui jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 167.101 Rumah tangga, untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 14.258 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 5.830 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 24. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan

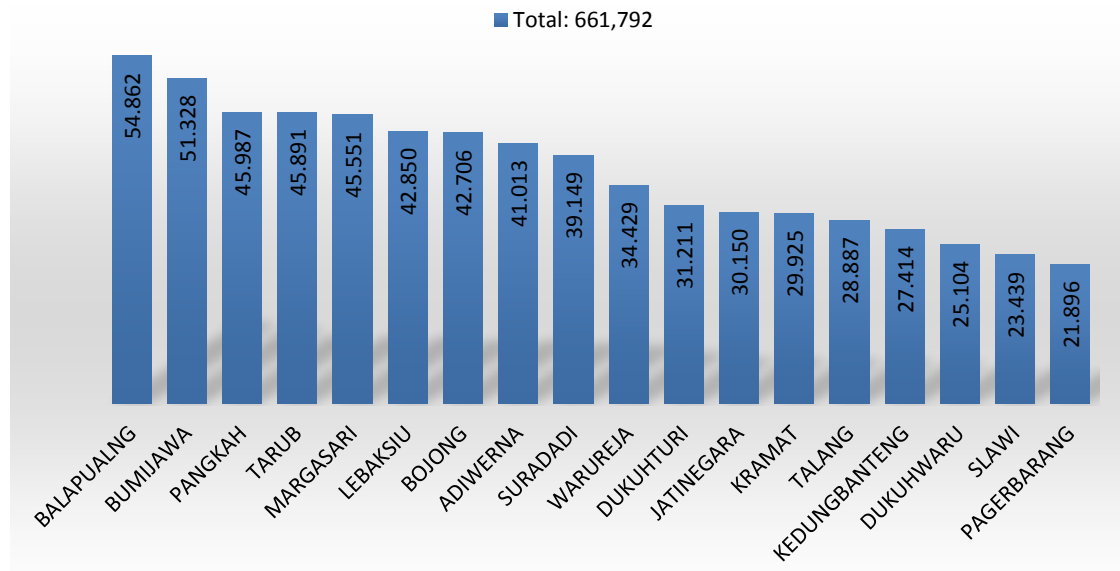


Sumber: PBDT, 2015.

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil BDT tahun 2015 adalah sejumlah 661.792 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 54.862 individu yang kedua yaitu kecamatan

Bumijawa sebanyak 51.328 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 45.987 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Slawi yaitu sejumlah 21.896 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 25. Jumlah individu Miskin Per Kecamatan



Sumber: PBDT, 2015.

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

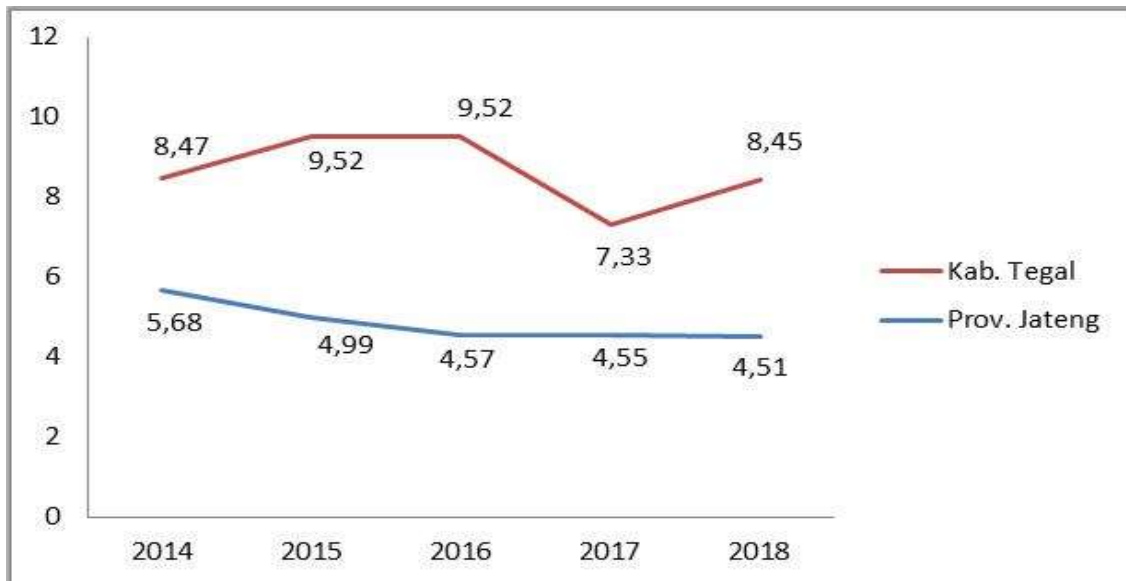
2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Pada Tahun 2018 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 58.203 orang atau 8,45%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari BPS). Secara umum, gap antara TPT Kabupaten Tegal dengan TPT Provinsi Jawa Tengah menjadi menurun di tahun 2017. Namun demikian TPT Kabupaten Tegal Tahun 2018 naik hingga 8,45% masih relatif tinggi; lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2017 dan rata-rata Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tegal agar

APBD dan kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal menunjukkan grafik yang naik turun sepanjang tahun 2012-2018. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. 26. TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

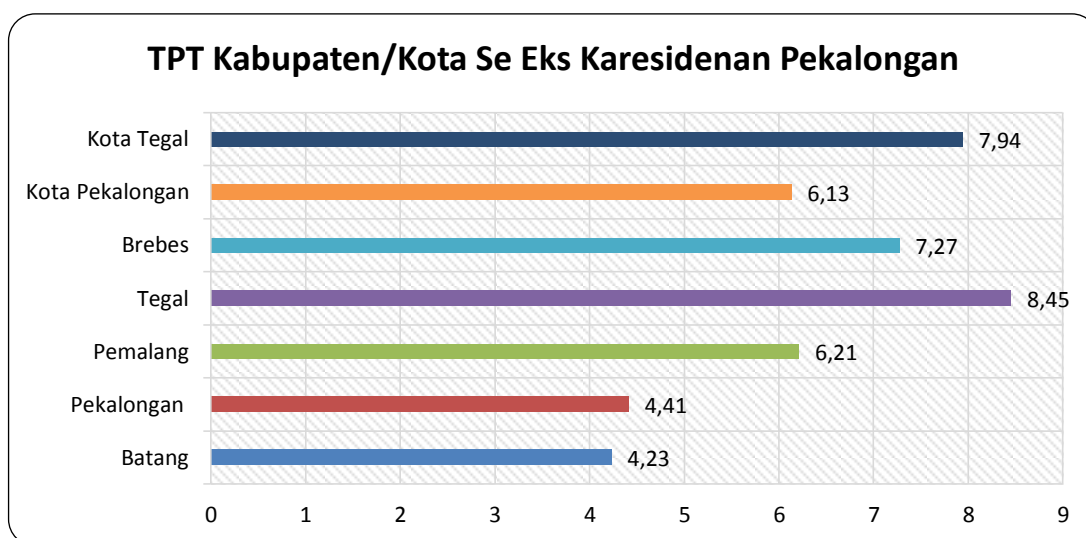


Sumber : BPS Kabupaten Tegal

Angka pengangguran pada tahun 2016 dan 2015 menunjukkan angka yang tetap, yaitu 9,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tahun 2016 dan 2015 di Kabupaten Tegal relative tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 8,45%. Hal ini terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2018 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 27. TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang, Tahun 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah 8,45% merupakan TPT yang paling tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (4,23%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

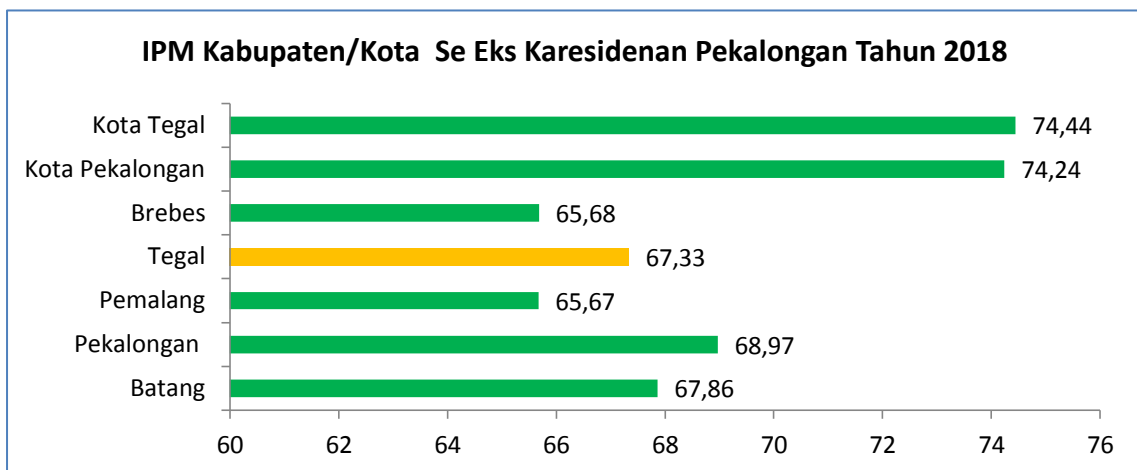
Tabel 2. 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2014 - 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
IPM :	64,10	65,04	65,84	66,44	67,33
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,80	70,90	71,02	71,14	71,28
Harapan Lama Sekolah (EYS)	11,99	12	12,01	12,06	12,34
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	5,93	6,30	6,54	6,55	6,70
Pengeluaran (Ribu Rupiah/orang/tahun)	8.050	8.367	8.709	9.136	9.433

Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten /Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2018 IPM Kabupaten Tegal sebesar 67,33% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (65,67) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (74,44).

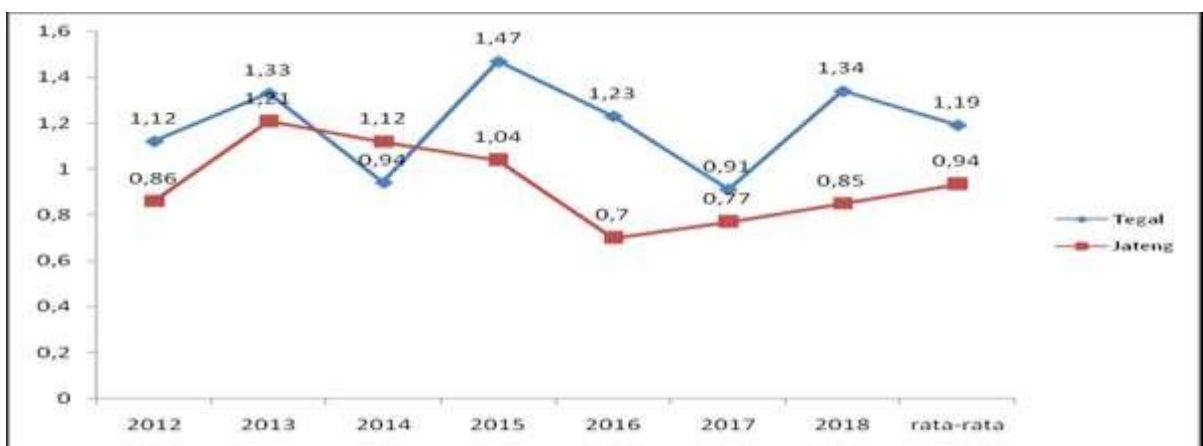
Gambar 2. 28. IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 2. 29. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018

2.2.9. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2018 angkanya menunjukkan 71,28 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,14 tahun pada tahun 2017 atau 71,02 tahun pada tahun 2016. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia produktif.

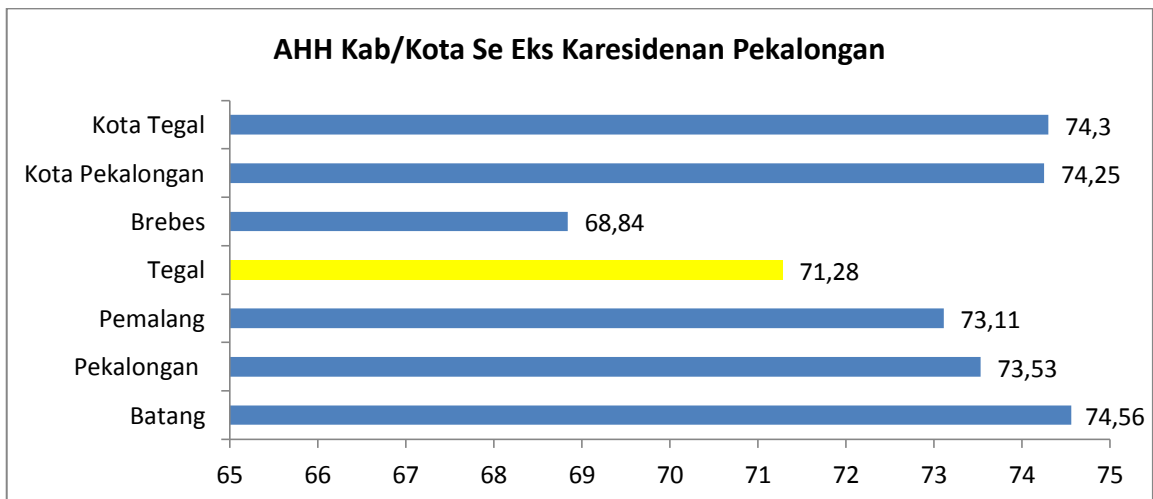
Gambar 2. 30. Angka Harapan Hidup Tahun 2014 - 2018



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten /Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah 71,28 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (68,84 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,56 tahun).

Gambar 2. 31. Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan

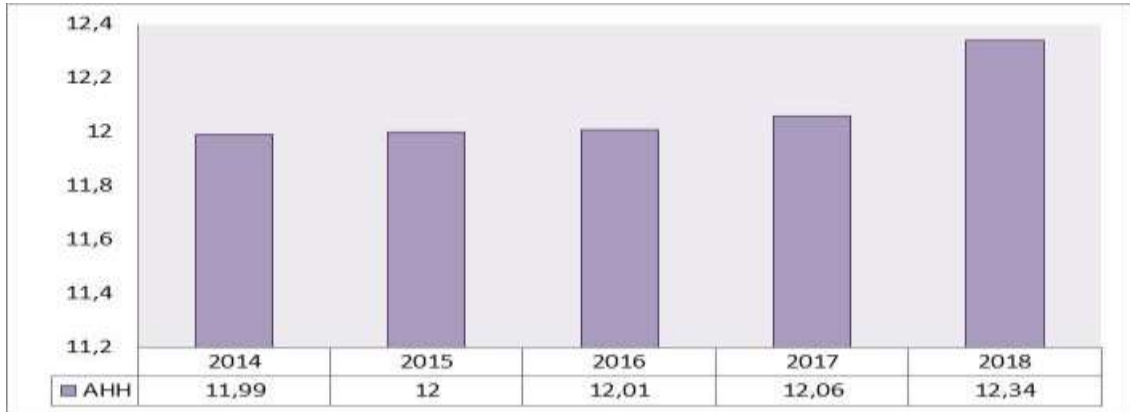


Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

2.2.10. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2016 angkanya 12,01 tahun, tahun 2017 telah menjadi 12,06 tahun dan tahun 2018 sebesar 12,34 tahun.

Gambar 2. 32. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 - 2018

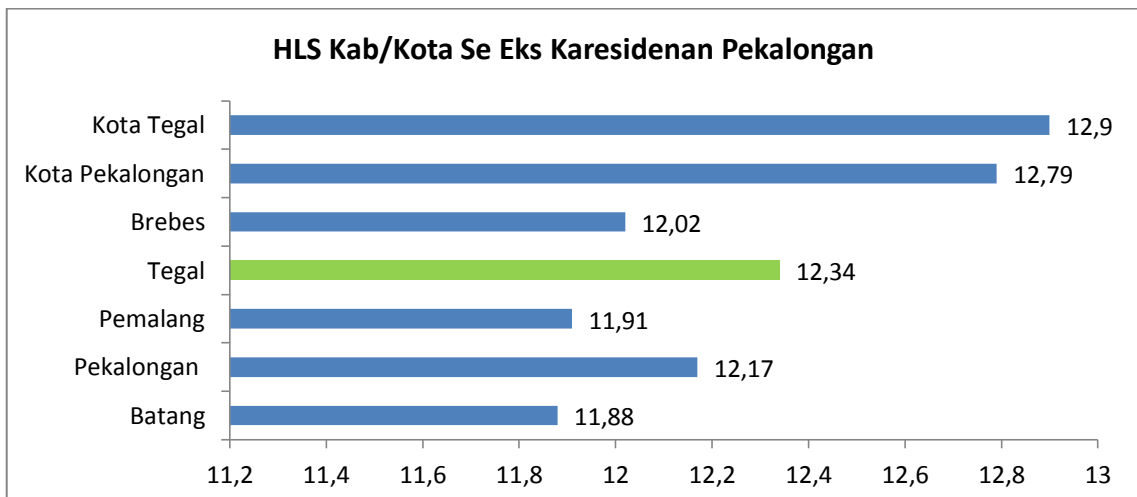


Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah 12,34 tahun menduduki peringkat keempat tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,91 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (12,9 tahun).

Gambar 2. 33. Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan

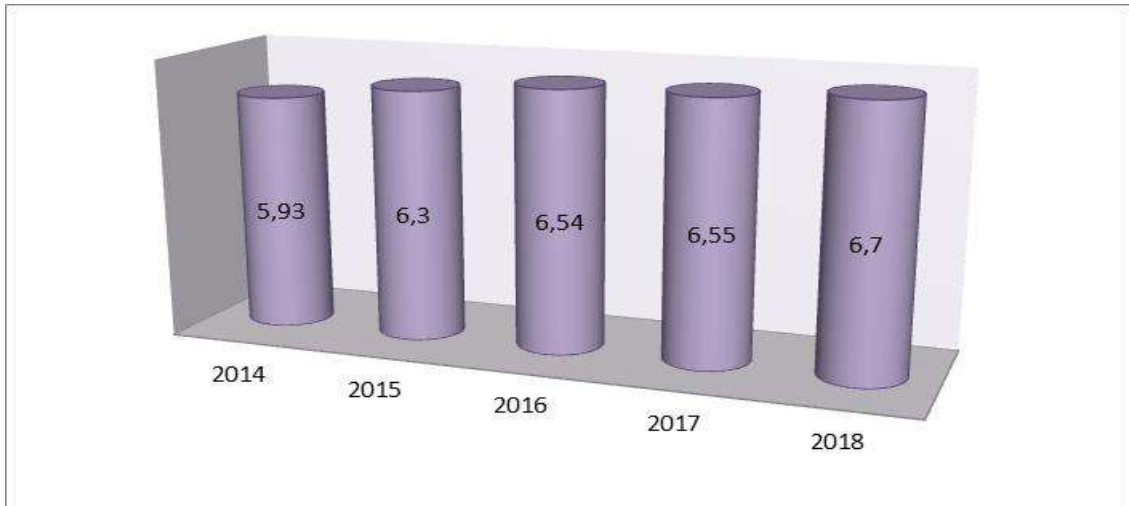


Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

2.2.11. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2016 menunjukkan angka 6,54 tahun, meningkat menjadi 6,55 tahun pada tahun 2017. tahun 2018 angkanya menjadi 6,70 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2. 34. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2014 -2018



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

2.2.12. Angka Kematian Bayi (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi focus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal menunjukkan tren menurun dalam 5 tahun terakhir.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. Akan tetapi tahun 2018 AKI Kab. Tegal sedikit meningkat, walaupun masih dalam kondisi yang cukup terkendali. Penurunan angka kematian ibu disebabkan oleh keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan, utamanya pelayanan kepada ibu hamil dan persalinan ibu.

Gambar 2. 35. Angka Kematian ibu (AKI) Tahun 2014 -2018



Sumber Dinas Kesehatan, Tahun 2018.

Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONED, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti call center penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor (tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (toma), sekolah, SKPD lain), pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng).

2.2.13. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usiasatu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampai dengan 2018 fluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya.

Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup tahun 2014 dan 2015 angkanya tidak mengalami perubahan. Tapi pada Tahun 2016 angka kematian bayi meningkat, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Dengan kondisi yang relatif berfluktuatif, meskipun cenderung

mengalami penurunan, tentu hal ini menjadi keprihatinan dan perlu upaya keras untuk terus menurunkan kembali angka kematian bayi di Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 36. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2014 -2018



Sumber Dinas Kesehatanl, Tahun 2018.

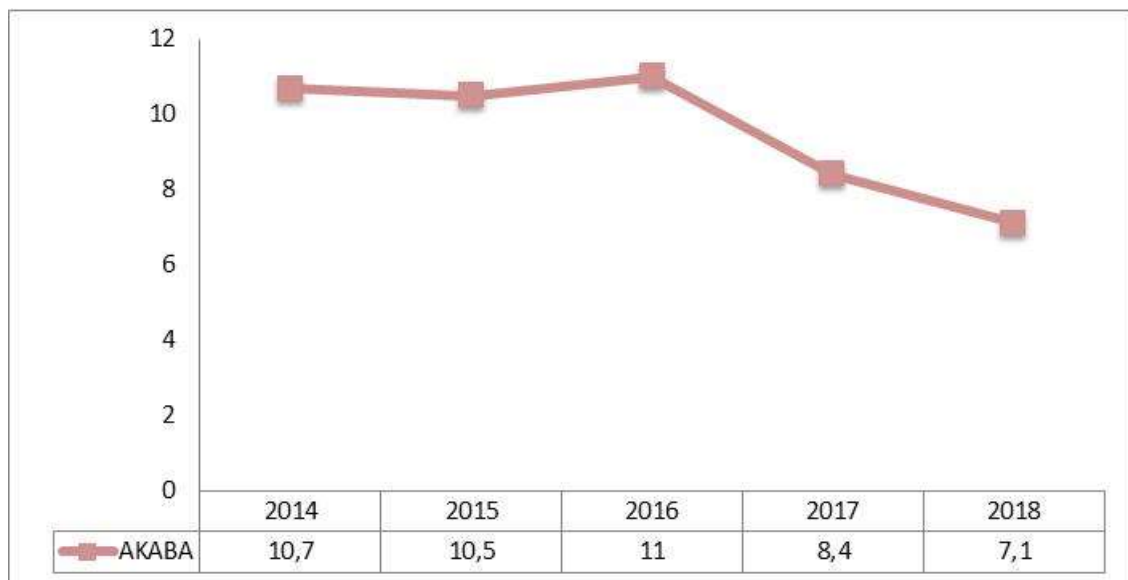
Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti call center penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, konseling IMD dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes, obat puskesmas mampu persalinan dan PONE D, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, SKPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari screening oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil resti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dlm penanganan ibu hamil resti.

2.2.14. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKB dan Akaba tahun 2015-2016 naik disebabkan karena Kasus BBLR dan asfiksia di Kabupaten Tegal masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang Kurang energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia. AKABA menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH. Angka kematian balita di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun secara signifikan pada 2 (dua) tahun terakhir.

Gambar 2. 37. Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2013 -2018



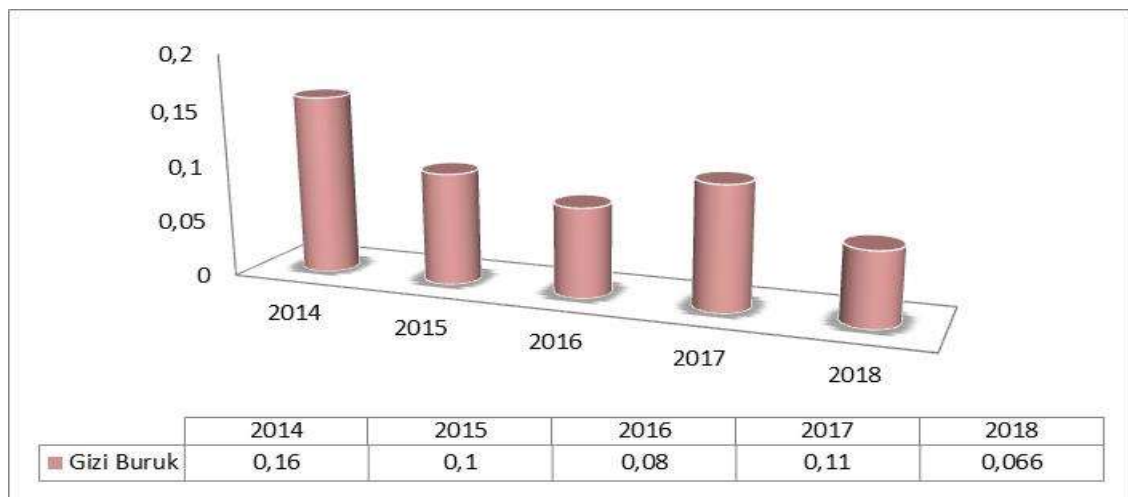
Sumber Dinas Kesehatanl, Tahun 2018

Data menunjukkan angka kematian balita usia 5 tahun per 1.000 Kelahiran Hidupdi Kabupaten Tegal pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan tetapi kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 dan tahun tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai pada angka 7,1. Menyikapi kondisi ini, kerjasama semua pihak perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat terus menekan angka kematian balita di tahun-tahun yang akan datang.

2.2.15. Gizi Buruk dan Stunting

Balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2014 hingga tahun 2018 bersifat fluktuatif, pada tahun 2014 sampai tahun 2016 angkanya menurun. Tetapi angka ini kemudian naik pada tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar berikut :

Gambar 2. 38. Kasus Gizi Buruk Kabupaten Tegal Tahun 2014 -2018



Sumber Dinas Kesehatanl, Tahun 2018

Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, 70% diantaranya karena faktor kemiskinan, sedangkan sisanya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena orang tua malas atau tidak tlaten dalam memberikan makanan pada anak balitanya. Bisa juga karena anak diserahkan sepenuhnya kepada pembantu yang tidak tahu mengenai masalah gizi atau tidak peduli pada kesehatan anak, sehingga anak akhirnya kekurangan gizi

Sedangkan Stunting menjadi isu kesehatan anak dan balita yang mendapat penanganan serius di Kabupaten Tegal. Grafik perkembangan stunting tahun 2014-2018 dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2. 14 Kasus Stunting 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	6,99	6.98	7.63	5.39	5.9

Sumber Dinas Kesehatanl, Tahun 2018

Pada tahun 2016, angka stunting mengalami kenaikan dibanding angka tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh penanganan stunting yang belum menjadi isu strategis nasional berpengaruh terhadap pelaporan dan penanganan kejadian stunting di masyarakat. Namun pada tahun 2017 dan 2018 grafik kasus stunting dapat ditekan karena kerjasama semua pihak dalam menekan angka stunting.

2.2.16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2013 - 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pembangunan Gender	86,76	87,03	86,76	86,76	87,52

Sumber : Dinas P3AP2KB, Tahun 2018

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Selama tahun 2018 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 87,52 naik 0,76 poin dibanding IPG tahun 2017. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

2.2.17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, namun mengalami penurunan tahun 2016 dan meningkat lagi tahun 2018. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2. 16 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2014 - 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pemberdayaan Gender	68,02	77,06	Tidak rilis data	51,15	68,90

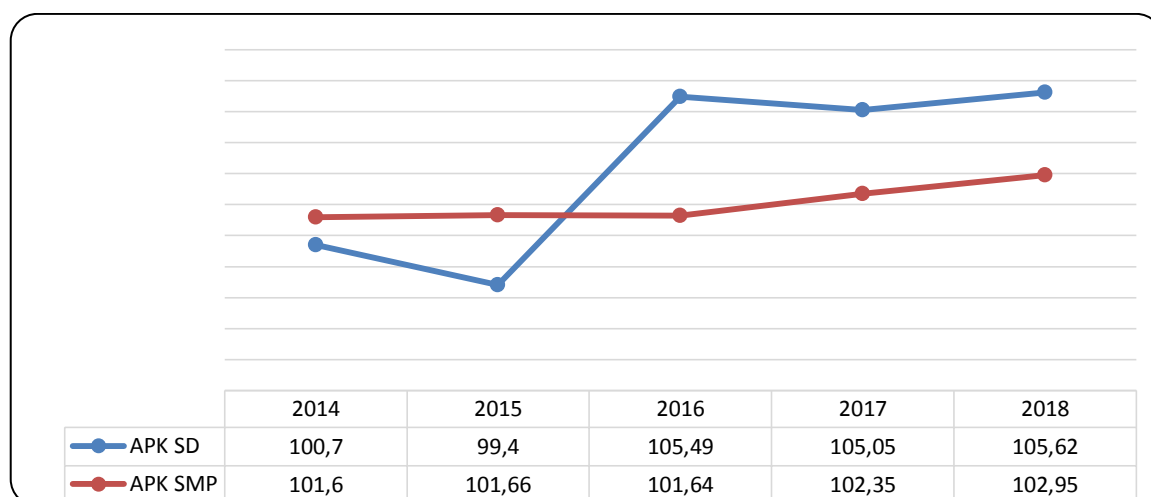
Sumber : Dinas P3AP2KB, Tahun 2018

Data yang dirilis BPS sejak tahun 2014-2018, pada tahun 2016 tidak ada rilis data BPS. Data tahun 2017 menunjukkan tren menurun karena dari komposit IDG yang ada, sumbangan perempuan dalam pendapatan pekerja hanya 29,03% dari angka ideal 50%. Kontribusi yang rendah pada komposit ini menyebabkan sedikit penurunan IDG pada tahun 2017.

2.2.18. Angka Partisipasi Kasar

APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APK semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah. APK SD/MI Kabupaten Tegal secara umum dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kecenderungan peningkatan, namun tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan adanya perpindahan peserta didik khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Tegal. APK Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 adalah sebagaimana dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 2. 39. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018.

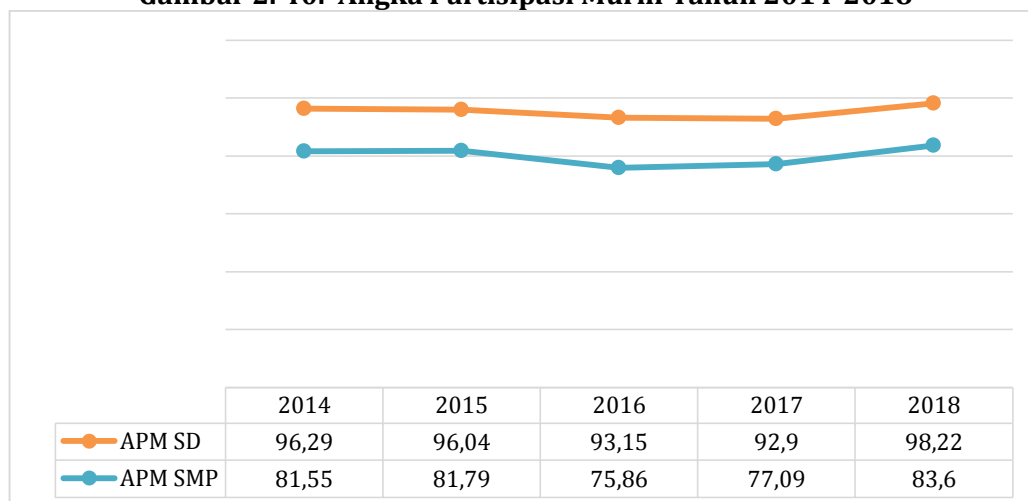
APK SMP secara umum dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kecenderungan peningkatan, namun tahun 2016 sedikit mengalami penurunan dikarenakan adanya perpindahan peserta didik khususnya yang berasal dari luar Kabupaten Tegal, terdapat peserta didik Kabupaten Tegal yang bersekolah di luar Kabupaten Tegal.

2.2.19. Angka Partisipasi Murni

APM (Angka Partisipasi Murni) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Di tahun 2018 APM SD/MI mencapai 98.22%. Artinya bahwa anak sekolah setingkat SD/MI di kabupaten Tegal yang sesuai dengan usia sekolah dari jenjang yang ada sebesar 98.22%, selebihnya 1,78% merupakan siswa SD yang tidak atau belum berusia 7-12 tahun.

APM SMP/MTs Tahun 2018 sebesar 83.60% yang artinya masih ada anak usia lebih atau kurang 13-15 tahun duduk di jenjang sekolah SMP/MTs dengan sebesar 16,40% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada. Menurut BPS, APM dianggap sebagai indikator yang lebih baik daripada APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Gambar 2. 40. Angka Partisipasi Murni Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP mengalami penurunan pada tahun 2015 menuju tahun 2016 dikarenakan kondisi siswa SMP yang menempuh jenjang SMP pada tahun 2016 lebih banyak yang berada di luar usia sekolah SMP, yaitu 13-15 tahun. Akibatnya, jumlah APM pada tahun 2016 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga pada APM SD pada tahun 2016. Siswa SD yang sedang menempuh pendidikan di SD yang usianya sesuai dengan usia siswa SD yaitu 7-13 tahun lebih sedikit ketimbang tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di bawah usia ideal SD, yaitu di bawah 7 tahun.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan

Tingkat kelulusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Adapun data tingkat kelulusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Tabel berikut ini.

Tabel 2. 17 Tingkat Kelulusan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Lulusan PAUD	29.576	30.150	31.918	32.468	35.907
2.	Angka Lulusan pendidikan Kesetaraan	98,44	99,20	96,97	97,75	0
	Jumlah Kelulusan	TP.2014/	TP.2015/	TP.2016/	TP.2017/	TP.2018/

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Paket A dan Kelulusan	2015 53 96,52%	2016 58 100%	2017 47 95,92%	2018 78 96,30%	2019 0
	Jumlah Kelulusan Paket B dan Kelulusan	TP.2014/ 2015 247 99,20%	TP.2015/ 2016 361 98%	TP.2016/ 2017 529 96,36%	TP.2017/ 2018 587 97,67%	TP.2018/ 2019 0
	Jumlah Kelulusan Paket C dan Kelulusan	TP.2014/ 2015 1.050 99,62%	TP.2015/ 2016 1.023 99,61%	TP.2016/ 2017 941 98,64%	TP.2017/ 2018 823 99,28%	TP.2018/ 2019 0
3.	Angka Lulusan Uji Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan	60	73	86	85	65

Sumber : Dikbud, Tahun 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat Tingkat Kelulusan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dari angka kelulusan PAUD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 meningkat. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan semakin meningkatnya pelayanan pendidikan PAUD. Kemudian untuk persentase tingkat kelulusan Uji Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan tahun 2014 meningkat sampai dengan tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 65% . hal ini disebabkan kemampuan berwirausaha yang masih rendah, ada juga lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

2) Pendidikan Dasar

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pendidikan dasar dapat terlihat dari semakin menurunnya angka putus sekolah SD dan SMP, semakin baiknya angka kelulusan SD dan SMP, serta semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD dan SMP. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun

No	Uraian Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Putus Sekolah SD	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14
2	Angka Putus Sekolah SMP	0,60	0,61	0,72	0,31	0,13
3	Angka Kelulusan Sekolah SD	100	100	100	100	100
4	Presentase Angka Kelulusan Sekolah SMP	99,98	99,96	99,98	99,97	99,96

Sumber : Dikbud, Tahun 2018

Angka putus sekolah SD dan SMP menunjukkan tren yang menurun sepanjang tahun. Hal ini disebabkan keberhasilan program penurunan Angka Putus Sekolah melalui Program Yuh Sekolah Maning maupun Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Sementara partisipasi kelulusan selalu di atas

99,90%. Siswa yang tidak lulus SMP umumnya karena sakit dan terkendala mengulang ujian melalui jalur formal sehingga biasanya tersalurkan melalui jenjang pendidikan non formal.

3) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk meningkatkan rasio guru terhadap murid yaitu jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 19 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	3.053	3.179	3.070	2.885	2.641
1.2.	Jumlah Murid	132.207	130.201	127.430	126.809	126.072
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:43,30	1:40,95	1:41,51	1:43,95	1:47,73
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	1.403	1.390	1.253	1.276	1.228
2.2.	Jumlah Murid	35.956	36.206	36.712	31.715	35.590
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:25,63	1:26,04	1:29,29	1:24,85	1:28,98

Sumber : Dikbud, Tahun 2018

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2014-2018, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2. 20 Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2014 -2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.	Rasioguru/Kelas	1:0,1	1:0,15	1:0,2	1:0,25	1:0,3
2.	Rasioguru/Mapel	1:1:24	1:1:27	1:1:29	1:1:31	1:1:32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

Dari isian tabel tersebut diatas bahwa untuk Rasio Guru Per Kelas, Rasio Guru per mata pelajaran cenderung tidak ideal sehingga dari data tersebut diharapkan akan terjadi rasio guru per kelas 2024 menjadi 1:0,55 dan untuk rasio guru/mapel menjadi 1:1:27

4) Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk bisa mewujudkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan dibutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar lainnya. Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan dipastikan baik dan berfungsi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 21 Kondisi Sarpras Pendidikan dan Kebudayaan dalam kondisi baik Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas	10,45	11,35	12,76	13,56	15
2.	Sarana Prasarana Dikdas	75,70	79,44	79,44	81,48	84,11
3.	Sarana dan Prasarana Kebudayaan	12,45	15,56	16,76	17,78	19,29



Sumber : Dikbud , Tahun 2018

Dari data pada tabel tersebut diatas kondisi 5 tahun ke depan diharapkan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas tahun 2024 menjadi 30,45%, Sarana dan Prasarana Dikdas diharapkan 88,89% pada tahun 2024 dan sarana dan prasarana kebudayaan pada tahun 2024 diharapkan menjadi 37,7 %.

5) Hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Tahun 2018

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diintervensi melalui 7 program untuk mencapai 56 indikator kinerja. Urusan Pendidikan kesemuanya dilaksanakan oleh Dikbud. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pendidikan pada tahun 2018.

Tabel 2. 22 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
1	APK PAUD/TK (4-6 th)	80.00	75.00	55.08	73.44	Dikbud	
2	APK PAUD/KB (0-4 th)	75.00	71.00	4.52	6.37	Dikbud	
3	APM PAUD TK	66.02	64.02	54.66	85.38	Dikbud	
4	Persentase PAUD terakreditasi	30.00	19.00	25.34	133.37	Dikbud	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
1	APK SD/SDLB/MI/Paket A	113.00	112.00	105.62	94.30	Dikbud	
2	APM SD/SDLB/MI/Paket A	99.00	98.93	98.22	99.28	Dikbud	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2017
3	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99.00	98.28	94.71	96.37	Dikbud	★
4	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	93.49	92.56	83.60	90.32	Dikbud	★
5	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0.13	0.15	0.04	193,52	Dikbud	★
6	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0.50	0.54	0.10	198,33	Dikbud	★
7	Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	99.99	99.99	99.99	100	Dikbud	★
8	Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99.99	99.99	99.96	99.97	Dikbud	★
9	Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB/Paket A	22.71	21.81	22.32	102.34	Dikbud	★
10	Nilai rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs/Paket B	23.74	23.14	23.15	100.04	Dikbud	★
11	Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM	93.54	92.61	86.11	92.98	Dikbud	★
12	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM	85.13	84.29	90.66	107.56	Dikbud	★
13	Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SPM	33.82	33.32	87.56	262.78	Dikbud	★
14	Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SPM	50.00	49	91.11	185.94	Dikbud	★
15	Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak	56.00	46.00	67.59	146.93	Dikbud	★
16	Tersedianya Lab IPA SMP/MTs	27.00	6.00	80.56	1342.67	Dikbud	★
17	Tersedianya Peralatan Lab IPA SMP/MTs	24.00	5.00	74.07	1481.40	Dikbud	★
18	Persentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	56.00	46.00	75.71	164.59	Dikbud	★
19	Persentase SD/MI melaksanakan Kurikulum 2013	45.00	30.00	100	194.57	Dikbud	★
20	Persentase SMP/MTs melaksanakan Kurikulum 2013	21.20	15.20	18.52	121.84	Dikbud	★
3	Program Pendidikan Non Formal						
1	Angka Kelulusan Paket A	99.99	99.99	95.92	95.93	Dikbud	★
2	Angka Kelulusan Paket B	99.99	99.99	96.72	96.73	Dikbud	★
3	Angka Kelulusan Paket C	99.99	99.99	98.64	98.65	Dikbud	★
4	Persentase LKP kinerja A dan B	10.00	6.00	16.00	266.67	Dikbud	★
5	Persentase Buta Aksara > 15 tahun	2.50	3	2.44	81.33	Dikbud	★
6	Persentase Kecamatan memiliki PKBM	100.00	100.00	100.00	100.00	Dikbud	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2017
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
1	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV	35.00	35	50.88	145.37	Dikbud	★
2	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV	85.00	80.00	94.65	118.31	Dikbud	★
3	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkualifikasi S1/DIV	100.00	100.00	94.75	94.75	Dikbud	★
4	Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	26.00	25	95.06	380.24	Dikbud	★
5	Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	84.50	84.5	96.49	114.19	Dikbud	★
6	Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik	81.50	81	91.14	112.52	Dikbud	★
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						
1	Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	12.00	10	91.77	917.70	Dikbud	★
2	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	25.50	21.5	72.38	336.65	Dikbud	★
3	Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik	79.50	78.5	93.71	119.37	Dikbud	★
4	Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik	76.00	75	84.53	112.71	Dikbud	★

Sumber: Dikbud, 2019. ★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2014-2019 dari sebanyak 56 target indikator kinerja status capaian kinerja yang sangat tinggi sebanyak 53 indikator, sedang sebanyak 2 indikator dan rendah sebanyak 1 indikator.

Dari hasil capaian target kinerja Program PAUD, teridentifikasi permasalahan terkait data dasar tentang penduduk usia yang tidak relevan dengan tahun berjalan; motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak di usia 0-4 Tahun masih kurang; sarana dan prasarana PAUD yang kurang memadai. Untuk mengurai hal tersebut dibutuhkan data dasar penduduk usia yang valid setiap tahunnya; pengadaan sarana dan prasarana PAUD serta dukungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung langkah Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang

mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal; belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan TIK untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel; belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal; belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan; ketimpangan kualifikasi sumberdaya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Sejumlah usaha masih perlu dilakukan, diantaranya pembuatan SOP dalam setiap kegiatan; optimalisasi akses teknologi data pendidikan; peningkatan tata kelola dunia pendidikan yang lebih baik; dan optimalisasi pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

B. Kesehatan

1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan pengendalian penyakit mencakup penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berikut capaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit dari tahun 2014 – 2018:

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	%	95	83	96	96	95
2.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95	100	100	100	90
3.	Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15 th	per 100.000 penduduk < 15 th	2	0,66	2	2,28	2,28
4.	Angka Penemuan kasus TB	per 100.000 penduduk	94	81	142	215	195
5.	Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	%	89	91	93	94,5	88
6.	Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	Orang	85	129	141	154	158
7.	Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	%	60	53	55	57	54
8.	Angka Penemuan kasus baru Kusta	per 100.000 penduduk	1,5	1,6	1,3	1,45	1,48
9.	Angka kesakitan DBD	per 100.000 penduduk	33	30	43	18	5
10.	Angka kematian DBD	%	4	2,8	2,9	1,2	1,38
11.	Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani	%	58	72,8	115	97	93
12.	Cakupan penderita Diare	%	100	195	157,9	130	118

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	yang ditangani						
13.	pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	N/A	N/A	N/A	0,58	34,67
14.	pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	N/A	N/A	N/A	23,82	24,07
15.	pelayanan kesehatan penderit Diabetes Melitus	%	N/A	N/A	N/A	24,05	14,18
16.	pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	%	N/A	N/A	N/A	100	36,83

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2018

2) Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan akreditasi puskesmas, pembinaan pengelolaan kefarmasian, indikator – indikator pada program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 24 Capaian Kinerja Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	N/A	65	N/A	90	96,55
2.	ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	N/A	80	N/A	100	99,51
3.	Puskesmas terakreditasi	%	17,24	20,69	48,28	82,76	100
4.	Cakupan pelayanan perijinan	%	N/A	89,97	N/A	100	100
5.	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari	Orang	15	20	20	35	45
6.	penduduk peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	N/A	N/A	N/A	N/A	80,04**

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2018

Semua puskesmas di Kabupaten Tegal sudah terakreditasi, dengan status terakreditasi dasar, madya, dan utama. Belum ada puskesmas yang terakreditasi paripurna. Setiap tiga tahun, dilakukan reakreditasi untuk menjaga kualitas pelayanan.

Tabel 2. 25 Persebaran 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tegal Per Desember 2018

No.	Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesmas	Tenaga Kesling	Tenaga Gizi	Tenaga ATLM	Pemenuhan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Minimal
1	Margasari	2	0	19	29	2	1	2	1	2	Belum Memenuhi
2	Kesambi	2	0	10	14	1	1	1	1	1	Belum Memenuhi
3	Bumijawa	3	1	21	29	2	2	1	1	1	Memenuhi
4	Bojong	2	0	7	30	2	4	0	1	0	Belum Memenuhi
5	Danasari	1	0	5	20	1	2	1	0	1	Belum Memenuhi
6	Balapulang	3	1	26	25	3	1	1	2	2	Memenuhi
7	Kalibakung	2	0	6	23	1	1	1	1	1	Belum Memenuhi
8	Pagerbarang	1	1	10	23	1	1	1	1	1	Memenuhi
9	Lebaksiu	2	0	14	30	2	1	2	1	1	Belum Memenuhi
10	Kambangan	2	1	7	26	0	2	1	0	1	Belum Memenuhi
11	Jatinegara	2	0	18	31	2	1	1	1	2	Belum Memenuhi
12	Kedungbanteng	2	1	10	29	1	2	1	1	1	Memenuhi
13	Pangkajene	3	1	10	30	2	1	1	1	1	Memenuhi
14	Penusupan	2	0	9	31	2	1	1	2	1	Belum Memenuhi
15	Slawi	2	1	9	27	1	2	1	1	1	Memenuhi
16	Dukuhwaru	2	1	10	32	1	1	1	1	2	Memenuhi
17	Pagiyanten	2	1	17	27	2	1	1	1	1	Memenuhi
18	Adiwerna	2	1	4	29	1	2	1	1	1	Memenuhi
19	Dukuhturi	2	1	6	30	1	2	1	1	2	Memenuhi
20	Kupu	2	0	7	27	1	0	1	1	1	Belum Memenuhi
21	Talang	2	1	11	25	1	1	0	0	1	Belum Memenuhi
22	Kaladawa	2	1	4	26	3	1	1	1	1	Memenuhi
23	Tarub	2	1	18	36	3	2	1	1	2	Memenuhi
24	Kesamiran	2	0	8	22	2	1	1	1	1	Belum Memenuhi
25	Kramat	2	1	6	34	1	1	1	2	1	Memenuhi
26	Bangun Galih	2	0	4	28	1	1	1	1	1	Belum Memenuhi

No.	Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesmas	Tenaga Kesling	Tenaga Gizi	Tenaga ATLM	Pemenuhan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Minimal
27	Suradadi	3	1	11	15	1	1	1	2	2	Memenuhi
28	Jatibogor	2	1	5	22	0	1	1	1	1	Belum Memenuhi
29	Warurejo	2	1	15	31	2	1	1	1	2	Memenuhi

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2018

3) Kesehatan Masyarakat

Capain kinerja pada Kesehatan Masyarakat antara lain:

Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Kesehatan Masyarakat

Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	72,35	62,3	78,75	84,98	85,6
2	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	86,88	62,3	78	79,6	84,46
3	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	%	87	87	43,69	90	86
4	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	%	31,36	44,9	52,9	61,7	63
5	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	%	2,09	7,6	10,45	16,72	16,72
6	Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	%	20	25	31,03	35	45
7	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	65,69	55	63,4	75,86	74
8	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	72	84,6	81,2	80	81
9	Persentase Desa Siaga Strata Mandiri	%	0,7	3,8	5,9	7,7	7,7
10	Cakupan penjangkaran Siswa SD/MI	%	95,86	96,3	96,1	98,9	98

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2018

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas PONE D dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

Saat ini cakupan Desa ODF (Open Defecation Free) atau Desa SBS (Stop Buang Air Besar) sebanyak 60 desa atau sebesar 22,9% dari 287 desa/kelurahan di Kabupaten Tegal. Capaian tersebut melebihi target tahun 2018, yaitu 6,97% atau sebanyak 20 desa/kelurahan. Walaupun belum berstatus ODF, sebanyak 177 desa sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Artinya, sebanyak 177 desa sedang berusaha meningkatkan kesehatan dengan 5 pilar STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan/ Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/ PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga. Hambatan yang dihadapi pada program ini antara lain budaya masyarakat terkait sanitasi, misal

buang air besar di sungai dan kebun, membakar sampah plastik yang notabene mencemari udara, membuang sampah anorganik pada kebun dan tidak diolah dengan baik, dan belum semua masyarakat mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dengan baik.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain pemberian bantuan jamban bagi masyarakat (pemicu) melalui kegiatan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), penyelenggaraan klinik sanitasi di puskesmas yang memberikan pelayanan konsultasi terkait sanitasi, dan kegiatan **PDPM** (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat).

4). Kesehatan Keluarga

Indikator – indikator Kesehatan Keluarga antara lain:

**Tabel 2. 27 Capaian Indikator Kesehatan Keluarga
Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	90,96	74,25	98,2	97,25	83,93
2.	Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	%	86,39	78,8	100	98,14	94,78
3.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	173	120,8	100,3	52,6	56
4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,96	67,4	94,5	98,8	88,6
5.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	84,88	92	99	130	100
6.	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	93,5	71	94	96,22	91,67
7.	Cakupan Ibu Hamil K4	%	86,39	69,16	90,26	92,61	85,15
8.	Cakupan Lansia terlayani kesehatan	%	60,33	78,39	30,71	66,19	33,71
9.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8,9	9,6	9,7	7,9	6,7
10.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 kelahiran hidup	9,6	10,5	11	8,4	7,1
11.	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	%	84,88	92,5	99,1	100	100
12.	Cakupan kunjungan bayi	%	95,72	99,2	103,35	98,2	100
13.	Prevalensi Balita gizi buruk	%	0,92	0,1	0,16	0,11	0,066

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
14.	Prevalensi Balita gizi baik	%	99,08	99,03	98,54	99,8	98,65
15.	Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	%	35	N/A	N/A	100	100
16.	Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	%	12,7	17,63	20	88,58	92
17.	Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	%	88,58	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2018

Kasus gizi buruk dan gizi kurang masih terjadi di Kabupaten Tegal. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal antara lain memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada balita gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang, pemberian MPASI pada balita dari keluarga miskin, dan pemberian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK). Pelayanan kesehatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian vitamin A dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita di posyandu dan puskesmas. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pada kegiatan pemberian MPASI. Hal ini menyebabkan MPASI hanya diberikan pada balita gizi kurang dari keluarga miskin. Balita gizi kurang dari keluarga mampu diberi penyuluhan terkait pemenuhan gizi seimbang bagi balita gizi kurang.

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS. Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan RS mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai Standar sebesar 3% setiap tahunnya sehingga mencapai target sampai Tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 2. 28 Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pelayanan RS sesuai Standar	54	58	64	70	89

Sumber : RSUD Suradadi Tahun 2018

5) Pelayanan Penunjang (Rumah Sakit Dokter Soeselo Slawi)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Ada beberapa indikator yang sudah tercapai akan tetapi masih ada juga beberapa indikator yang perlu di tingkatkan. Berikut capaian kinerja pelayanan penunjang di RSUD Dr. Soeselo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

**Tabel 2. 29 Standar Ketenagaan Pelayanan Rumah Sakit Kelas B
Tahun 2014-2018**

No	Pelayanan	Jenis tenaga	standar	2014	2015	2016	2017	2018
1	Radiologi	Radiografer	2/alat	7	7	8	9	9
2	Laboratorium	Analisis	16	13	13	13	14	15
3	BDRS	TTD	6	6	6	6	6	6
4	Haemodialisa	perawat	2/alat	6	6	7	8	8
5	Rehab medik	Fisio,TW,OT	10	9	10	10	10	10
6	Farmasi	Apoteker	13	9	9	11	11	12
		TTK	20	22	22	25	27	33
7	Gizi	Nutrisisionis		8	8	8	8	8
8	Sanitasi &loundry	kesling		3	3	3	3	3
9	IPSRS	Bangunan	13	2	2	2	2	2
		Listrik	13	2	2	2	3	4
		Ac	13	2	2	2	2	2
		Elektronik	13	1	1	1	1	1
		pertukangan	13	2	2	2	2	2

Sumber : RSUD dr Soeselo Slawi Tahun 2018

Berdasarkan data di atas masih ada tenaga yang secara kuantitas masih kurang dan masih ada yang secara kompetensi belum memiliki sertifikat pelatihan yang di tentukan diantaranya perawat Haemodialisa, Tenaga Teknis Darah

6) Standar Sarana, Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit kelas B Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor:56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, menurut Jenis Sarana ,Prasarana dan peralatan maupun kondisinya masih ada yang perlu di tambah dan perlu di tingkatkan kualitasnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana dan peralatan RSUD dr Soeselo dari tahun 2014 s/d 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 30 Tabel Sarana dan Prasarana Peralatan Rumah Sakit Tahun 2014-2018

No	Uraian	Persentase Sarpras Rumah Sakit (%)					
		Standar	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sarana dan Prasarana	100	50	60	68	71	73
2	Peralatan	≥ 60 %	75	80	85	87	88

Sumber : RSUD dr Soeselo Slawi Tahun 2018

Persentase penunjang medis adalah persentase indikator standar pelayanan minimal penunjang medis yang terpenuhi dan prosentasi Peralatan Medis dan penunjang medis yang terpenuhi. Sedangkan penunjang Non Medis merupakan rata-rata akumulasi persentase standar pelayanan minimal, pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Penunjang Medis Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Persentase Penunjang Medis (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Pelayanan Penunjang Medis	70,8%	54,1%	70,8%	79,1%	79,1%

2	Persentase Pelayanan Penunjang Non Medis	68	73	87	88	90
---	--	----	----	----	----	----

Sumber : RSUD dr Soeselo Slawi Tahun 2018

Berdasarkan Data pada Tabel diatas di simpulkan bahwa Pelayanan Penunjang medis maupun penunjang non medis belum maksimal sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan.

7) Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Tahun 2018

Urusan Kesehatan diampu oleh Dinkes, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, dan Disdag, Kop UKM. Urusan Kesehatan terdiri dari 18 program dan 77 indikator. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2018.










Tabel 2. 32 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Kesehatan



No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018	Status Kinerja 2018
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
1	Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	100	96,55	96,55	100	★
2	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	★
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
1	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	98	97	98,80	101,86	★
2	Persentase Puskesmas PONED sesuai SPM	100	89,66	100,00	111,53	★
3	Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000)	1:48,79	1:48,79	1:48,9	100,10	★
4	Persentase PPK BLUD Puskesmas	100	100	100,00	100,00	★
5	Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	72	90	90	100	★
6	Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	96,9	94,9	88,73	93,50	★
7	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	90	90	90	100	★
8	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80	80	81	101,25	★
9	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	48,78	45,3	63,00	139,07	★
10	Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	7,67	6,97	22,90	328,55	★
11	Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	45	40	45,00	112,50	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018	Status Kinerja 2018
12	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	75	75	75,63	100,84	★
13	Jumlah Puskesmas terakreditasi	29	26	29,00	111,54	★
14	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	89,66	100,00	111,53	★
15	Jumlah paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	29	29	29,00	100	★
16	Cakupan pelayanan perijinan	100	100	100	100	★
17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	100	★
18	Cakupan pelayanan kesehatan khusus	100	100	100	100	★
19	Cakupan Call Center dan Jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	100	100	100	★
20	Persentase Tenaga Kesehatan terlatih PPGD, BCLS dan ATLS	100	100	100	100	★
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Jumlah inspeksi obat dan makanan	2,00	2	4	200	★
4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia					
1	Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan tradisional di Puskesmas	1	1	1	100	★
2	Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku	3	3	3	100	★
3	Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari	50	45	45	100	★
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					
1	Jumlah promosi WKJ	1	1	1	100	★
2	Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll)	10	8	8	100	★
3	Desa Siaga Strata Mandiri	5	4	7	175	★
4	Cakupan penjarangan Siswa SD/MI	100	100	100	100	★
5	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	4	4 UKBM	4,00	100	★
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
1	Prevalensi Balita gizi buruk	0,2	0,42	0,069	183,57	★
2	Prevalensi Balita gizi baik	99,8	99,58	99,65	100,07	★
3	Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	60	55	100,00	181,82	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018	Status Kinerja 2018
4	Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	25	90	92	102,22	★
5	Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	100	98	100	102,04	★
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					
1	Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat	1	1	1	100	★
2	Jumlah pengembangan lingkungan sehat	8	7	7	100	★
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
1	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	100	99	99	100	★
2	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	99	100	101	★
3	Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15th	2	2,00	2,80	140	★
4	Angka Penemuan kasus baru TB	110	105	232	221	★
5	Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	90	90	82	91	★
6	Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	130	120	162	135	★
7	Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	80	80	50	63	↓
8	Angka Penemuan kasus baru Kusta	1,6	1,58	1,58	100	★
9	Angka kesakitan DBD	8	8	5,4	132,5	★
10	Angka kematian DBD	1	2	1,3	135	★
11	Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani	75	70	94	134	★
12	Cakupan penderita Diare yang ditangani	100	100	127	127	★
13	Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	★
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
1	Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun	1	1	1	100	★
2	Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan	1	1	1	100	★
10	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					
1	Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN	66.000	66.000	66.000	100	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018	Status Kinerja 2018
11	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					
1	Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap	29	21	29	138,1	★
2	Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap	100	86,21	100	116	★
3	Jumlah paket pelatihan Pokjanel Posyandu	1	1	1	100	★
4	Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer	1	2	2	100	★
5	Jumlah ambulance di Fasyankes Primer	58	50	52	104	★
12	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata					
1	Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD	85.000	78.000	143.091	183,45	★
2	Jumlah pelayanan rawat inap RSUD	35.000	32.000	37.749	117,97	★
13	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					
1	Jumlah Faskes. Primer yang melayani JKN	29	29	29	100	★
14	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					
1	Angka Kematian Bayi	7,6	7,9	6,7	115,19	★
2	Angka Kematian Balita	8,30	8,6	7,1	117,44	★
3	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	97	95	100	105,26	★
4	Cakupan kunjungan bayi	99	98	100	102,04	★
5	Cakupan Pelayanan Anak Balita	89	88	90,2	102,50	★
15	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					
1	Jumlah Lansia	3.752,00	3.724	97.143	2.608,57	★
2	Cakupan Lansia terlayani kesehatan	12,2	11,5	35,79	311,22	★
16	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan					
1	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat	75	75	75,63	101	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018	Status Kinerja 2018
	kesehatan					
2	Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM	65	60	50	83,33	
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					
1	Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	100	96	100	104,17	
2	Angka Kematian Ibu	93,3	103,3	48,2	153,34	
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	94	96,41	102,56	
4	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	97	95	100	105,26	
5	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	97	97	97	100	
6	Cakupan Ibu Hamil K4	94	93	93,12	100,13	
18	Program Peningkatan Pelayanan					
1	Klasifikasi RS dr Soeselo menjadi kelas B Pendidikan	85,00	85,00	75,00	88,24	
2	Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo	95,00	95,00	90,00	94,74	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: Dinkes; RSUD dr. Soeselo; RSUD Suradadi; 2019

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2014-2019 dari sebanyak 77 target indikator kinerja status capaian kinerja yang sangat tinggi sebanyak 74 indikator, sedang sebanyak 2 indikator dan rendah sebanyak 1 indikator.

Pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 2 indikator, yaitu Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar dan Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang terealisasi masing-masing 96,55% dan 100% dari target 96,55% dan 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan indikator ini adalah rak obat, pengukur suhu ruangan, lemari narkotik/psikotropik belum tersedia; ada beberapa sarana yang rusak, diantaranya: alarm, genset dan AC; pemanfaatan sarana komputer untuk pelayanan *e-logistic* belum dilaksanakan; penayangan daftar obat dan perbekalan kesehatan di *e-catalog* LKPP masih bertahap dan tidak sejak awal tahun 2018; ada beberapa *item* obat dan perbekalan kesehatan yang tidak tersedia di *e-catalog* LKPP; ada beberapa *item* obat dan perbekalan kesehatan yang tercantum di *e-catalog* LKPP, tetapi tidak dilayani/ditolak penyedia (pihak pabrikan); anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan mengalami penurunan, sehingga kekurangan anggaran disediakan oleh puskesmas

melalui Anggaran Kapitasi JKN Puskesmas; belum siapnya SDM puskesmas dalam melakukan proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

Kasus gizi buruk dan gizi kurang masih terjadi di Kabupaten Tegal. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal antara lain memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada balita gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang, pemberian MPASI pada balita dari keluarga miskin, dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK). Pelayanan kesehatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian vitamin A dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita di posyandu dan puskesmas. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pada kegiatan pemberian MPASI. Hal ini menyebabkan MPASI hanya diberikan pada balita gizi kurang dari keluarga miskin. Balita gizi kurang dari keluarga mampu diberi penyuluhan terkait pemenuhan gizi seimbang bagi balita gizi kurang.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari 13 indikator dan ada 2 indikator yang belum mencapai target yaitu : Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV dan Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB.

Kendala yang dihadapi pada program HIV/AIDS antara lain banyak ODHA yang tidak siap untuk pengobatan ARV, Pendampingan ol LSM belum optimal, kesadaran ODHA untuk akses ARV rendah. Sementara kendala yang dihadapi dalam penanganan Tuberkulosis antara lain:

- a. Jejaring pelayanan TB (dokter praktik mandiri dan klinik praktik swasta) belum berjalan optimal
- b. Penanganan kasus TB di luar wilayah, laporannya tidak masuk ke Dinas Kesehatan Kab. Tegal. Misal penduduk kab. Tegal yang mendapat pelayanan TB di RSUD Kardinah Kota Tegal
- c. Peran serta masyarakat dalam deteksi dini TB belum optimal
- d. Kesadaran masyarakat dalam pencarian pengobatan TB terstandar belum optimal
- e. CDR yang dilaporkan hanya kasus TB dg hasil pemeriksaan bakteriologis BTA pos.

Indikator Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Antara lain Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, dan Cakupan pelayanan anak balita. Semua indikator tersebut sudah memenuhi target tahun 2018. Permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan Angka Kematian bayi dan Balita adalah kualitas tatalaksana neonatus yang perlu ditingkatkan; masih ada nakes belum mengetahui kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan); penyebab kematian bayi masih dominan karena BBLR (berat bayi lahir rendah) berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil; penyebab tidak langsung adalah pendidikan ibu yang masih rendah.

Angka kematian ibu tahun 2018 sebesar 48,2 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini melebihi target tahun 2018, yaitu 103,3 per 100.000 kelahiran hidup. Indikator lain seperti Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan, Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan Pelayanan Ibu Nifas, dan Cakupan Ibu Hamil K4 juga sudah mencapai target tahun 2018.

Penyediaan rumah tunggu kelahiran untuk mendekati ibu hamil risiko tinggi dengan fasilitas kesehatan menjadi penyebab penurunan angka kematian ibu. Pemerintah baik pusat, provinsi, maupun daerah juga meningkatkan pemantauan ibu hamil, baik berisiko maupun tidak berisiko melalui aplikasi 5 NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Dinas Kesehatan juga menambah jumlah puskesmas PONEB dan puskesmas mampu persalinan, terutama di puskesmas yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan puskesmas dengan geografis yang sulit.

Kendala yang dihadapi pada program ini antara lain masih adanya masyarakat yang enggan melahirkan pada tenaga kesehatan seperti bidan. Mereka lebih memilih dukun bayi. Dinas Kesehatan sudah mulai memberi pendampingan pada dukun bayi dalam membantu persalinan. Tingginya mobilitas penduduk menjadi kendala dalam cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan kehamilan K4.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Infrastruktur Jaringan Drainase, dan Pembangunan Infrastruktur Bangunan Sumberdaya Air (SDA).

a. Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis yang terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km kilometer dan jalan desa sepanjang 691,28 km.. Sedangkan untuk Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 kilometer, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 kilometer, serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Secara kewilayahan regional Bregasmalang di bagian Utara terlitasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlitasi oleh Jalan Kolektor Primer (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah tengah Randudongkal (Pemalang), Jatinegara – Slawi - Dukuhwaru (Kab Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kab Brebes).

Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2014-2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	367,84	43,41	302,68	35,72	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42
2.	Rusak Ringan	104,06	12,28	120,56	14,23	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00
3.	Rusak Sedang	163,2	19,26	177,37	20,93	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
4.	Rusak Berat	212,17	25,04	246,66	29,11	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78
	Total	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,3	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 116,8 km atau sekitar 13,78%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruk jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartkan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik, secara dimensi dan kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase Kabupaten sepanjang 477,46 km saat ini baru terbangun sekitar 53,28%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 34 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun (km)				
		2014	2015	2016	2017	2018
a	Jalan Kab	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
b	Jalan yg harus berdrainase	477,46	477,46	477,46	477,46	477,46
c	Jalan yg tidak harus berdrainase	169,45	169,45	169,45	169,45	169,45
d	Jalan yg berdrainase	200,36	211,17	221,98	232,79	254,41
e	% Jalan berdrainase (d/b)	41,96	44,23	46,49	48,76	53,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

b. Infrastruktur Jembatan

Data Infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2014 berjumlah 436 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2018 berjumlah 444 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terkahir terdapat pembangunan jembatan baru dan updating data jembatan.

Tabel 2. 35 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2014-2018

No	Kondisi Jalan	Jumlah Jembatan Per Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1.	Baik	234	53,67	250	57,34	266	61,01	282	64,7	298	67,12
2.	Rusak Ringan	20	4,587	26	5,96	50	11,47	69	15,8	93	20,95
3.	Rusak Sedang	45	10,32	50	11,47	52	11,93	57	13,1	30	6,76
4.	Rusak Berat	137	31,42	110	25,23	68	15,6	28	6,42	23	5,18
	Total	436	100	436	100	436	100	436	100	444	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik dimana jembatan yang baik sebanyak 298 unit (67,12%), sedangkan yang masih dalam kondisi rusak berat dan sedang adalah 53 unit (11,94%). Sebagaimana infrastruktur Jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana ke depan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya.

c. Infrastruktur Bangunan Sumberdaya Air (SDA)

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m³ dan dapat mengaliri lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan Jumlah Embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal

Tabel 2. 36 Jumlah dan Luas Embung

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m ²)
1	Adiwerna	6	39.306
2	Dukuhturi	2	9.778
3	Dukuhwaru	12	77.878
4	Kedungbanteng	1	15.535
5	Kramat	16	85.748
6	Lebaksiu	17	82.241
7	Lebaksiu	8	25.917
8	Pangkajene	9	31.790
9	Slawi	11	50.918
10	Talang	3	18.557
11	Tarub	18	86.662
	Total	103	524.330

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar

merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan ssemi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Lahan sawah di Kabupaten Tegal sekitar 40.133 Ha. Untuk komoditas padi pada Tahun 2017 luas tanam mencapai 61.995 Ha dan luas panen mencapai 65.660 Ha, sedangkan untuk jumlah produksinya mencapai 373.524 Ton, dengan produktivitas 5,69 Ton / Ha. Dilihat dari distribusi per kecamatan, kecamatan Warureja menjadi penyumbang lahan tanam padi tersebar di Kabupaten Tegal yaitu sekitar 7.102 Ha.

Berdasarkan jenis pengairan di Kabupaten Tegal, sebagian besar sawah tersebut merupakan sawah irigasi teknis yaitu sekitar 32.600 Ha. Berdasarkan kewenangan irigasi, Daerah irigasi untuk lahan pertanian di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 yaitu DI yaitu:

Tabel 2. 37 Panjang Irigasi Kabupaten Tahun 2014-2018

Kewenangan	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
Kabupaten	234	291.72	15.497
Provinsi	8	69.187	5.225
Pusat	5	256.883	24.203
Total	247	597.882	44.925

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumberdaya air di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2. 38 Panjang Irigasi Kabupaten Tahun 2014-2018

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Irigasi Per Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	128	43,88	137	46,96	146	50,05	155	53,1	164,5	56,39
2.	Rusak Ringan	43	14,74	46	15,77	49	16,8	52	17,8	67,2	22,97
3.	Rusak Sedang	25,8	8,844	25,88	8,87	23,74	8,138	21,69	7,44	44,85	15,37
4.	Rusak Berat	94,92	32,54	82,84	28,40	72,98	25,02	63,03	21,6	15,43	5,26
	Total	291,72	100	291,72	100	291,72	100	291,72	100	291,7	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Berdasarkan Kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 234 DI dengan luas 15.497 hektare.

Kebutuhan air Daerah irigasi Kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 291,7 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap 231,7 km (79,36%). Sedangkan yang mengalami kerusakan 60,28 km (20,63%). Sedangkan kondisi cakupan daerah irigasi kewenangan kabupaten tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 39 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2014-2018

kondisi DI	Kondisi Daerah Irigasi Per Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Daerah Irigasi (Ha)	15.497	15.497	15.497	15.497	15.497
Luas Daerah Irigasi Baik (Ha)	9.084	9.721	10.360	10.987	12.298
% luas DI Baik	58,62	62,73	66,85	70,90	79,36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018

Peningkatan kondisi daerah irigasi kabupaten, dikarena alokasi anggaran yang stabil untuk perbaikan infrastruktur irigasi baik saluran, bangunan bendung, Selain itu secara lokasi sebagian besar Daerah Irigasi Kabupaten berada di daerah atas yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, Margasari dan Bumijawa, dan bangunan Irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan air di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 114.681.200 m³/tahun dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 120.310.960 m³/tahun.

2) Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

a. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 40 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2014-2018

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Sampai 2018
1	RTR Wilayah (RTRW)	1						1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)							
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	4	4	5	5	0-	18
	Perda RDTR	18	0	0	0	0	0	0

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Sampai 2018
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	3	0	0	0	0	3

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2018

Dari data di atas, sampai dengan saat baru hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Perda 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Sedangkan dokumen RTR detail baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena harus mengacu dan menunggu pada RTRW yang saat sedang dalam proses legalisasi Perda Revisi RTRW.

b. Pemanfaatan Ruang

Terbitnya Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 bertujuan sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdayaguna serasi selaras seimbang dan berkelanjutan, serta mampu mensejahterakan masyarakat. Sehingga walaupun dalam skala makro RTRW ini dijadikan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khusus di Pemerintah Kabupaten indikator yang digunakan adalah pemanfaatan ruang dalam rencana pola ruang LP2B, agar tidak digunakan untuk budidaya non pertanian.

Tabel 2. 41 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tahun 2014-2018

Uraian	2016	s/d 2018
Kawasan LP2B	35.976	35.976
Eksiting Sawah	31.193	31.193
kesalahan Rencana Pola	4.301	4.301
Pemanfaatan tidak sesuai	482	482
% Ketaatan	98,66	98,66

Sumber : Dokumen Penijauan Kembali, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam rencana pola ruang yang ditetapkan menjadi kawasan LP2B, dimana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan terbangun baik permukiman maupun industri bukan lahan sawah basah. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW adalah 1,34% , dengan kata lain ketaatan terhadap RTRW sebesar 98,66%.




3) Hasil evaluasi RPKD sampai dengan tahun 2020

Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 13 program dan 22 indikator. Urusan Pekerjaan Umum diampu oleh DPU. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2018.

Tabel 2. 42 Evaluasi Kinerja Program RPKD Tahun 2018 Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
	1 Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga	68	67,00	62,42	93,16	DPU	★
	2 Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m	147,7	145,7	71,71	49,22	DPU	↓
	3 Jumlah panjang jalan lebar 9 m	71,5	71,5 km	15,58	21,79	DPU	↓
	4 Jumlah panjang jalan kolektor	194	194	194	100,00	DPU	★
2	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
	1 Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik	45	44,00	57,85	131,48	DPU	★
	2 Persentase drainase jalan desa berfungsi baik	50	49,00	50,00	102,04	DPU	★
3	Program Pembangunan turap/talud/bronjong						
	1 Panjang talud jalan kabupaten terbangun	20.500	17.000	41.458	243,87	DPU	★
	2 Panjang talud jalan desa terbangun	17.00	15.000	17.000	113,33	DPU	★
	3 Panjang talud pengairan yang terbangun	650	500,00	845,00	169,00	DPU	★
	4 Panjang talud pengairan yang direhabilitasi	630	455,00	837,00	183,96	DPU	★
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan						
	1 Panjang jalan direhabilitasi	220	200,00	228,38	114,19	DPU	★
	2 Jumlah jembatan direhabilitasi	210	175 bh	55,00	31,43	DPU	↓
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong						
	1 Persentase panjang talud direhabilitasi	15,00	14,00	7,50	53,57	DPU	↓
6	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan						
	1 Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif	1	1	1	100	DPU	★
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja
	1 jumlah inspeksi jalan dan jembatan	300	250,00	453,00	181,20	DPU	★
8	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya						
	1 panjang irigasi dalam kondisi baik	7500	6.250 m'	164.500	2.632,00	DPU	★
9	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya						
	1 Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik	40	35,00	56,39	161,11	DPU	★
10	Program pengendalian banjir						
	1 Persentase kawasan rawan banjir	4,7	4,60	4,26	92,60	Dinas Perkimtaru	★
11	Program Perencanaan Tata Ruang						
	1 Jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang	18	18,00	18,00	100,00	Bappeda & Litbang	★
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
	1 Jumlah Penindakan Pelanggaran tata ruang	10	8,00	11,00	137,50	Bappeda & Litbang	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DPU, 2019.

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2014-2019 dari sebanyak 22 target indikator kinerja status capaian kinerja yang sangat tinggi sebanyak 18 indikator dan rendah sebanyak 4 indikator.

Capaian indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten sesuai standar Bina Marga pada Program pembangunan jalan dan jembatan ditargetkan sepanjang 67%, pada tahun 2018 dapat direalisasikan 62,42 Km. Sementara pada Program pembangunan turap/talud/bronjong, panjang talud jalan kabupaten terbangun telah terealisasi sepanjang 41.548 m, dari target 17.500 m. Indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum masih memuat indikator-indikator yang menjadi kewenangan desa (jalan, talud) maupun provinsi (sungai, danau). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya cenderung minimal, terutama indikator yang memuat nomenklatur desa seperti drainase, dan talud jalan desa.

Pada Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, realisasi pada tahun 2018 mendapat kriteria *Sangat Tinggi* (tercapai 114,18%). Dari target 200 Km jalan direhabilitasi sudah terealisasi 228,38 Km.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan. Data layanan air minum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 43 Data Layanan Air Minum Tahun 2014-2018

Uraian	Capaian Layanan Air Minum				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Total (jiwa)	1.415.009	1.420.106	1.424.891	1.429.386	1.429.386
Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa)	664.694	664.694	664.694	664.694	664.694
Jumlah Penduduk Perdesaan Teknis PAMSIMAS (jiwa)	404.540	404.540	404.540	404.540	404.540
Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%)	46,97	46,81	46,65	46,50	46,50
Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%)	28,59	28,49	28,39	28,30	28,30
Layanan PDAM (SR)	25.037	30.809	36.363	40.521	42.742
Layanan PDAM (Jiwa)	162.559	200.035	236.096	263.093	277.513
Layanan Pamsimas (Jiwa)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Non Perpipaan (Sumur dan Mata Air)	N/A	64,69	N/A	N/A	66,82
Capaian Air Minum PDAM (%)	11,49	14,09	16,57	18,41	19,41
Capaian Air Minum Pamsimas (%)	-	-	-	-	-
Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%)	N/A	78,75	N/A	N/A	86,23

Sumber : Hasil Analisa berbagai sumber, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Secara teknis jangkauan jaringan air minum perpipaan PDAM seharusnya dapat mencapai 46,5% wilayah Kabupaten Tegal. Capaian layanan PDAM meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dari 11,49% menjadi 19,49%. Namun saat ini tidak bisa meningkatkan layanannya lagi karena kondisi ketersediaan sumber air terbatas. Untuk Layanan Pamsimas seharusnya dapat memenuhi 28,30%, namun saat ini baru dapat melayani wilayah di Kabupaten Tegal sebesar 19,49%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan yang

significant layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dari 78,75% menjadi 86,23%.

2) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

Tabel 2. 44 Rumah Berjamban Tahun 2015 - 2018

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)		KK yg belum berjamban	
			2015	2018	Unit	%
1	BOJONG	36.354	65	98,8	436	1,2
2	DUKUHTURI	27.905	71,9	98,2	502	1,8
3	SLAWI	20.108	96,3	98	402	2,0
4	DUKUHWARU	18.615	85,4	97,3	503	2,7
5	KRAMAT	30.434	66,8	96,7	1.004	3,3
6	MARGASARI	28.318	42,9	95,5	1.274	4,5
7	BUMIJAWA	22.912	70,3	93,7	1.443	6,3
8	JATINEGARA	16.835	45,3	92,7	1.229	7,3
9	LEBAKSIU	27.427	51,5	87,1	3.538	12,9
10	SURADADI	23.277	61,5	87	3.026	13,0
11	BALAPULANG	23.620	56,2	86,8	3.118	13,2
12	TALANG	28.025	54,6	85,8	3.980	14,2
13	ADIWERNA	34.090	33,8	83,6	5.591	16,4
14	WARUREJA	16.841	33,2	82,8	2.897	17,2
15	PANGKAH	29.141	49,7	81,5	5.391	18,5
16	TARUB	20.994	48,2	81,5	3.884	18,5
17	KEDUNG BANTENG	14.911	42,2	79	3.131	21,0
18	PAGERBARANG	17.390	46,8	73,4	4.626	26,6
	Total	437.197	55,8	88,7	45.975	10,5

Sumber : Hasil Olah Data Sanitarian, 2018

Dari data tabel di atas diketahui bahwa dalam rentang waktu 3 tahun (2015 – 2018) Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur jamban sehat dari 55,8 % menjadi 88,7%. Namun demikian masih ada desa yang masih dibawah 80% dalam capaian infrastruktur sanitasi (jamban) yaitu Kecamatan Kedungbanteng dan pagerbarang.

3) Kawasan Kumuh

Luas dan sebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 484 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal, berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pengurangan lahan kumuh tersebut, luas dan sebaran pengurangan Kawasan kumuh di Kabupaten Tegal tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 45 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Luas	Luas Pengurangan (Ha)	Kondis
----	-----------	------	-----------------------	--------

		sesuai SK 239/2016	2014	2015	2016	2017	2018	i Sampai 2018
1	Adiwerna	166,5	N/A	N/A	N/A	N/A	97,74	68,76
2	Dukuhturi	53,2	N/A	N/A	N/A	N/A	1,32	51,88
3	Jatinegara	18,4	N/A	N/A	N/A	N/A	0	18,4
4	Kedungbanteng	30,4	N/A	N/A	N/A	N/A	0	30,4
5	Kramat	18,5	N/A	N/A	N/A	N/A	6,72	11,78
6	Lebaskiu	68,9	N/A	N/A	N/A	N/A	0	68,9
7	Slawi	28,5	N/A	N/A	N/A	N/A	4,2	24,3
8	Suradadi	48,6	N/A	N/A	N/A	N/A	0	48,6
9	Talang	32,5	N/A	N/A	N/A	N/A	2,2	30,3
10	Tarub	9,88	N/A	N/A	N/A	N/A	0	9,88
11	Warureja	12,4	N/A	N/A	N/A	N/A	0	12,4
	Total	487,78	N/A	N/A	N/A	N/A	112,18	375,6
							23%	77%

Sumber : Program Kotaku, 2018

Dari data di atas terdapat 2 desa lokasi kumuh yang telah menjadi target nasional yaitu Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul seluas 50 Ha, upaya pengurangan kawasan kumuh telah dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Dari luasan kawasan kumuh 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh seluas 112,18 Ha (23%), sehingga sampai dengan akhir Tahun 2018 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 375,6 Ha

4) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebesar 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

- Prioritas Utama adalah Kelompok Rumah Tangga yang mempunyai tingkat keparahan (7 Indikator) tidak layak sebanyak : 1.331 KRT
- Prioritas 1, 10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT;
- Prioritas 2, 10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT;

Tabel 2. 46 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014-2018

Uraian	Jumlah RTLH Kumulatif setiap Tahun (KRT)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Kumulatif Realisasi RTLH	863	2.461	2.942	3.829	5.198
% Capaian RTLH	2,02	5,77	6,89	8,97	12,18

Sumber : Olah data SIMAS, 2018

Untuk prioritas utama RTLH di Kabupaten telah ditangani secara tuntas pada Tahun 2015, sedangkan 2016 – 2018 sasaran RTLH adalah KRT yang berada pada prioritas I yaitu 10 persen kelompok termiskin dari PBDT. Besaran Anggaran alokasi RTLH Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sebesar Rp. 20 Juta per KRT.

Angka ini lebih tinggi dari alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp 15 Juta dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 10 Juta.

5) Hasil evaluasi RKPD sampai dengan tahun 2018

Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 5 program dan 11 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat yang diampu oleh Bapermasdes, Satpol PP dan Dinsosnakertrans pada tahun 2018.

Tabel 2. 47 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja
1	Program Pengembangan Perumahan						
1	Persentase rumah layak huni	91,35	91,22	87,74	96,32	Dinas Perkimtaru	★
2	Jumlah rumah tidak layak huni direhabilitasi	600,00	600,00	704,00	117,33	Dinas Perkimtaru	★
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan						
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	82,25	80,25	86,23	107,45	Dinas Perkimtaru	★
2	Jumlah paket pelatihan BP-SPAM	1,00	1,00	1,00	100,00	Dinas Perkimtaru	★
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						
1	Jumlah kegiatan pemukiman berbasis masyarakat	15,00	13,00	15,00	115,38	Dinas Perkimtaru	★
2	jumlah kelompok pelestarian lingkungan perumahan	15,00	13,00	15,00	115,38	Dinas Perkimtaru	★
4	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						
1	Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk	0,00	0,000028	0,000039	141,53	Satpol PP	★
2	Jumlah mobil damkar	7,00	7 unit	6,00	85,71	Satpol PP	➡
3	Persentase kasus kebakaran ditangani	100,00	90,00	100,00	111,11	Satpol PP	★
4	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	42,76	42,74	42,75	100,02	Dinas Perkimtaru	★
5	Program pengelolaan areal pemakaman						
1	Jumlah areal pemakaman	282,00	282,00	432,00	153,19	Dinsos	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperkimtaru; Satpol PP ; Dinsos, 2019.

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2014-2019 dari sebanyak 11 target indikator kinerja status capaian kinerja yang sangat tinggi sebanyak 10 indikator dan sedang sebanyak 1 indikator.

Mendasari data PPLS Tahun 2011 dari 7 indikator, maka target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tegal yang menjadi skala prioritas sejumlah 1.331 rumah/unit , sedangkan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan sebanyak 704 unit/rumah dengan masing-masing rumah mendapat Rp.20.000.000,- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2018 Pemerintah Desa lebih fokus pada program DD dan ADD akhirnya pencairan dana bantuan oleh masing-masing desa pada akhir tahun dan pelaksanaan fisiknya juga akhir tahun.

Indikator Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi dari target 600 rumah, terealisasi 704 rumah dengan kriteria capaian kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 117,33%).

Capaian kinerja Program lingkungan sehat perumahan, yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih mendapat kriteria Sangat Tinggi. RPJMD menargetkan pada tahun 2018 sebesar 80,25% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, terealisasi sebesar 86,23% dengan predikat *Sangat Tinggi* (tercapai 107,45%).

Capaian kinerja Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terlihat bahwa persentase kasus kebakaran yang ditangani mencapai 100% dari target 90% kejadian kebakaran. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah sarana pemadam kebakaran dan jumlah tenaga pemadam kebakaran yang memadai. Meskipun mobil pemadam kebakaran pada tahun 2018 mengalami kecelakaan yang berakibat tidak bisa beroperasi lagi dalam proses pemadaman. Guna menunjang kinerja program ini Pemerintah Kabupaten Tegal akan menambah armada dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah agar jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2014-2018 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2. 48 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penegakan Perda					

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	528	637	293	503	108
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	451	510	192	371	82
	c. Penyelesaian Penegakan Perda	85,41	80,06	65,53	73,76	76
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	294	204	597	1.756	1673
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	254	233	180	1.688	1603
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	75,15	79,25	88,23	96,13	96

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2018

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2014 dibanding tahun 2015 mengalami penurunan, sehingga perlu ada penanganan yang lebih instensif. Untuk tahun 2016 dibandingkan sampai tahun 2018 mengalami kenaikan, sehingga perlu kerjasama yang baik agar penegakan Perda semakin naik dari tahun ke tahun. Penegakan K3 dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga perlu ditingkatkan lagi namun untuk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,13.

2) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2014 hanya 29 % sedangkan tahun 2018 sebesar 70% .

Tabel 2. 49 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	322	404	444	630	767
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
3.	patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	29	37	41	58	70

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2018

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga untuk periode yang akan datang agar bisa meningkat.

3) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2018 rasio tersebut mencapai 1 : 06. Hal ini berarti bahwa untuk setiap RT di Kabupaten Tegal tersedia jumlah Linmas sebanyak 1 orang lebih. Rasio ini lebih besar bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri nomor : 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 480 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 7.295 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebesar 1:15. Jumlah penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal pada tahun 2014 mencapai 58 kebakaran, kebakaran yang tertangani 100%. Pada tahun 2018 terjadi kebakaran sebanyak 153 kejadian kebakaran jumlah ini lebih banyak dari tahun 2017 yaitu 99 kejadian kebakaran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu ada 9 WMK, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos WMK 1 mobil Damar) mobil yang dimiliki sekarang berjumlah 7 unit (2 rusa berat, 5 layak pakai) sehingga masih kurang 4 unit mobil Damkar. Juga perlu ada penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos WMK membutuhkan 18 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 50 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.206	7.234	7.295
2.	Jumlah RT	6.860	6.860	6.875	6.899	6.899
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,05	1:1,05	1:1,05	1:1,05	1:1,06

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2018

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan

Tabel 2. 51 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.206	7.234	7.295
2.	Jumlah Terlatih	90	180	240	320	480
3.	Rasio jumlah Linmas	1:80	1:40	1:30	1:22	1:15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2018

Rasio jumlah Linmas terlatih dari tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, sehingga ada upaya agar jumlah linmas meningkat ditahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 52 kasus kebakaran tertangani Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Jumlah Kasus Kebakaran				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kebakaran	58	60	78	99	153
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	30	32	42	56	88
3.	kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	52	53	54	57	58

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2018

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini merupakan usaha yang harus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin.

4) Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Jumlah LSM di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 sebanyak 72, Tahun 2015 menjadi 73, kemudian pada Tahun 2016 dan 2017 sebanyak 75 selanjutnya pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 79 LSM. Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Kesbangpolinmas setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu. untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Review Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

5) Kondisi Keamanan Ketentraman Ketertiban Masyarakat

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari Tahun 2014-2018. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/ pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argument bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi terror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks-warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menagani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 218 terdapat 92 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftarkan dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

Penggunaan hak pilih adalah pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, pengguna hak pilih Pemilu Gubernur, dan pengguna hak pilih Pemilu Bupati. Untuk pemilu Bupati angka ini tidak memenuhi target dikarenakan banyaknya warga kabuupaten tegal yang mata pencahariaanya dengan Urbanisasi ke Jakarta, Nelayan dogolan pas pada saat pemilihan suara kebetulan tidak ada didaratan posisi di tengah laut dan TKI (tenaga kerja Indonesia). Untuk Pemilu Legislatif dan Presiden tidak ada, akan ada dilaksanakan tahun 2019, Pemilu Gubernur Jawa Tengah dengan angka partisipasi 74.04%. Rata-rata pengguna hak pilih Pilkades mencapai 90% yang dilaksanakan pada tahun 2017 dari yang telah ditetapkan hal ini masih termasuk ke dalam kategori.

6) Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2014 dan 2015 nya mengalami kenaikan, tahun 2016 mengalami penurunan, tahun 2017 mengalami kenaikan, dan tahun 2018 mengalami penurunan, sehingga perlu usaha peningkatan usaha agar penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik bisa mengalami peningkatan

Tabel 2. 53 Jumlah Penanganan Bencana

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	76	72	54	65	54
Jumlah kejadian bencana	83	76	60	70	63
Kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logisti	91,57	94,74	90,00	92,86	85,71

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tegal, 2018

7) Prosedur Tanggap Darurat Bencana

Dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun untuk dua tahun 2016 dan 2017 cenderung tetap, sedangkan untuk tahun 2018 mengalami kenaikan.

Tabel 2. 54 Jumlah Peraturan Penanganan Bencana

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun	-	-	2	2	3
Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang harus disusun	10	10	10	10	10
dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun	-	-	20,00	20,00	30,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tegal, 2018

8) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Masyarakat siap siaga bencana dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif kadang naik juga kadang turun misalnya untuk dua tahun pertama mengalami kenaikan, dan tahun berikutnya mengalami penurunan, begitu juga untuk tahun berikutnya mengalami kenaikan dan pada tahun terakhir mengalami kenaikan, untuk itu perlu usaha-usaha yang keras agar masyarakat yang siap siaga bencana mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Tabel 2. 55 Jumlah Penanganan Bencana

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah masyarakat yang dibina dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	120	130	340	490	425
Jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pembinaan	14.435	10.475	35.807	36.240	22.648
masyarakat siap siaga bencana	0,83	1,24	0,95	1,35	1,88

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tegal, 2018

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 56 Kondisi Kebencanaan Tahun 2014-2018

Indikator	Kebencanaan				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Desa Tangguh Bencana	0	0	2	2	2
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyard)	4	4,1	4,5	6,5	5,7
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	1	1	1	1	1
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,27	0,21	0.15	0.2	0.3

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2019.

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun yang akan datang diharapkan desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

9) Hasil evaluasi RKPD sampai dengan 2018

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP, BPBD dan Kesbangpolinmas. Urusan ini terdiri dari 7 program dan 34 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2018.

Tabel 2. 57 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	Status Kinerja
1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	Status Kinerja
01	Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam)	60	48	48	100	★
2	Program pengembangan wawasan kebangsaan					
01	Jumlah dialog umat beragama	1	1	16	1600	★
02	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	1	1	1	100	★
3	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					
01	Jumlah dialog wawasan kebangsaan	1	1	1	100	★
02	Jumlah kerjasama umat beragama	1	1	1	100	★
4	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					
01	Cakupan siskamling dengan jumlah desa	75	70	71	101,43	★
5	Program pendidikan politik masyarakat					
01	Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas	100	100	100	100	➡
02	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif	70	62,06	-	-	Tidak Pileg
03	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden	70	62,88	-	-	Tidak Pilpres
04	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur	70	70,00	70,04	100,06	★
05	Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati	70	70,00	65,59	93,70	★
06	Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades	90	90,00	80,00	88,89	➡
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
01	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1:59,37	1:59,38	1:59,38	100	★
02	Rasio Linmas terlatih	5	4	4	100	★
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					
01	Jumlah Kegiatan mitigasi bencana	1	1	2	200	★
02	Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana	8	8	8	100	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Kesbangpolinmas; BPBD, 2019.

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2014-2019 dari sebanyak 34 target indikator kinerja status capaian kinerja yang sangat tinggi sebanyak 32 indikator dan sedang sebanyak 2 indikator.

Capaian kinerja outcome pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan dengan indicator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam) tercapai 100% (sangat tinggi). Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Capaian kinerja outcome program Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indicator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 16 kali dialog yang terdiri dari 12 kali dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan 4 kali dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal yang tahun 2018 dilaksanakan di 4 kecamatan yakni Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Dukuhwaru. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/ pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Capaian kinerja outcome program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali di Kecamatan Talang. Kecamatan Talang dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argument bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi terror. Dan tahun sebelumnya juga telah dipulangkan eks-warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang.

Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menagani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal

Capaian program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indicator kinerja outcome yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Capaian kinerja outcome program pendidikan politik masyarakat dengan indicator outcome pertama yaitu Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat 78 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

Indikator outcome persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif, Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden, tidak terisi karena pada tahun

2018 tidak ada Pemilihan Umum dimaksud. Pemilu Legislatif dan Presiden, terakhir dilaksanakan tahun 2014, Pemilu Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Tegal dilaksanakan tahun 2018 dengan realisasi capaian indikator untuk rata-rata persentase penggunaan hak pilih dalam pilgub sebesar 70,04% atau tercapai 100,06% sedangkan untuk pilbup partisipasi masyarakat dalam baru mencapai 65,59% dari target 70%. Sedangkan Indikator outcome Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades mencapai 80 % dari target 90% atau tingkat capaiannya 88,89%.

Sedangkan untuk Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan kegawatdaruratan sebanyak 8 kegiatan. Capaian ini telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

F. Sosial

1) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah untuk meningkatkan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak, usia lanjut, disabilitas dan tuna sosial. Hasil dari upaya penanganan tersebut dapat dilihat dalam data Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi Penurunan jumlah PMKS dan terwujudnya keberfungsian sosial Penyandang PMKS.

Tabel 2. 58 Layanan PMKS Kabupaten Tegal

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Rehabilitasi Sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial	1.857	1.875	1.875	1.925	1.925
2.	Jumlah Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial yang seharusnya direhabilitasi Sosial	1.895	1.982	1.982	2.000	2.000
3.	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial	97,99	94,60	94,60	96,25	96,25

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2018

Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial masih perlu ditingkatkan terhadap jumlah Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial yang seharusnya direhabilitasi Sosial karena semakin meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak, Usia Lanjut, Disabilitas dan Tuna Sosial yang semakin meningkat yang seharusnya direhabilitasi Sosial

2) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah untuk dapat meningkatkan PSKS yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai Mitra dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di masyarakat. Hasil dari upaya tersebut dapat dilihat dalam data Pemberdayaan Sosial mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan

dapat meningkatkan kapasitas PSKS.

Tabel 2. 59 Data Layanan PSKA Kabupaten Tegal

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial.	1.920	1.950	2.025	2.025	1.925
2.	Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang seharusnya diberdayakan	2.010	2.015	2.050	2.050	2.145
3.	Cakupan Pemberdayaan Sosial	95,52	96,77	98,78	98,78	89,74

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2018

Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang seharusnya diberdayakan semakin meningkat sehingga cakupan Pemberdayaan Sosial dari Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial yang diberdayakan masih harus ditingkatkan.

Pemberdayaan disabilitas dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai upaya memberikan layanan pembangunan kepada difabel. Keberadaan difabel difasilitasi melalui Loka Bina Karya (LBK) yang diampu Dinas Sosial dan kelompok Disabel Slawi Mandiri (DSM) dan Forum Peduli Disabel (FPD) Kab. Tegal. Berikut data penyandang disabilitas miskin.

Tabel 2. 60 Pemberdayaan Disabilitas 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	penyandang disabilitas miskin yang mendapat pemberdayaan	3,11	3.2	3.46	5.2	6.5

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2018

Upaya pemberdayaan difabel dilakukan melalui strategi Aksi Bersama Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Melalui aksi bersama ini, Pemkab dan Pemdes berkomitmen menangani isu kemiskinan melalui penanganan anak putus sekolah, RTLH, jamban sehat dan pemberdayaan difabel. Dari upaya ini, penyandang disabilitas miskin yang mendapat pemberdayaan meningkat setiap tahunnya.

3) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat yang beresiko sosial dan masyarakat yang terkena bencana. Hasil dari Upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tersaji dalam tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi Peningkatan.

Tabel 2. 61 Layanan Perlindungan Sosial

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
----	--------	------	------	------	------	------

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan dan Kelompok Beresiko Sosial	63.316	63.375	63.450	63.825	63.824
2.	Jumlah Penanganan Bencana dan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	63.575	63.678	63.725	63.845	63.850
3.	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,59	99,52	99,57	99,97	99,96

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2018

Potensi Bencana dan jumlah Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial semakin meningkat sehingga Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Penanganan Bencana dan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial harus semakin ditingkatkan. Untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesehatan, warga Kabupaten Tegal difasilitasi mendapat jaminan sosial dan kesehatan sebagaimana dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 62 Jaminan Perlindungan Sosial dan Kesehatan 2014 -2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (%)	59	60	63	67	71
2.	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan (%)	89,02	90.01	90.04	90.05	90.8

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2019.

Data penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan kesehatan mendasari pada upaya Universal Health Coverage (UHC). Dari data penduduk miskin yang ter-cover dalam PBDT dan memperoleh jaminan kesehatan hingga tahun 2018 tinggal sedikit yang belum memperoleh jaminan kesehatan.

4) Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin dilakukan melalui pendataan sosial terhadap kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Dengan adanya pendataan tersebut maka jumlah kelompok masyarakat fakir miskin yang ditangani semakin meningkat. Hasil dari data Kemiskinan yang terverifikasi dan penanganan fakir miskin mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2. 63 Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	589.748	612.423	623.456	688.943	697.893
2.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang seharusnya ditangani	674.816	684.497	698.425	714.497	722.124

3.	Cakupan Penanganan Fakir Miskin	87,39	89,47	89,26	96,42	96,64
----	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2018

Kebutuhanpendataan sosial dan penanganan fakir miskin yang seharusnya ditanganisemakin meningkat dari jumlah pendataan sosial dan penanganan fakir miskin yang tertangani sehingga penanganan terhadap kelompok masyarakat fakir miskin harus terus ditingkatkan.

5) Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Tahun 2018

Urusan Sosial diampu oleh Dinsosnakertrans. Urusan Sosial terdiri dari 7 program dan 22 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Sosial tahun 2018.

Tabel 2. 64 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						
1	Persentase korban bencana yang ditangani	100,00	100	100	100	Dinsos	★
2	Persentase PMKS ditangani	30	30	30	100	Dinsos	★
3	Jumlah perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	350	300	347	115,67	Dinsos	★
4	Persentase perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	8,20	7,5	7,5	100	Dinsos	★
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
1	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	30	30	30	100	Dinsos	★
3	Program pembinaan anak terlantar						
1	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	450	350	350	100%	Dinsos	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018	
	2	Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	16,00	13,80	13,80	100	Dinsos	★
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma							
	1	Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	350	300	563	187,67	Dinsos	★
	2	Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	7,20	6,5	6,5	100	Dinsos	★
5	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo							
	1	Jumlah panti asuhan/panti jompo	24	24,00	24	100	Dinsos	★
	2	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	24	24,00	24	100	Dinsos	★
6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)							
	1	Jumlah lansia terlantar yang direhabilitasi	70	60	60	100	Dinsos	★
	2	Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi	12,20	11,5	11,5	100	Dinsos	★
	3	Jumlah pengidap narkoba yang direhabilitasi	50	45	52	115,56	Dinsos	★
	4	Persentase pengidap narkoba yang direhabilitasi	14,50	13,2	15,21	115,23	Dinsos	★
	5	Jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi	170	140	157	112,14	Dinsos	★
	6	Persentase pengidap PMS yang direhabilitasi	7,20	6,5	6,5	100	Dinsos	★
	7	Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhababsos	50	40	40	100	Dinsos	★
	8	Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhababsos	8,20	7,5	7,5	100	Dinsos	★
	9	Jumlah eks WTS yang diberdayakan	500	45	423	940	Dinsos	★
	10	Persentase eks WTS yang diberdayakan	9,80	8,6	80,84	940	Dinsos	★
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
	1	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	300	275,00	275	100	Dinsos	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinsos, 2019.

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2014-2019 dari sebanyak 22 target indikator kinerja status capaian kinerja yang sangat tinggi sebanyak 21 indikator dan sedang sebanyak 1 indikator.

Capaian kinerja **Persentase korban bencana yang ditangani** 100 % telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019, hal ini disebabkan karena adanya dukungan dan koordinasi yang baik antara BPBD Kab. Tegal, PMI dan unsur terkait serta kesiapsiagaan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi terjadinya bencana, adanya jalur evakuasi yang jelas dan sistem peringatan dini dalam masyarakat sehingga terdapat 43 kejadian bencana dengan jumlah korban 7.026 jiwa dapat ditangani 100 %.

Capaian kinerja Persentase PMKS yang ditangani terealisasi 30 %, pada tahun 2018 sampai bulan Desember dari target kinerja 30 % yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019.

Capaian kinerja Persentase PMKS yang direhabilitasi sosial terealisasi 100% dari target 30 % terealisasi 30%. Meskipun tercapai, namun persentase PMKS yang direhabilitasi masih 30%, hal ini dikarenakan jumlah PMKS yang direhabilitasi terbatas hanya pada PMKS yang dikirim ke Balai – balai besar sosial dan kebanyakan setelah dijaring untuk dikirim ternyata dari pihak keluarga berkeberatan.

Capaian kinerja Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial dari target 13,8% terealisasi sebesar 13,8%, dari jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pekerja anak yang direhabilitasi sosial.

Capaian kinerja Persentase penyandang cacat (Difabel) yang direhabilitasi sosial dari target 6,5% terealisasi sebesar 6,5% atau sebanyak 563 penyandang cacat. Hal ini disebabkan karena dari jumlah kecacatan 8.655 orang, pada tahun 2018 sejumlah 563 orang yang baru mendapat pelayanan/direhabilitasi.

Capaian kinerja Jumlah panti asuhan / panti jompo yang dibina terealisasi sebanyak 24 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RRPD Tahun 2014 – 2019 sebanyak 24.

Capaian kinerja Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi dari target 11,5 % terealisasi 11,5% orang atau 100%. Sedangkan Capaian kinerja Persentase Eks WTS yang diberdayakan 8,6 % terealisasi 80,84 % orang atau ada sebanyak 423 orang eks WTS yang diberdayakan.

Capaian kinerja Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina tahun 2018, target sebanyak 275 PSKS (Pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, tagana, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, keluarga pioneer, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, TKSK, dunia usaha, orsos / panti asuhan dan orsos non panti asuhan), dan terealisasi 275 PSKS atau tercapai 100% karena adanya dukungan kegiatan APBD Provinsi.

2.3.2. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Perusahaan Taat Aturan Hubungan Industrial

Perusahaan yang taat pada aturan Hubungan Industrial pada kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai 13.3%.

Tabel 2. 65 Perusahaan Taat Aturan Hubungan Industrial Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Perusahaan yang taat aturan Hubungan Industrial	11.5%	11.8%	11.9%	12.8%	13.3%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018

2) Pencari Kerja yang ditempatkan

pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 sangat bervariasi. Pada Tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan, namun pada kurun waktu Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal ini karena meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja. Secara rinci pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 66 Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2014 -2018

Uraian	Jumlah pencari Kerja				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pencari Kerja yang terdaftar	10,226	9,432	11,788	16,077	15,464
Pencari Kerja yang ditempatkan	1,731	750	715	4,555	8,383
%	17%	8%	6%	28%	54%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018

3) Hasil evaluasi RKPD sampai dengan tahun 2018

Urusan Tenaga Kerja diampu oleh Disperinaker, terdiri dari 6 program dan 18 indikator. Berikut indikator, terget dan capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2018.

Tabel 2. 67 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Tenaga Kerja

NO	Urusan/ Program/Kegiatan	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian	Status Capaian
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
1	Penempatan AKAD	13.000	12.750	3.986	31,26	↓
2	Penempatan AKAN	8.300	8.005	2.133	26,65	↓
3	Penempatan AKL	300.000	250.000	2.264	0,91	↓
4	Jumlah Instruktur BLK	40	35	20	57,14	↓

NO	Urusan/ Program/Kegiatan	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian	Status Capaian
5	Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	58	52	42	80,77	
6	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	65	63	50	79,37	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.86	3.96	8,45	(- 0,51)	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	88.02	82.56	69.3	83,94	
9	Tingkat Kesempatan Kerja	96.15	95.70	92.31	96,46	
10	Jumlah LPKS	60	58	47	81,04	
11	Jumlah Bursa Kerja Khusus	52	42	40	95,24	
12	Jumlah PPTKIS	18	15	7	46,67	
13	Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS	65	60	50	83,33	
14	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	10	8	6	75	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
15	Persentasi UMR : KHL	100	100	100	100	
16	Jumlah Sengketa Industrial	8	10	14	60	
17	Jumlah Sengketa Industrial ditangani	8	10	14	140	

Sangat Tinggi Tinggi, Sedang Rendah, Sangat Rendah.
Sumber: Dinsos, 2019.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja mempunyai fungsi ganda yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara hasil pendidikan dan kebutuhan duniakerja serta untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan Kerja dapat dijadikan salah satu sarana untuk mengantisipasi perubahan global. Dinas Pelakukan Program Pengentasan kemiskinan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan kerja sehingga warga masyarakat yang mengikuti pelatihan memiliki bekal life-skill atau kecapan hidup untuk bekerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Maksud dilaksanakan kegiatan Pelatihan adalah untuk memberikan bekal kemampuan, ketrampilan dan sikap mental kerja sehingga tenaga kerja memiliki pemahaman dan keahlian tertentu dan diharapkan kepada peserta mempunyai kemandirian. Beberapa kegiatan tersebut diatas belum mampumencapai target kinerja program. Meskipun status kinerja indikator kinerja program tinggi dan sangat tinggi.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Merupakan program Pemerintah yang memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat, membuka lapangan kerja

serta memberikan informasi pasar kerja/Bursa kerja dan melakukan pendataan pencari kerja di Kabupaten Tegal. Permasalahannya Tenaga Kerja Tiap Tahun kurang berpokompetensi/Tidak punya keahlian,Lapangan kerja/kesempatan kerja yang terbatas dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap Tahunnya. Beberapa kegiatan tersebut diatas belum mampumencapai target kinerja program. Meskipun status kinerja indikator kinerja program tinggi dan sangat tinggi.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Untuk Istilah UMR menjadi UMK dengan ketetapan UU no 13 Tahun 2013, Istilah Sengketa di burah menjadi Perselisihan Hubungan Industri. Untuk Pengawasan Ketenagakerjaan yang sekarang kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 mulai awal Juni 2017. Tersesaiskannya kasus perselisihan hubungan industrial, Tersosialisasikannya berbagai peraturan ketenagakerjaan kepada perusahaan di Kabupaten Tegal yang diikuti oleh 40 peserta. Tersedianya data perusahaan sebagai sarana pembinaan hubungan industrial dan jaminan social perusahaan, Terbinanya serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Tegal, Terlatihnya perusahaan tentang sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia melalui pelatihan yang yang diikuti oleh 40 peserta. Capaian kinerja program ini dapat terealisasi 100% untuk 3 indikator.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2014-2018. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014 -2018

No.	Uraian	Kinerja Pemberdayaan Perempuan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	350	350	350	400	700
2.	Jumlah pekerja perempuan di dalam negeri (Jiwa)	5.386	5.481	5.804	6.144	6.221
3.	Jumlah pekerja perempuan di Luar negeri (Jiwa)	758	783	879	516	821
4.	Jumlah total pekerja perempuan (Jiwa)	6.144	6.264	6.683	6.630	7.042
5.	Persentase pekerja perempuan di Dalam negeri (%)	87,66	87,5	86,85	92,67	88,34
6.	Persentase pekerja perempuan di Luar negeri (%)	12,34	12,5	13,15	7,78	11,36
7.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	5.697	5.721	5.388	5.926	5.341
8.	Jumlah Pekerja Perempuan	10	10	10	10	10

No.	Uraian	Kinerja Pemberdayaan Perempuan				
		2014	2015	2016	2017	2018
	sebagai Anggota DPRD (Jiwa)					
9.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	20	20	20	20	20

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2019

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga

Tabel 2. 69 Rasio KDRT Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Kasus KDRT				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah KDRT	10	51	12	7	6
2.	Jumlah Rumah Tangga	400.269	431.974	430.290	444.490	447.591
3.	Rasio KDRT	0,002	0,0012	0,0027	0,00157	0,0013

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 70 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	61	78	126	53	66
Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan terlayani	100	100	100	100	100

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2019.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2016 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

Perempuan ASN menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 71 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	24,32	25.22	26.13	26.75	27.95

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2019.

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

2) Perlindungan Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut..

Tabel 2. 72 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	350	350	350	400	500
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	3,48	3,48	4,18	5,22	6,62
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1,33	1,33	1,33	1,39	1,39
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	0	0	2	5	5
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	0	0	50	100	100
6.	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	0	0	0	2	2

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam

memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

3) Hasil Evaluasi RPKPD sampai tahun 2018

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 4 program dan 38 indikator kinerja. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh DP3AP2KB dan Dispermasdes. Berikut disajikan tabel capaian, indikator dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2. 73 Evaluasi Kinerja Program RPKD Tahun 2018
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**




No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018	
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan							
	1	Pencapaian Kota Layak Anak	Kab Tegal KLA	KabTegal KLA	KLA Pratama	100.00	Dinas P3A & P2KB	★
	2	Jumlah kebijakan perlindungan anak	2,00	2,00	2.00	100.00	Dinas P3A & P2KB	★
	3	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	90,00	80,00	66	82,5	Dinas P3A & P2KB	★
	4	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100.00	100.00	Dinas P3A & P2KB	★
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak							
	1	Jumlah SKPD melaksanakan PPRG	54,00	54,00	54.00	100.00	Dinas P3A & P2KB	★
	2	Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender	47,00	40,00	45.00	112,50	Dinas P3A & P2KB	★
	3	Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah	50,00	50,00	48.00	96.00	Dinas P3A & P2KB	★
	4	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50,00	50,00	50.00	100.00	Dinas P3A & P2KB	★
	5	Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan	50,00	50,00	58.00	116.00	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
	keadilan gender						
6	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	100,00	100	100	100	Dinas P3A & P2KB	★
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
9	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	75,00	65,00	100,00	153,85	Dinas P3A & P2KB	★
10	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75,00	65,00	100,00	153,85	Dinas P3A & P2KB	★
11	Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	25,00	25,00	25,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
12	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	50,00	50,00	50,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
13	Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	67,00	50,00	7,67	15,33	Dinas P3A & P2KB	↓
14	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	25,00	25,00	25,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)		Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
	15	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	4,00	4,00	18,00	450,00	Dinas P3A & P2KB	★
	16	Jumlah Forum anak yang aktif	5,00	4,00	11,00	275,00	Dinas P3A & P2KB	★
	17	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	100 % (31 indikator)	100,00	72,00	72,00	Dinas P3A & P2KB	➡
	18	Jumlah desa binaan PKK	33,00	33	33	100	Dinas P3A & P2KB	★
	19	Jumlah masyarakat mitra P2MBG	60,00	60	40	66,67	Dinas P3A & P2KB	➡
	20	Jumlah Pengajar PAUD yang terlatih	18,00	18	18	100	Dinas P3A & P2KB	★
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
	1	IPG	65,72	64,72	87,52	135,23	Dinas P3A & P2KB	★
	2	IDG	70,16	70,16	68,90	98,20	Dinas P3A & P2KB	★
	3	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	57,54	54,54	42,54	78,00	Dinas P3A & P2KB	➡
	4	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	15,00	10,00	20,00	200,00	Dinas P3A & P2KB	★
	5	Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	41,17	38,17	26,17	68,56	Dinas P3A & P2KB	➡
	6	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
	7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
	dan PPT/PKT di RS						
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
9	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	75,00	100,00	133,33	Dinas P3A & P2KB	★
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80,00	80,00	100,00	125,00	Dinas P3A & P2KB	★
11	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80,00	70,00	100,00	142,85	Dinas P3A & P2KB	★
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	★

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan						
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	40,00	40,00	41	>100	BappedadanLitbang	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DP3AP2KB, Dispermasdes, Bappeda & Litbang, 2019.

Indikator pencapaian Kota Layak Anak pada tahun 2018 belum dapat direalisasikan. Kota Layak Anak diukur dari 31 indikator layak anak. Kabupaten Tegal telah mengirimkan status 31 indikator layak anak kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari rilis Kota Layak Anak yang disampaikan kementerian, Kabupaten Tegal tidak terdapat dalam daftar Kota Layak Anak. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kota Layak Anak adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan indikator-indikator Kota Layak Anak yang tersebar di sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, catatan sipil, perhubungan hingga bencana. Sehubungan dengan hal tersebut akan diinisiasi penyusunan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 sehingga pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat lebih sinergis lagi.

Jumlah pelaksanaan KLA di kecamatan yang terealisasi sebanyak 8 kecamatan dari target 3 kecamatan, atau dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 266,67%). Kecamatan yang telah diinisiasi layak anak ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas Layak Anak dan inisiasi Desa Layak Anak antara lain Kecamatan Adiwerna, Pangkah, Slawi dan Lebaksiu. Sementara jumlah forum anak yang aktif antara lain Forum Anak Kabupaten Tegal dan Forum Anak Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Sementara desa yang telah diinisiasi layak anak antara lain Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna, Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah dan Desa Yomani Kecamatan Lebaksiu.

Untuk indikator kinerja jumlah pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terealisasi 59 pengaduan dari target 60 pengaduan. Membaca indikator ini perlu cermat, bahwa tujuan indikator bukan memperbanyak atau merencanakan kasus yang lebih banyak, namun memperbanyak kasus yang dilaporkan. Saat ini KDRT seperti fenomena gunung es yang banyak tidak dilaporkan. Pelaporan KDRT menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menurunkan KDRT itu sendiri.

Secara umum, kendala dalam pelaksanaan PPT adalah belum optimalnya pemahaman Tim PPT terhadap tugas dalam menangani kekerasan perempuan dan anak; belum tercukupinya sarana mobilitas pendampingan korban; belum tersedia sarana dan prasarana yang nyaman bagi korban kekerasan; belum terdapat kelengkapan peralatan tes DNA; belum membudayanya pemahaman masyarakat tentang UU No. 23 Tahun 2004 dan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), belum terbentuk PPT Kecamatan; belum tersedia

shelter (rumah aman) bagi korban kekerasan; belum terdapat fasilitas trauma center di RS dan belum optimalnya peran rohaniawan pendamping korban karena korban lebih banyak didampingi psikolog.

Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang dari 40% target yang direncanakan dapat tercapai 41%. Hal ini karena mengundang komponen masyarakat dari unsur perempuan pada Musrenbang.

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak azazi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal

Tabel 2. 74 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	183.158	214.863	221.533	221.928	221.928
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.433.515
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama(ton)	133.574	133.156	133.155	134.588	134.588
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	137,12	161,36	166,37	164,89	164,89

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018

Berdasarkan tabel dapat dilihat pada tahun 2013 ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal belum mampu memenuhi kebutuhan penduduknya karena dari jumlah konsumsi yang mencapai 176.765 hanya tersedia pangan utama 133,695 atau hanya dapat memenuhi 75,63 persen dari total kebutuhan. Pada tahun 2014 jumlah ketersediaan pangan utama meningkat menjadi 183.158 ton dengan jumlah konsumsi menurun dari tahun sebelumnya hanya 133.574 Ton jika dibandingkan dengan jumlah penduduk presentase ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 meningkat 61,49 persen.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal terus meningkat dapat dilihat pada tahun 2017 Jumlah ketersediaan pangan utama 221.928 ton dan jumlah penduduk 1.433.51 Jiwa, secara otomatis konsumsi pangan utama meningkat menjadi 134.588 dengan ketersediaan pangan utama mencapai 164.89 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (demand) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (supply) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Kebutuhan total beras di tahun 2031 sebesar 187.820,44 ton sedangkan ketersediaan padi di tahun 2031 sebesar 1.440.981,12 ton dan ketersediaan beras di tahun 2013 sebesar 936.637, 65 ton. Dari hasil perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Tegal, dapat diketahui

bahwa Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Sedangkan untuk posisi daya dukung lahan sawah sampai akhir tahun perencanaan mempunyai nilai $\alpha > 1$, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

2) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017

Tabel 2. 75 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	-Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	48,28	49,95	77,68	104,22	104,22
	- Stabilitas harga dan pasokan pangan	87,07	85,14	98,67	91,64	91,64
2.	Penganekaragaman dan Keamanan					
	- Skor pola pangan harapan	83,8	83,6	72,1	78,6	78,6
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	73,58	-	-	-
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	- Penanganan daerah rawan pangan	7	16	9	15	9

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada Tahun 2016 sebesar 77,68% dan Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 104,22%. Adapun stabilitas harga dan pasokan pangan tercapai 98,67% pada Tahun 2012 namun turun menjadi 91,64% di Tahun 2013.

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Pada Tahun 2016 skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tegal sebesar 72,1% dan Tahun 2017 meningkat menjadi 78,6%.

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2016 sebanyak 15 Desa, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 9. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal. Adapun Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan,

sampai dengan tahun 2017 secara rinci sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.51 di bawah ini

3) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal tahun 2013 - 2017 tercermin dengan capaian indikator ketersediaan energi per kapitan dari tahun 2013 - 2016 selalu meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Sedangkan ketersediaan protein per kapita dan Penguatan Cadangan Pangan dari tahun 2013 - 2017 perkembangannya masih fluktuatif.

4) Hasil Evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Pangan diampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari 1 program dan 12 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pangan pada tahun 2018.

Tabel 2. 76 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan						
1	Jumlah sistem informasi pasar (buah)	1,00	1,00	1	100,00	Dinas Tan & KP	★
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal)	2.000,00	2.000,00	2400	120,00	Dinas Tan & KP	★
3	Penguatan cadangan pangan (ton)	150,40	150,30	229	152,36	Dinas Tan & KP	★
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	71,00	56,00	56	100,00	Dinas Tan & KP	★
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	75,00		100	138,89	Dinas Tan &	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
			72,00			KP	
6	Skor pola pangan harapan (%)	95,40	94,40	81,82	86,67	Dinas Tan & KP	➡
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90,00	88,00	93	105,68	Dinas Tan & KP	★
8	Penanganan daerah rawan pangan (kejadian)	23,00	22,00	89	404,55	Dinas Tan & KP	★
9	Peraturan daerah /Perbup terkait ketahanan pangan (buah)	1,00	1,00	1	100,00	Dinas Tan & KP	★
10	Jumlah LDPM (lembaga)	7,00	7,00	7	100,00	Dinas Tan & KP	★
11	Jumlah lumbung (lembaga)	39,00	34,00	23	67,65	Dinas Tan & KP	➡
12	Jumlah sarana prasarana pengolahan (unit)	20,00	20,00	20	100,00	Dinas Tan & KP	★

★ Sangat Tinggi
➡ Tinggi, Sedang
▼ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Distankp, 2019.

Ketersediaan energi dan protein perkapita telah di atas target, yaitu 2400 kkal dibanding target hanya 2.000 kkal, sehingga mendapat status *Sangat Tinggi* (tercapai 120%). Hal ini dapat tercapai karena kondisi geografis Kabupaten Tegal yang memungkinkan pembudidayaan buah dan komoditi peternakan.

Indikator penguatan cadangan pangan juga telah di atas target, yaitu 229 poin dibanding target sebesar 150,3 poin dengan status capaian juga *Sangat Tinggi* (tercapai 152,36%). Hal ini dapat diwujudkan karena koordinasi yang intensif dengan banyak pihak, diantaranya Distanbunhut. Distanbunhut mengembangkan varietas padi andalan yaitu Pajale dan Sri yang hasilnya baik dan menguatkan cadangan pangan Kabupaten Tegal. Capaian kinerja yang baik juga ditunjukkan oleh indikator stabilitas harga dan pasokan pangan, dari target 56 terealisasi 56. Hal ini didukung oleh konsisi pasar yang stabil dan tidak terdapat gejala harga yang signifikan.

Sementara sejumlah indikator lain yang hasilnya memuaskan, diantaranya skor Pola Pangan Harapan yang terealisasi 81,82% dibanding target sebesar 94,47% dengan status capaian *Tinggi* (tercapai 86,67%). Kondisi ini terjadi karena masih sedikit masyarakat yang melakukan diversifikasi pangan, dengan mengonsumsi makanan nonberas dan nonterigu. Namun, pada indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan yaitu dari target 88% terealisasi sebesar 93%.

Terkait dengan realisasi Indikator Pola Harapan Pangan (PPH), Pola Nilai skore PPH sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan daya beli masyarakat. Untuk faktor budaya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berupaya untuk melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuk pada ketersediaan energi di masyarakat, baik melalui KRPL, Desa mandiri Pangan, P2KP dan lain-lain. Hasil kegiatan ini menunjukkan selama 3 tahun terakhir trend skore PPH menunjukkan peningkatan. Bila pada tahun 2016 berada pada nilai 78,62 % maka pada tahun 2018 bisa mencapai 81,82. Kedepan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pola konsumsi berimbang akan terus dilaksanakan, dan hal ini tentu juga harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat.

Jumlah Lumbung Pangan yang belum memenuhi target. Selama ini kegiatan pembentukan lumbung pangan masyarakat dibiayai oleh dan APBD Provinsi dan APBN. Anggaran APBD hanya untuk pendampingan dan pembinaan, sehingga pencapaian target jumlah lumbung pangan sangat tergantung dari ketersediaan anggaran dari pemerintah atasan. Selain itu, pembangunan lumbung pangan juga tergantung dari ketersediaan lahan oleh masyarakat / kelompok tani dan hal ini menjadi kendala tersendiri untuk membangun lumbung pangan di masyarakat.

D. Pertanian

Urusan pertanahan berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanahan maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi tanah – tanah yang merupakan aset pemerintah kabupaten. 3

Tabel 2. 77 Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Bidang tanah Keseluruhan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah Bidang tanah yang telah bersertifikat					
	a. Swadaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	2.500	3.250	5.000	25.000	45.000
3	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
	a. Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	816
	b. Belum Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	677

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 816 bidang atau sekitar 52,22 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemda

1) Hasil Evaluasi RKPD sampai dengan tahun 2018

Indikator kinerja pada Urusan Pertanahan sebanyak 2 buah, dengan 2 program dan diampu oleh Disperkimtaruna. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanahan pada tahun 2018.

Tabel 2. 78 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah						
1	Jumlah sertifikasi tanah pemerintah	60	50	57	114	Disperkimtaru	★
2	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
1	Penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang)	60	50	42	84	Disperkimtaru	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: Disperkimtaru, 2019.

Dari 2 indikator kinerja Urusan Pertanahan, yaitu jumlah sertifikasi tanah pemerintah dan penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang) telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 ditetapkan target 50 sertifikat, dapat direalisasikan 57 sertifikat dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 114%).

Sementara target penyediaan tanah sampai dengan tahun 2018 adalah 50 bidang, namun baru terealisasi sebanyak 42 bidang sehingga status kinerjanya *Tinggi* (tercapai 84%). Sifat data bersifat kumulatif, sehingga capaian tahun 2018 juga memperhitungkan capaian tahun sebelumnya. Penyediaan tanah instansi terkait dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk melakukan penyediaan tanah. Apabila instansi dalam tahun berjalan tidak membutuhkan penyediaan tanah, maka indikator ini dilaksanakan sesuai kebutuhan instansi.

E. Lingkungan Hidup

1) Tata Lingkungan

Tata Lingkungan diharapkan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal yang dilakukan bisa berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini sudah ditunjukkan mulai tahun 2018 berbagai kegiatan KLHS pada Perda RTRW 1 paket, RDTR Kecamatan 1 Paket dan RPMJD 2019-2024. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan (Kerusakan Biomassa) telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan 2018 untuk 2 lokasi, sedangkan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar limbah B3 Tahun 2018 untuk 1 lokasi. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan tertuang dalam tabel untuk selama 5 Tahun.

Tabel 2. 79 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	33	42	64	70	55

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	-	410	107	140	151

Sumber : DLH, 2018

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 63,78 (kurang) menjadi bernilai cukup (66 s/d 74) serta seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan perizinannya layak lingkungan hidup.

2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi meningkatnya jumlah pemantauan lingkungan, meningkatnya jumlah kampung iklim yang terbentuk, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatnya jumlah usaha dan/kegiatan yang memiliki IPLC, dan menurunnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

Tabel 2. 80 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pemantauan lingkungan	61	63	65	54	55
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair	9	4	4	9	3
3	Jumlah Pembinaan usaha	10	15	15	20	20
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	2	4	6	8	10

Sumber : DLH, 2018

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

3) Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan

Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup oleh pelaku usaha, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani dan/atau terselesaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Beberapa raihan kinerja dalam bidang peningkatan kapasitas dan penataan

hukum lingkungan, termasuk di tingkat provinsi juara lomba kelurahan bersih hijau 1 kelurahan tahun 2017, juara Proklim 1 Kelurahan tahun 2016, Penerima Penghargaan Kalpataru 1 orang di tahun 2013 dan 2 orang di tahun 2015, Penerima Penghargaan Pelestari Sumber Daya Genetik 1 orang di Tahun 2015. Terkait penerapan sanksi administrasi di tahun 2015 sebanyak 21 buah, Tahun 2016 sebanyak 6 buah, Tahun 2017 sebanyak 18 buah terbanyak, dan Tahun 2018 mulai menurun menjadi 4 buah. Perusahaan yang mengikuti PROPERNAS sebanyak 2 di tahun 2013, 8 perusahaan di Tahun 2014, 11 Perusahaan di Tahun 2017 dan 2 perusahaan di tahun 2018. Properda diikuti sebanyak 5 perusahaan di Tahun 2015, 7 perusahaan di Tahun 2016, 10 Perusahaan di tahun 2017 dan 3 Perusahaan di tahun 2018. Penanganan dan / atau penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 3 ditahun 2017, 9 di tahun 2017 dan 7 di tahun 2018.

Tabel 2. 81 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Penuaan Hukum Lingkungan Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata - Tingkat Nasional - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten Denominator : Sekolah potensi minat adiwiyata (dikali %)	2 12 23	3 19 35	5 22 44	7 24 60	2 2 10
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator : Perusahaan (dikali %)	14,7 % (25 dari 170)	23,2 % (43 dari 185)	30,3% (63 dri 208)	47,2 % (110 dri 233)	50,38 % (1310 dri 233)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator : Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	- (belum ada kewenang an penerapa n sanksi)	21	6	18	4

Sumber : DLH, 2018

4) Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 82 Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³)	194,38	251,42	289,89	347,00	512,37
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	989,80	960,09	458,00	496,00	640,46
3	sampah terangkut	19,64	26,19	63,29	70,00	80,00

Sumber: DLH Tahun 2018

Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal Tahun diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan.

Tabel 2. 83 Bank Sampah Tahun 2015 - 2018

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018
1.	Bank Sampah (unit)	81 unit	86 unit	86 unit	120 unit
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	90 unit	100 unit	100 unit	129 unit
3.	BS yg dibentuk (%)	90	86	86	93

Sumber : DLH Tahun 2018.

Dalam penanganan sampah secara 3R, telah dibentuk Bank Sampah di komunitas masyarakat sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Hal ini di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah TPSS (unit)	50	45	72	113	118
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	98,56	88,71	141,92	222,75	240,66
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.437.225
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0.069	0.062	0.099	0,155	0,082

Sumber: DLH Tahun 2018

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 85 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2014-2018

No	Uraian	Kondi TPA				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³)	70.949	91.766	104.359	124.708	137.883
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m ²)	41.691	41.691	41.691	41.691	41.691

Sumber: DLH Tahun 2018




5) Hasil evaluasi RKPD sampai dengan tahun 2018

Urusan Lingkungan hidup terdiri dari 8 program dan 14 indikator kinerja. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh DPU, DLH, DKPP, dan Distankp. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2018.

Tabel 2. 86 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
1	Persentase TPA sesuai standar	34,64	33,64	41,70	123,96	DLH	★
2	Persentase TPS sesuai standar	85,81	82,81	79,68	96,22	DLH	★
3	Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0,01459	0,01429	0,0132	91,73	DLH	★
4	Persentase sampah yang terangkut	72,25	73,25	77,6	105,94	DLH	★
5	Jumlah Bank Sampah	56	51	86	168,83	DLH	★
6	Persentase kawasan tercemar polutan	0,2	0,40	0,75	12,50	DLH	↓
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
1	Persentase UKL-UPL yang dipantau	70	60	156	236,36	DLH	★
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
1	Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	30	30	37	123,33	DLH	★
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
1	Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1	1	1,00	100,00	DLH	★
2	Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup	1	1	1,00	100,00	DLH	★
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi						

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja
1	Persentase kawasan tercemar udara	polutan	0,75	0,80	0,82	95,45	DLH	★
2	Persentase kawasan tercemar air	polutan	3,75	3,95	3,81	103,54	DLH	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DLH, 2019

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan capaian kinerja TPA sesuai standar realisasi kinerjanya yaitu 41,70% berbanding 33,64% untuk persentase TPA sesuai standar. Dengan demikian indikator kinerja ini statusnya capaiannya *Sangat Tinggi* (tercapai 123,96%). Sementara untuk indikator TPS sesuai standar realisasinya 96,22% atau dengan status kinerja *Sangat Tinggi*. Sedangkan Capaian kinerja indikator persentase sampah terangkut yaitu 77,6 %melebihi target awal sebesar 73,25. Hal ini antara lain di samping karena semakin banyaknya sarana armada angkutan sampah (truk) dan meningkatnya jumlah bank sampah di masyarakat.

Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan juga terdapat indikator kinerja Jumlah Bank Sampah. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 untuk tahun 2019 sebanyak 56 Bank Sampah, sedangkan target tahun 2018 sebanyak 51 bank sampah. Sampai dengan akhir tahun 2018 telah terbentuk bank sampah di Kabupaten Tegal sebanyak 86 bank sampah dan telah ditetapkan keberadaannya dengan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dengan demikian target untuk tahun 2018 maupun tahun 2019 telah terpenuhi. Namun demikian, proses pembinaan bank sampah harus terus dilaksanakan baik untuk menambah jumlah bank sampah di Kabupaten Tegal maupun untuk memastikan bank sampah yang telah didirikan bisa beroperasi secara maksimal.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah memberikan layanan kepada Penduduk untuk mendapatkan akta Catatan Sipil. Untuk mewujudkan layanan tersebut dilaksanakan oleh aparat dinas Dukcapil dibidang pelayanan pencatatan Sipil dan koordinasi dengan instansi yang terkait. Data penduduk berdasarkan cakupan kepemilikan akta kelahiran mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terus meningkat. Pada Tahun 2014 cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun sebanyak 47,01%, Tahun 2015 sebanyak 48,21%, kemudian Tahun 2016 meningkat cukup signifikan menjadi sebanyak 63,29%, Tahun 2017 sebanyak 63,3% dan pada Tahun 2018 kembali meningkat cakupannya menjadi sebanyak 64,11%. Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun ini sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia Sedangkan data cakupan akte kematian belum dapat disajikan karena tidak adanya data pembandingan jumlah penduduk yang meninggal per tahun.

2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah untuk memberikan layanan kepemilikan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga dan KIA mengalami peningkatan dari capaian yang sudah ada. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan SDM yang cukup juga kompeten. Data kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan utamanya KTP elektronik, KK dan KIA.

Tabel 2. 87 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik, KK, KIA Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kepemilikan KTP el	81,29	83,17	84,21	73,42	84,13
2.	Kartu Keluarga (KK)	74,19	76,32	78,52	83,75	88,68
3.	Kepemilikan KIA	-	-	-	7.415	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2018

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan KK dan KTP-el setiap tahunnya meningkat. Namun demikian peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk di atas belum merata untuk seluruh wilayah Kabupaten Tegal dan masih di bawah target Nasional. Masih banyak penduduk pada wilayah-wilayah tertentu yang belum memiliki KK dan KTP-el. Selain itu dibutuhkan juga dukungan dan keterlibatan segenap pemangku kepentingan agar pelayanan pendaftaran penduduk dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu untuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), akan dilaksanakan secara bertahap. Penerbitan KIA di Kabupaten Tegal dilaksanakan pada tahun 2017 kemudian di tahun 2018 terhenti karena tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pencetakan KIA.

3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan Informasi Adminduk adalah memberikan pelayanan SIAK, dan layanan database kependudukan sesuai perkembangan terjamin. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras bidang yang terkait. Data layanan SIAK mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan dapat menjamin layanan SIAK bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah PATEN dan OPD yang sudah melakukan perjanjian Kerjasama (PKS) layanan Administrasi Kependudukan dengan Dinas Dukcapil.

Tabel 2. 88 Layanan SIAK Antara Disdukcapil Dengan Rumah Paten Dan OPD Yang Telah Melakukan PKS Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	2	2	3	3	3
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	1	1	2	2	3
3.	Jaringan SIAK (unit)	22	22	22	22	22
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	26	26	26	29	33

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2014	2015	2016	2017	2018
5.	SDM IT SIAK (org)	1	1	2	2	3
6.	Layanan Pengolahan Data (unit)	36	32	33	4	5
7.	Profil dan Data Agregat (unit)	-	50	50	50	50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aplikasi pokok terdiri atas SIAK (Data Penduduk), BCard (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan Benroll (Aplikasi Perekaman KTPel) dan Aplikasi Pendukung berupa Suplemen , SMS Gateway, Website. Jaringan SIAK melayani 3 Bidang di Dinas Dukcapil dan 18 Kecamatan. Perangkat keras yang dimiliki berupa Unit PC, Printer , Printer KTPel, Jaringan Kabel, server, kelengkapan internet dan lain-lain.

4) Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan.

Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mulai tahun 2017 sampai dengan 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Dari data selama kurun waktu tersebut diharapkan akan terjadi penggunaan/pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pemanfaat secara signifikan untuk kegiatan pelayanan publik dan perencanaan.

Tabel 2. 89 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama Dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2014 - 2018

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lembaga pemanfaat data	*	*	*	70	32
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	*	*	*	3	7
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	*	*	*	2	3




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2018

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dapat disajikan hanya mulai tahun 2017 sampai dengan 2018 dikarenakan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan baru terbentuk pada Januari 2017. Penurunan jumlah lembaga pemanfaat data disebabkan karena sesuai regulasi yang berlaku bahwa data rincian penduduk tidak dapat diberikan dalam bentuk softcopy. Data rincian penduduk dapat diberikan dalam bentuk hak akses data yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama ini lembaga terbanyak pemanfaat data adalah Desa.

5) Hasil Evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil terdiri dari 1 program dengan 4 indikator dan diampul oleh Disdukcapil. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Tabel 2. 90 Evaluasi Kinerja Program RKPDP Tahun 2018
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1	Persentase penduduk memiliki KTP	100	100	84,13	84,13	Disdukcapil	
2	Persentase penduduk memiliki kartu keluarga	100	98	88,68	90,49	Disdukcapil	
3	Persentase penduduk memiliki akta kematian	30	20	N/A	N/A	Disdukcapil	N/A
4	Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100	100	64,11	74,11	Disdukcapil	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disdukcapil, 2019.

Indikator persentase penduduk memiliki KTP terealisasi 84,13% dari target 100%, dengan demikian status kinerjanya *Tinggi* (tercapai 84,13%). Begitu juga indikator persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga terealisasi 88,68% dari target 98% dengan status kinerja *Tinggi* (tercapai 90,49%). Sedang persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran sebesar 64,11%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%, atau dengan status kinerja *Sedang* (tercapai 74,11%).

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan administrasi kependudukan antara lain akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sebelum tahun 2012 masih menggunakan sistem manual. Baru pada tahun 2012 menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun telah menggunakan SIAK, untuk pencatatan akta kematian yang rendah karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian keluarganya juga rendah. Masyarakat mendaftarkan kematian keluarganya hanya ketika akan memproses waris secara resmi di pengadilan. Apabila waris diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat umumnya tidak membuat akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal. Sampai dengan Desember tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan sebanyak 3.851 akta kematian. Tidak adanya data pembanding jumlah penduduk yang meninggal dunia menyebabkan persentase penduduk yang memiliki akta kematian tidak dapat dihitung. Untuk itu, selain sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil perlu juga di inisiasi kemudahan-kemudahan dan insentif agar masyarakat dapat termotivasi mencatatkan administrasi kependudukannya.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Adminstrasi Pemerintahan Desa lainnya. Dalam Tahun 2014, Desa hanya memperoleh Dana ADD antara Rp. 80.000.000 – 100.000.000,. Salah satu faktor penting dalam UU Desa adalah adanya Dana Transfer yang besar untuk pembangunan di desa, bersumber dari APBN dan APBD. Adapun sejak Tahun 2015-2018, alokasi DD dan ADD sebagai berikut:

Tabel 2. 91 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 – 2018

No.	URAIAN	Alokasi DD dan ADD (x Rp 1.000)			
		2015	2016	2017	2018
1.	DD – APBN	81.620159	183.211.736	234.026.299	282.703.163
2.	ADD – APBD	114.148.118	120.409.105	120.521.520	118.087.607

Sumber: Dispermasdes, 2018

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun Akhir Oktober Tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun Berjalan dalam pelaksanaannya belum mematuhi ketentuan batas waktu. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2014 – 2018

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	RKPDes;					
	1.Desember s/d Januari	0	50	75	100	125
	2.Pebruari s/d Maret	0	231	206	181	156
2.	APBDes					
	1.Januari s/d Pebruari	0	50	75	100	125
	2.Maret s/d April	0	231	206	181	156

Sumber: Dispermasdes, 2018

Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPdes dan APBdes disamping karena adanya peraturan yang baru juga karena kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang baru, Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Data LPPD sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2014 - 2018

NO	URAIAN	Jumlah Desa Yg Menyusun LPPD				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/LPPD	50	75	90	115	120
	a. Januari -Maret	231	206	191	166	161
	b. > Maret					

Sumber: Dispermasdes, 2018

Dari data diatas, terlihat dari tahun ke tahun, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) semakin membaik. Semakin banyak Desa yang menyusun LPPD sesuai dengan batasan waktunya, yaitu Januari-Maret. Namun demikian masih banyak Desa yang penyusunan LPPD nya setelah Maret, hal ini menunjukkan masih perlunya pendampingan yang optimal kepada Pemerintah Desa oleh Dinas Permasdes maupun lembaga lain.

Tabel 2. 94 Data pengelolaan asset desa Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	Jumlah Desa Yg Menyusun Data Aset Desa				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Neraca Aset	0	0	0	5	10
2	KIB/KIR	0	0	0	25	50

Sumber: Dispermasdes, 2018

Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa masih belum sesuai ketentuan. Pemerintah Desa masih dalam tahap awal inventarisir aset desa, belum dalam bentuk neraca aset desa. Dikarenakan Permendagri nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa di Ketentuan Bagian Kedua Administrasi Umum Pasal 5 Ayat 2 huruf c. Masalah Buku Inventaris dan Kekayaan Desa belum dilaksanakan dan baru dilaksanakan tahun 2018.

2) Penataan Desa

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2014 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Tabel 2. 95 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2014-2018

No	Uraian	Kondidi Kapasitas Aparatur Desa				
		2014	2015	2016	2017	2018

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2014	2015	2016	2017	2018
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	7,54	10,34	15,75	38,17	50,15
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	4,74	9,48 %	15,42	22,53	32,74
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	200	400	650	950	1380
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	4215	4215	4215	4215	4215
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	0	0	0	17,08	40,92
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	0	0	0	48	115
2.2	Jumlah Desa	281	281	281	281	281
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	0	0	0	100	108,18
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa	0	0	0	281	23
3.2	Jumlah Desa	281	281	281	281	281
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	4,62	5,69	8,54	9,60	11,03
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	13	16	24	27	31
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	21,35	32,02	48,04	60,49	80,07
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	60	90	135	170	225
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	281	281
6	peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	14,54	14,89	22,50	19,35	28,00
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembangmen	8	7	9	6	7
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	55	47	40	31	25
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	-	-	-	48	115
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa (org)	200	400	650	950	1380
3.	monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	0	0	0	281	23

Sumber: Dispermasdes, 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun semakin bertambah/meningkat. Dari kondisi awal pada tahun 2014 sebesar 7,54 % semakin meningkat hingga pada tahun 2018 sebesar 50,15 %. Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2014 dalam menunjang peningkatan

SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

3) Kemasyarakatan Desa

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyaraktan Aktif dan LEM Yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Hasil dari pembinaan tersebut dapat dilihat dalam data pengelolaan asset dan kelompok desa binaan mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 96 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (unit)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat					
	Jml UED-SP	34	35	36	39	41
	Jml Kelp UP2K-PKK	621	710	635	397	397
	Jml CPPD	4	4	4	5	5
	Jml Pasar Desa	3	3	3	3	3
	Jml Pokmas TTG	5	5	5	5	33
	Jml KUB	8	8	8	8	8
2.	Lembaga Kemasyarakatan					
	Jml KPMD	0	281	281	281	281
	Jml Posyandu	1230	1315	1405	1064	1248
	Jml kelompok PKK RW	1735	1684	1397	1990	1990
	Jml kelompok PKK RT	6357	6160	6537	9546	9546

Sumber: Dispermasdes, 2018

Dari Data tersebut dapat diketahui Jumlah lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang ada mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2. 97 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	a. Jumlah Kelompok PKK RW	1735	1684	1397	1990	1990
	b. Jumlah Kelompok PKKRW Aktif	1735	1684	1397	1990	1990
	c. PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33
3.	Jml Desa binaan dgn jumlah Desa	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49

Sumber: Dispermasdes, 2018

Dari data diatas menggambarkan semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sekaligus dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK, dengan Jumlah Desa binaan PKK setiap tahun sebanyak 33 Desa. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, *BKB UP2K-PKK*, Pos *PAUD*, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. tiap tahun 11,49 % dari jumlah Desa di Kabupaten Tegal.

4) Pengembangan Desa

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDES dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan.

Kondisi data jumlah Bumdes. jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah. Data tersebut menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Tabel 2. 98 Kondisi BUM Desa Tahun 2014-2018

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2014	2015	2016	2017	2018
	BUMDES tumbuh dan berkembang	0	0	33	40	12
	Jumlah BUMDES	0	0	15	25	35
1.	Status Bumdes Dasar	0	0	15	15	20
2.	Status Bumdes Tumbuh	0	0	5	10	15
3.	Status Bumdes Berkembang	0	0	0	0	0
4.	Status Bumdes Maju	0	0	0	0	0

Sumber: *Dispermasdes, 2018*

Pada akhir tahun 2018, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 35 BUMDesa, yang berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 20, dan BUMDesa tumbuh sebanyak 15.

5) Hasil evaluasi RKPd sampai tahun 2018

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diampu oleh Dispermasdes dengan 5 program dan 23 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018.

Tabel 2. 99 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2018 Urusan Pemberdayaan Masyarakat desa

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
----	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------	---------------------

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif	617	588,00	562,00	95,58	Dispermasdes	★
2	Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						
1	Jumlah pelatihan pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah gelar TTG Tingkat Nasional	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
3	Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
4	Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi	7	7,00	7,00	100,00	Dispermasdes	★
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
1	Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
2	Jumlah UPK	13	13,00	13,00	100,00	Dispermasdes	★
3	Jumlah juara lomba desa	3	3,00	3,00	100,00	Dispermasdes	★
4	Jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab Tegal	2	2,00	3,00	150,00	Dispermasdes	★
5	Jumlah penunjang kegiatan TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal	2	2,00	2,00	100,00	Dispermasdes	★
6	Jumlah dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (2POA)	2	2,00	3,00	150,00	Dispermasdes	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
7	Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal	4	4,00	4,00	100,00	Dispermasdes	★
8	Jumlah pelaksanaan Karya Bakti TNI	4	4,00	4,00	100,00	Dispermasdes	★
9	Jumlah kader P3MD terlatih	54	54,00	738,00	1.366,67	Dispermasdes	★
10	Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
11	Jumlah BKM	116	116,00	116,00	100,00	Dispermasdes	★
12	Jumlah BPD	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
13	Jumlah pencaangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong	1	1,00	1,00	100,00	Dispermasdes	★
14	Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa						
1	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	2	2,00	1,00	50,00	Dispermasdes	↓
2	Jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi	281	281,00	281,00	100,00	Dispermasdes	★
5	Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan						
1	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa	40	40,00	41	102,5	Dispermasdes	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dispermasdes, 2019.

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat sejumlah target kinerja, diantaranya Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif dari target sebanyak 588 lembaga dapat direalisasikan sebanyak 562 lembaga, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 95,58 %).

Sementara indikator jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pedesaan ditargetkan 1 kali pada tahun 2018 terealisasi 1 kali dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 100%), yaitu pelaksanaan Pameran Hari Jadi Kabupaten Tegal. Kendala dalam fasilitasi kemitraan swasta dan UMKM pada Pameran hari Jadi Kabupaten Tegal adalah transaksi yang terjadi tidak bersifat langsung (harus pesan terlebih dahulu) sehingga tidak dapat dikawal dampak dari fasilitasi yang dilakukan. Untuk indikator jumlah lembaga ekonomi masyarakat (UED-SP) yang difasilitasi, dari target 7 telah terealisasi secara sempurna yaitu 7 pada tahun 2018 dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 100%).

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa menetapkan target 1 kali pencaangan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) dan terealisasi 1 kali pada tahun 2018. Sementara indikator paket pelatihan keterampilan TTG terealisasi 1 dari target kinerja 1 kali. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada tahun 2018 yang diikuti oleh 120 peserta dengan capaian sangat tinggi, permasalahan yang dihadapi relatif tidak berarti karena kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Dispermasdes.

Indikator jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi sebanyak 281 desa, sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja target ini antara lain sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kecamatan dan desa. Sementara itu indikator jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 281 pada tahun 2018.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa dilaksanakan sebanyak 1 kali dari target sebanyak 2 kali. Pelatihan dilakukan pada dengan menghadirkan perangkat desa. Sementara indikator kinerja penghasilan tetap kades dan perangkat desa yang terfasilitasi telah terlaksana sesuai target, yaitu kades dan perangkat desa di 281 desa yang dianggarkan melalui ADD.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya Zero Growth. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 0,219 bisa tercapai.

Tabel 2. 100 Laju Pertumbuhan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk	1.420.107	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225
2.	LPP	0,56	0,34	0,32	0,289	0.260
	Penurunan	- 0,36	0,22	0,02	0,031	0.029

	LPP					
--	-----	--	--	--	--	--

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2014- 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 101 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2014-2018

No	Tahun	TFR
	2014	2.75
	2015	2.30
	2016	2.28
	2017	2.42
	2018	2.47

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal berfluktuatif. Kenaikan TFR perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Secara umum penyebab naiknya TFR adalah bertambahnya pasangan usia subur (PUS) sehingga perlu adanya perhatian yang lebih terhadap mereka untuk mengendalikan tingkat kehamilan dan kelahiran.

2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup mengembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 203.349 peserta dari 297.296 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2014-2018 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 102 Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	216.029	214.769	210.584	206.398	203.349
2.	Jumlah PUS	298.741	300.902	293.088	294.221	297.296
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	72.31	71.38	71.85	70.15	68.40

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 206.398 pesertadari 294.221 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrsepsi pada tahun 2013 mencapai 76,16%, sedangkan pada tahun 2014 – 2017 terus mengalami penurunan.

c. Keluarga Sejahtera

Untuk Pelaksanaan dan memantapkan Ketahanan Keluarga diperlukan peranan dari berbagai aspek didalamnya melalui program Tribina yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Melalui kegiatan ini setiap kelompok Tribina akan memperoleh sekaligus dapat memantapkan setiap program dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tribina merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja disamping itu tribina juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa lanjut usia (Lansia) yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat

Tabel 2. 103 Cakupan Ketahanan Keluarga Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Cakupan Ketahanan Keluarga				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	80,30% 32,29	81,91% 62,3	83,03% 83,03	83,03% 83,03	71.36% 60,66
2.	Cakupan Anggota BKR ber KB	27,77	46,88	81,64	42,57	28.11
3.	Cakupan Anggota BKL ber KB	29,68	63,48	77,37	34,6	37,85
4.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mhsw	45,63 % (47 dri 103 sek)	46,6 % (48 dri 103 sek)	48,03% (49 dri 102 sek)	47,17 % (50 dri 106 sek)	48,11 % (51 dri 106 sek)
5.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	82,80%	81,66%	80,79%	80,02%	58,21%
6.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1	1	1	1	1
7.	Cakupan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	1.038 (71,58%)	1.176 (81,1 %)	1.214 (83,72 %)	1.351 (93,17 %)	1.486 (98,18 %)
8.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kel.	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal tahun 2018












Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2015 sebesar 78,9% menjadi sebesar 83,03% di tahun 2017. Sedangkan cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB dan Bina Kelompok Lansia (BKL) dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi.

d. Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 9 program dan 17 indikator kinerja dan diampu oleh DP3AP2KB dan Dinsos. Berikut

disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2. 104 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Keluarga Berencana						
	1 Peserta KB aktif	287.800	274.095	203.349	74,19	Dinas P3A & P2KB	
	2 Persentase DO	10,13	11,67	15,99	62,98	Dinas P3A & P2KB	
	3 Persentase Unmeet Need	13,77	13,87	14,22	97,47	Dinas P3A & P2KB	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja						
	1 Jumlah sosialisasi KRR	300,00	300,00	200,00	66,67	Dinas P3A & P2KB	
3	Program pelayanan kontrasepsi						
	1 jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	65,00	63,00	64,00	101,59	Dinas P3A & P2KB	
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						
	1 Rasio Akseptor KB	97,10	92,48	69,58	75,24	Dinas P3A & P2KB	
	2 Cakupan anggota UPPKS ber-KB	87,00	86,30	58,21	67,45	Dinas P3A & P2KB	
	3 Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	
5	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat						
	1 Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	80,00	75,00	78	104,00	Dinas P3A & P2KB	
	2 Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	1,00	1,00	1,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	
6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR						
	1 Jumlah Pusat Konseling KRR	1,00	1,00	1,00	100,00	Dinas P3A & P2KB	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
7	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS						
1	Jumlah pengidap Narkoba	372,00	364,00	507	139,29	Dinsos	★
2	Jumlah pengidap PMS	476,00	463,00	454	96,80	Dinsos	★
3	Jumlah Pengidap HIV/AIDS	189,00	183,00	431	235,52	Dinsos	★
8	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1,00	1,00	1	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
9	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga						
1	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1,00	1,00	1	100,00	Dinas P3A & P2KB	★
10	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU						
1	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	92,00	80,00	70	87,50	Dinas P3A & P2KB	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DP3AP2KB; Dinsos, 2019.

Jumlah peserta KB aktif terealisasi sebanyak 203.349 sementara targetnya sebanyak 274.095, atau dengan status capaian kinerja Sedang (74,19%). Terutama KB MKJP yang rendah, hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk Ber-KB yang masih Rendah. Selain itu jumlah tempat pelayanan kontrasepsi tersedia relatif banyak, 64 tempat dari target sebanyak 63 tempat. Tempat pelayanan kontrasepsi tersebar di puskesmas, rumah bersalin, rumah sakit dan klinik bidan praktik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KB antara lain ketersediaan Penyuluh KB (PKB) yang terbatas. Dari jumlah yang terbatas itu hampir setiap tahun terdapat PKB yang pensiun dan tidak segera mendapat tambahan PKB baru. Keberadaan PKB dibantu dengan keberadaan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Kader PPKBD di desa. Indikator cakupan PPKBD dan Sub PPKBD aktif telah terealisasi sebesar 78%, dari target sebesar 75%. Begitu juga rasio kader KB pada PPKBD dan Sub PPKBD telah terpenuhi, yaitu 1 kader untuk 1 PPKBD dan Sub PPKBD.

Untuk indikator jumlah BKB-Posyandu-PAUD terintegrasi terealisasi 70 BKB, dari target tahun 2018 sebanyak 80 BKB. Saat ini di setiap kecamatan telah terdapat minimal 1 BKB yang telah terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD.

Permasalahan yang dihadapi adalah hubungan kelembagaan di desa yang seringkali kurang harmonis. Beberapa desa cenderung mengalokasikan anggaran untuk PAUD atau Posyandu saja, masih kurang memperhatikan anggaran untuk BKB.

I. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektivitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan. Berikut ini gambaran angka kecelakaan di Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 105 Angka Kecelakaan Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2014	624	192	13	780	
2015	575	162	0	679	7,85
2016	631	172	1	723	-9,74
2017	487	156	0	512	22,82
2018	476	152	0	509	2,26

Sumber: Dishub, 2018

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Tabel di atas menggambarkan 5 tahun terakhir terjadi penurunan angka kecelakaan dari 624 kejadian menjadi 476 Kejadian atau penurunan sekitar 23,7%. Harapannya angka kecelakaan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelekaan lalu lintas, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan.

1) Infrastruktur Lalu Lintas

a. Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Infrastruktur Lalu Lintas adalah memberikan pelayanan lalu lintas pada masyarakat melalui pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

Tabel 2. 106 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun	Kondisi
----	--------	----------------------------	---------

		2014	2015	2016	2017	2018	saat ini
1	Kebutuhan Rambu	19.802	19.802	19.802	19.802	19.802	19.802
2	Rambu Terpasang	N/A	N/A	N/A	N/A	3.449	3.449
	Persentasi Rambu (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	17,42	17,42

Sumber: Dishub, 2018

b. Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran . Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 107 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Lokasi yg berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	300	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	123	133	144	157	171	171
	Persentasi lokasi parkir (%)	41,0	44,3	48,0	52,3	57,0	57,0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 57%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

c. Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2. 108 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Usaha Besar yg berpotensi pd perubahan	12	12	12	12	12	12

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
	sistem transportasi						
2	Jumlah andalin yang disetujui	N/A	N/A	N/A	N/A	7	7
	Persentasi jumlah Andalin (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	58,3	58,3

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

Kebijakan implementasi Andalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Tabel di atas menunjukkan bahwa saat ini Andalin masih berupa pelayanan permohonan andalin dari pemrakasa atau pengelola tertentu yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi.

2) Infrastruktur Angkutan

a. Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal dukuhsalam slawi, terminal trayeman dan terminal adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/rest area klonengan dan maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 25 unit.

Tabel 2. 109 Terminal dan Halte Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Terminal/Shelter	23	23	23	23	23
2	Halte	10	10	10	16	25
3	Terminal/Shelter	5	5	5	7	7
	Persentasi Terminal/Shelter (%)	21,7	21,7	21,7	30,4	30,4

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

b. Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2017 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 124.

Tabel 2. 110 Jumlah Trayek Lalu Lintas Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Angkutan Umum	2.901	980	981	972	972	972
2	Jumlah Ijin Trayek	135	107	152	122	124	124

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
	Rasio Ijin Trayek						

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

c. Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah angkutan umum yang telah melakukan ujikir pada tahun 2018 sebanyak 7.139 unit kendaraan dari 9.166 unit kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan ujikir di Kabupaten Tegal

Tabel 2. 111 Jumlah Angkutan yg melakukan Uji KIR Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Angkutan Penumpang dan Barang	8.316	8.573	8.832	8.899	9.166
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.796	1.852	1.909	1.968	2.027

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

3) Infrastruktur Keselamatan Jalan

a. Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlantasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulung dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakerta di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang crossing dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

Tabel 2. 112 Jumlah Perlintasan sebidang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perlintasan Sebidang	53	53	53	53	53
2	Jumlah Gardu Pengaman	7	7	12	14	17
	Persentasi Gardu Pengaman (%)	13,21	13,21	22,64	26,42	32,08

Sumber : Dinas Perhubungan, 2018

Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 17 unit atau sekitar 32,08%.

b. Penerangan Jalan Umum

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah LPJU sudah mencapai 86,28% dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal.

4) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan perhubungan diampu oleh Dishub dan terdiri dari 4 program dengan 3 indikator. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perhubungan pada tahun 2018.

Tabel 2. 113 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
	1 Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78,00	77,00	97,70	126,88	Dishub	★
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
	1 Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78,00	77,00	97,70	126,88	Dishub	★
3	Program peningkatan pelayanan angkutan						
	1 Persentase AKDP berijin	100,00	95,00	66,00	69,47	Dishub	➡
	2 Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	67,00	64,00	77,88	121,69	Dishub	★
4	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.						
	1 Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78,00	77,00	97,70	126,88	Dishub	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dishub, 2019.

Indikator persentase sarana perhubungan berfungsi baik dari target kinerja sebesar 77% terealisasi 97,77% dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 126,88%). Indikator capaian dapat dilihat dari terealisasinya program

program seperti pengadaan dan pemasangan rambu – rambu lalu lintas di wilayah kota Slawi, pengadaan dan pemasangan marka jalan, pengadaan dan pemasangan *Traffic Light* di simpang Pakembaran, pengadaan dan pemasangan *warning light* di depan Brigif dan Polres Tegal. Pemenuhan kebutuhan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dilakukan secara berkala dan sesuai dengan skala prioritas. Indikator capaian kinerja juga dapat dilihat dari tercapainya program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas perhubungan seperti perbaikan *traffic light* di 16 simpang yang diatur oleh *traffic light*. Perbaikan *traffic light* dilakukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi *traffic light* yang rusak.

J. Komunikasi dan Informatika

1) Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah mendorong terbentuknya Lembaga Komunikasi Masyarakat/Kelompok Informasi Masyarakat (LKM/KIM) untuk penyebarluasan informasi tentang pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat dan disampaikan balik kepada pemerintah, dimana LKM/KIM adalah sebagai media penghubung yang terkoordinir antara pemerintah dan masyarakat. Dengan Program Diseminasi Informasi, Komunikasi Dan Kemitraan Media diharapkan LKM/KIM dapat terbentuk di 287 desa di seluruh Kabupaten Tegal.

Selain itu sesuai dengan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka artinya badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Tabel 2. 114 Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Jumlah Badan Publik Yang Terbuka Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kualifikasi tingkat KIP Badan Publik	0	0	0	0	41,60
2	Jumlah Desa yang telah terbentuk LKM/KIM	6	6	6	6	6
3	Pengembangan KIM	2	4	6	8	10

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2018 telah melakukan klarifikasi tingkat KIP Badan Publik dan telah terbentuk LKM/KIM di 30 Desa dalam 5 Kecamatan (Slawi, Lebaksiu, Pangkah, Dukuhwaru dan Adiwerna). Adapun persentase pengembangan KIM pada tahun 2018 mengalami peningkatan 10 % dibanding tahun 2017 sebesar 8%.

2) Teknologi Informasi dan Persandian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka Pemerintah diharapkan meningkatkan Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan pengukuran tingkat maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada domain tata kelola SPBE, kebijakan internal dan layanan SPBE. Domain kebijakan internal terdiri atas 2 aspek yaitu tata kelola dan layanan. Domain tata kelola SPBE terdiri atas 3 aspek yaitu kelembagaan, strategi dan perencanaan dan teknologi informasi dan komunikasi. Domain Layanan SPBE terdiri atas 2 aspek yaitu administrasi pemerintahan dan layanan publik. Tujuan pengukuran indeks SPBE adalah 1) mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. 2) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. 3) menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu Indeks KAMI merupakan tools untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kreteria pada SNI ISO / IEC 27001 yaitu 1) tata kelola 2) pengelolaan resiko 3) kerangka kerja 4) pengelolaan aset 5) aspek teknologi.

Tabel 2. 115 Indeks SPBE dan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	NA	1,9	1,8
2	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	NA	NA	147

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SPBE Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2017 dan penilaian Indeks Keamanan Informasi mulai dilaksanakan tahun 2018.

3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung *e-Government*/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/*e-Government* akan berkembang menjadi Smart City yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah memiliki sebanyak 20 PNS fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 116 Jumlah Aparatur Pemerintah Yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bimtek internet sehat bagi masyarakat	0	0	0	0	100
2	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah	0	0	0	0	0
3	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah desa	0	0	0	0	100
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	0	0	0	0	20
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatik, Tahun 2018

Dari data diatas terlihat bahwa dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 bimbingan teknis berkaitan dengan pengembangan sumber daya TIK telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk masyarakat, aparatur pemerintah desa dan pranata komputer di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 20 orang pranata komputer dimana bimtek berkaitan dengan penilaian angka kredit.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebuah unit layanan pengadaan yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efisien dan efektif dan dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP/JP).

Untuk peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pelaku pengadaan sangat dibutuhkan bimtek e-procurement secara berkala dan kontinyu dan peningkatan standarisasi LPSE Kabupaten Tegal kepada standar yang telah ditetapkan oleh LKPP hingga ke standar ideal 17. Tabel 10.5 berikut menggambarkan Penyelenggaraan LPSE dari Tahun 2014 hingga Tahun 2018.

Tabel 2. 117 Jumlah Bimtek Pelaku Pengadaan Dan Tingkat Standarisasi LPSE Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bimtek <i>e-Procurement</i> Bagi Pelaku Pengadaan	0	0	0	118	238

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
2	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	0	0	6	7	10

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Bimtek *e-Procurement* Bagi Pelaku Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Pada Bimtek Tahun 2017 Pelaku Pengadaan berjumlah 118 orang berasal dari OPD dan Bagian (60), Kelompok Kerja (30) dan Penyedia (40). Pada Tahun 2018 berjumlah 238 orang dimana jumlah pelaku di Tahun 2017 ditambah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 60 orang dan Pejabat Pengadaan (PP) sejumlah 60 orang, dan terlihat pula bahwa proses Standarisasi LPSE telah dimulai sejak Tahun 2016 ketika LPSE masih unit bagian dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tegal.

4) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Program dalam Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat sebanyak 3 program dengan 5 indikator. Urusan Komunikasi dan Informasi diampu oleh Diskominfo. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2. 118
Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
1	Jumlah layanan pemerintah secara elektronik	3	3	44	1.466,00	Dinas Kominfo	★
2	Jumlah sistem informasi/ <i>website</i> instansi	54	54	70,00	129,63	Dinas Kominfo	★
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						
1	Jumlah pelatihan bidang TIK	1	1	1	100	Dinas Kominfo	★
3	Program kerjasama informasi dan media massa						

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Jumlah kerjasama dengan media massa	6	6	6,00	100,00	Dinas Kominfo	★
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi						
1	Jumlah data base aktif	28	28	70,00	250,00	Dinas Kominfo	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: Diskominfo, 2019.

Berdasarkan tabel capaian tersebut apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RPJMD Tahun 2014-2019 dari sebanyak 5 target indikator kinerja status capaian kinerja yang sangat tinggi sebanyak 5 indikator.

Jumlah layanan pemerintah secara elektronik terealisasi 44 layanan dari target sebanyak 3 layanan, dengan demikian status kinerjanya *Sangat Tinggi* (tercapai 1.466%). Sementara jumlah SIM dan Web yang ada pada Tahun 2018 telah terealisasi dibanding target yang telah ditetapkan, yaitu 70 dibanding 54 SIM dan Web dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 129,63%). Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan TIK di Kabupaten Tegal adalah ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM yang masih rendah serta budaya TIK yang belum terbangun dengan baik. Ke depan, diharapkan pembangunan TIK dapat lebih berkembang di Kabupaten Tegal, untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan kepada public.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Dalam kurun waktu Tahun 2014 – 2018 Jumlah koperasi di Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari 615 unit menjadi 435 unit, Namun dari tingkat keaktifan mengalami kenaikan dari 22,93% menjadi 57,93% di Tahun 2018. Perkembangan Jumlah dan tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 119 Koperasi Aktif dan Sehat Tahun 2014-2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koperasi aktif	141	216	146	152	252
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	474	413	497	292	183
3.	Jumlah koperasi	615	629	643	444	435
	koperasi Aktif (%)	22,93	34,34	22,71	34,23	57,93

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 2018

Dilihat dari tingkat keaktifan, koperasi di Kabupaten Tegal dapat dikategorikan rendah (57%). Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi

2) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Dalam kurun waktu Tahun 2014 - 2018, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari 29.995 unit menjadi 166.092 unit atau mengalami kenaikan sekitar 450%. Sedangkan jumlah UKM yang mempunyai legalitas mengalami kenaikan 1000 % yaitu dari 512 unit menjadi 5.916 unit. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 120 Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah seluruh UKM	29.995	33.520	33.530	142.412	166.092
2	UKM formal	512	3.941	4.193	5.060	5.916
3	UKM non Formal	29.483	29.579	29.337	137.352	160.176

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 2018

Kenaikan jumlah UKM harusnya dibarengi dengan upaya pembinaan dan akses kemudahan dalam perijinan dan permodalan ke perbankan, karena jumlah UKM yang besar ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR pada tahun 2013 berjumlah 13 , namun pada tahun 2017 mengalami penurunan 7,69% yaitu menjadi 12. Untuk jumlah LKM non Koperasi pada tahun 2013 berjumlah 557, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015, namun

tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 121 Jumlah BPR/LKM Non Koperasi Tahun 2014- 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah BPR	13	13	11	11	12
2	Jumlah LKM Non Koperasi	557	572	618	207	6

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal Tahun 2018

4) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari 5 indikator dan 2 program. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diampu oleh DisdagkopUKM. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Tabel 2. 122 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
	1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	4,00	1 kali	1 kali	100	Dinas Dakop & UKM
2	Jumlah Wirausahawan Baru	35,00	30 UKM	30 UKM	100	Dinas Dakop & UKM	★
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
	1	Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan	1.830 UKM	1.820 UKM	29.823 UKM	1.638	Dinas Dakop & UKM
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
	1	Jumlah koperasi aktif	425	325	252	78	Dinas Dakop & UKM
2	Jumlah BPR dan LKM aktif	590	585	NA	NA	Bag. Perekonomian	NA

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
Sumber: Disdagkop UKM, 2019.

Jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target yang diharapkan yaitu dari target semula 1 kali terealisasi 1 kali juga. Sementara itu, jumlah wirausahawan baru yang direncanakan sebanyak 30 UKM terealisasi sebanyak 30 UKM, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, jumlah UMKM mengakses kredit perbankan yang direncanakan target 1.820 UKM terealisasi sebesar 29.823 UKM dimana predikat kinerja Sangat Tinggi(tercapai 1.638%)

Indikator jumlah koperasi aktif pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dari target 325 koperasi dapat direalisasikan sebanyak 252 koperasi yang aktif ditandai dengan aktivitas dan pelaksanaan RAT masing-masing koperasi. Status indikator kinerja ini Tinggi (tercapai 78%). Meskipun demikian untuk itu perlu dilakukan pembinaan lebih intensif oleh Dinkop, UKM, Pasar untuk mendorong kinerja koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tegal. Koperasi-koperasi yang tidak aktif ini karena tidak memiliki daya saing dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Pembinaan oleh Dinkop, UKM, Pasar perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing koperasi-koperasi yang tidak aktif ini.

Indikator jumlah BPR dan LKM Aktif, untuk jumlah BPR di Kabupaten Tegal sebanyak 11 unit, 2 BPR milik Pemkab Tegal dan 9 BPR milik swasta. Sementara jumlah LKM sesuai UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdapat 1 LKM, yaitu Koperasi LKM Arta Surya.

L. Penanaman Modal

1) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 123 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2014 - 2018

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2014	4.658	642.443.030.153	2	70.000.000.000
2015	4.806	724.380.209.176	2	226.216.300
2016	5.628	656.376.500.000	5	1.107.984.000.000
2017	5.266	566.881.900.000	4	1.243.150.000.000
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2014 - 2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.266 investor. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 7.257 investor dengan nilai investasi mencapai 1.073.862.531.863. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMDN

mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

2) **Indek Kepuasan Masyarakat Perizinan**

pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 124 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	72,00	72,38	73,87	75,32	77,61

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2018

Dengan melihat Tabel di atas pada tahun 2014 - 2018 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik.

3) **Pengendalian PMPTSP**

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali OPD yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 125 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2017-2018

No	Uraian	2017	2018
1	Jumlah Perusahaan berizin	5.270	5.475
2	Jumlah Perusahaan	11.714	11.714
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	45	46,73

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2018

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2017 sebanyak 5.270 meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.475 dengan Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin meningkat 1,73% dari 45 % pada tahun 2017 menjadi 46,73% tahun 2018.

4) **Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018**

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 program dengan 9 indikator. DPMPSTP adalah OPD yang mengampu Urusan Penanaman Modal. Berikut disajikan tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Penanaman Modal.

Tabel 2. 126 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
----	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------	---------------------

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						
1	Jumlah investor PMA	4,00	3	3	100	Dinas PM dan PTSP	★
2	Jumlah investor PMDN	3.070	3.065	730	23,82	Dinas PM dan PTSP	↓
3	Jumlah nilai investasi PMA	48 Miliar	46 Miliar	480,8 Miliar	1.045,22	Dinas PM dan PTSP	★
4	Jumlah nilai investasi PMDN	825,5 Miliar	795,75 Miliar	1.073,86 Miliar	134,95	Dinas PM dan PTSP	★
5	Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN	6.670	6.670	37.500	562,22	Dinas PM dan PTSP	★
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
1	Jumlah ijin usaha dikeluarkan	6.200	6.100	7.260	119,02	Dinas PM dan PTSP	★
3	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah						
1	Jumlah aparatur yang kompeten	27	26	33	126,92	Dinas PM dan PTSP	★
2	Jumlah sistem informasi investasi	1	1	4	400	Dinas PM dan PTSP	★
4	Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan						
1	Survei Indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan	1	1	1	100	Dinas PM dan PTSP	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DPM PTSP, 2019.

Capaian Kinerja Tahun 2018 pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi berupa Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 yaitu 6.100 Izin Usaha

sedangkan pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal telah mencapai 7.260 Izin Usaha dengan status capaian Tinggi (tercapai 119,01%). Jumlah Investor PMA dapat direalisasikan sebanyak 3 PMA dari target 3 PMA, sehingga kriteria indikator ini Sangat Tinggi (tercapai 100%).

Capaian Kinerja Tahun 2018 pada Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan berupa Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Perizinan telah tercapai. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 yaitu 1 Kali Kegiatan Per Tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tegal telah melaksanakan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai instrumen untuk mencapai indikator masing-masing kinerja adalah penyelenggaraan pameran investasi; penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk tata cara pengaduan; penelitian kepuasan masyarakat serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Capaian kinerja outcome program urusan ini antara lain Jumlah Investor PMA dapat direalisasikan sebanyak 3 PMA dari target 3 PMA, sehingga kriteria indikator ini Sangat Tinggi (tercapai 100%). Nilai investasi PMA yang diperoleh juga di atas target, yaitu sebesar Rp. 480.800.000.000,00 dari target sebanyak Rp. 45 miliar dan memperoleh predikat Sangat Tinggi (tercapai 1.045,22%).

Dengan adanya penanaman modal baik dari PMA maupun PMDN telah mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dari target penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.670, dengan adanya investasi baik dari PMA dan PMDN telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 37.500 orang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai indikator masing-masing kinerja adalah terbatasnya jumlah SDM Teknis dan IT yang membutuhkan 3 personil serta kurang intensnya koordinasi dengan OPD terkait, khususnya dalam proses perizinan dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk terbitnya sebuah izin.

Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan antara lain dengan memenuhi SDM yang berkualitas di bidang teknis dan memiliki keahlian di bidang IT dan diharapkan kepada OPD terkait yang terlibat dalam Tim Teknis agar dapat memberikan dukungan secara intens khususnya kepada pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai anggota Tim Teknis untuk bertanggungjawab penuh memberikan rekomendasi proses perizinan.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

Tabel 2. 127 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018

1.	Persentase Organisasi Pemuda aktif (%)	20	20	31	31	50
2.	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	3	4	3	5	6
3.	Persentase Wirausaha pemuda (%)	Blm ada program	Blm ada program	Blm ada program	Blm ada program	Blm ada program

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Banyaknya jumlah atlet berprestasi menggambarkan pembinaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Selanjutnya dalam rangka menyongsong bonus demografi, meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan manusia maka akan dilaksanakan program penumbuhan wirausaha pemuda untuk meningkatkan persentase wirausaha pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal yaitu POPDA, PORDA, Kejuaraan cabang sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, bola volley.

Tabel 2. 128 Organisasi Pemuda dan Klub Olahraga Kabupaten Tegal

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	20	30	33	33	33
2.	Jumlah Organisasi/Klub Olahraga	56	56	56	56	56
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	11	11	11	11	11
4.	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	9

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal




1) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh Disparpora. Urusan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 4 program dan 10 indikator kinerja. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga.

**Tabel 2. 129 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018
Urusan Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	OPD	Status Kinerja 2018
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan						
1	Jumlah pelatihan	9	11	11	100	Dinas	

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	OPD	Status Kinerja 2018
	pemuda					Parpora	
2	Jumlah pemuda yang dilatih	450	440	492	111,82	Dinas Parpora	★
3	Jumlah pemuda pelopor	252	240	240	100	Dinas Parpora	★
4	Jumlah organisasi pemuda dibina	33	31	33	106,45	Dinas Parpora	★
2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						
1	Jumlah pelatihan kewirausahaan	1	1	1	100	Dinas Parpora	★
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga						
1	Jumlah kompetisi olahraga amatir	28	23	23	100	Dinas Parpora	★
2	Jumlah kompetisi olahraga profesional	18	12	12	100	Dinas Parpora	★
3	Jumlah atlet dibina	215	210	300	142,86	Dinas Parpora	★
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	181	158	313	198,10	Dinas Parpora	★
2	Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik	816	785	785	100	Dinas Parpora	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disparpora, 2019.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program Jumlah pemuda yang dilatih dari target 440 orang dapat direalisasikan sebanyak 492 orang, dengan status kinerja *Sangat Tinggi* (tercapai 111,82%). Sementara jumlah organisasi pemuda yang dibina dapat direalisasikan sebanyak 33 orang dari target 31 orang, dengan status kinerja *Sangat Tinggi*.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, untuk indikator jumlah pelatihan kewirausahaan telah mencapai target capaian, yaitu 1 kali pelatihan dari target kinerja sebanyak 1 kali pelatihan juga. Meski demikian kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kewirausahaan sedikit menghambat pelaksanaan program untuk lebih optimal lagi.

Capaian Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga untuk indikator jumlah atlet yang dibina baru sebanyak 300 atlet, sementara targetnya sebanyak 210 atlet. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga sudah meningkat; perkembangan prestasi pemuda dan olahraga; dan optimalnya pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana olahraga masyarakat; penghargaan pada atlet yang berprestasi; serta fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat agar pembangunan bidang olah raga di Kabupaten Tegal dapat lebih semarak lagi.

Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga di tahun 2018 juga sudah berpredikat *Sangat Tinggi*. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik ditarget sebanyak 785 unit dan teralisasi 785 unit.

N. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten/Kota dalam aplikasi Single Data System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Capaian kinerja sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten melalui penerbitan buku Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Nilai Tukar Petani, Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tegal dan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Tegal.

Pembangunan membutuhkan kekuatan, dan tanpa kekuatan pembangunan akan runtuh. Salah satu kekuatan agar pembangunan yang akan dilaksanakan kuat

adalah tersedianya data statistik yang berkualitas. Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen dan perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir. Apa yang menjadi sumber kekuatan tersebut, semuanya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan data berkualitas. Data Statistik Sektorial Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 130 Jumlah Ketersediaan Data Sheet Dan Laju Penggunaan Statistik Sektorial Pemerintah Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Data Sektorial Statistik yg Terintegrasi dgn SDS	0	0	0	0	0
2	Laju Akses Data Statistik Sektorial Oleh Masyarakat dan Stakeholders (%)	0	0	0	0	0
3	LPSE					


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018




Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2018, data baru dapat terwujud pada Tahun 2018 karena dalam melaksanakan pengumpulan, mengolah, menyusun, dan menganalisis serta mempublikasikan statistik sektorial baru mulai pelaksanaan pada akhir Tahun 2018 dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tegal baru terbentuk pada Tahun 2017 sehingga laju akses data juga belum termanfaatkan.

1) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Statistik diampu oleh Dinas Kominfo, terdiri dari 1 program dan 1 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Statistik.

Tabel 2. 131 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						
	1 Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan	30	6	6	100	Dinas Kominfo	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Kominfo, 2019.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah terdiri dari 1 indikator, yaitu jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan.

Capaian kinerjanya sebanyak 6 dokumen dengan status capaian kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100 %). Berikut disajikan Gambar Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan. Dokumen data statistik yang dipublikasikan berupa Kabupaten Tegal Dalam Angka (KDA), Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Pembangun Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tegal.

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan target kinerja ini adalah kurangnya ketepatan data dalam kompilasi sehingga rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kordinasi yang intens dengan SKPD lain sehingga data yang diperoleh lebih tepat, komplit dan up to date.

O. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 132 Indeks SPBE dan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	NA	1,9	1,8
2	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	NA	NA	147

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SPBE Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2017 dan penilaian Indeks Keamanan Informasi mulai dilaksanakan tahun 2018.

P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Tabel 2. 133 Kondisi Budaya Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji	16,98	18,41	20,14	20,05	21,40

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
2.	Jumlah pelaku seni, kesenian dan sanggar seni yang dibina	Pelaku seni : 520 Sanggar Seni : 311	Pelaku seni : 600 Sanggar Seni : 327	Pelaku seni : 625 Sanggar Seni : 331	Pelaku seni : 775 Sanggar Seni : 360	Pelaku seni : 1060 Sanggar Seni : 459
3.	Persentase tradisi yang dikembangkan	24	24	39	45	50

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Kurun waktu 2014-2018 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan sebagai berikut: 1) persentase benda cagar budaya dan situs budaya yang dibangun/direhab dan dikaji dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan ; 2) Jumlah pelaku seni, kesenian dan sanggar seni yang dibina semakin tahun semakin meningkat; 3) Persentase tradisi yang dikembangkan dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan.

1) Hasil evaluasi RKPd sampai tahun 2018

Urusan Kebudayaan terdiri dari 3 program dan 11 indikator kinerja. Urusan Kebudayaan diampu oleh Dikbud. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2018.

Tabel 2. 134 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2018 Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Pengembangan Nilai Budaya						
1	Jumlah pertunjukan seni	3	3	6	200	Disdikbud	★
2	Jumlah pameran seni	1	1	6	600	Disdikbud	★
3	Jumlah misi/muhibah kesenian	1	1	36	3600	Disdikbud	★
4	Jumlah sarana pertunjukan seni	19	19	19	100	Disdikbud	★
5	Jumlah pelaku seni yang dibina	3110	3110	3110	100	Disdikbud	★
6	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	397	378	459	121	Disdikbud	★
7	Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	4	4	1	25	Disdikbud	↓
8	Jumlah maestro seni	3	3	3	100	Disdikbud	★

2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							
	1	Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3	3	3	100	Disdikbud	★
	2	Jumlah naskah kuno yang dikaji	1	1	1	100	Disdikbud	★
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
	1	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2	2	2	100	Disdikbud	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.
 Sumber: Dinas Dikbud, 2019.

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan menunjukkan semakin membaik dengan rata-rata capaian diatas tinggi. Namun demikian ke depan diharapkan peran serta aktif masyarakat untuk memasyarakatkan seni dan budaya di Kabupaten Tegal. Terlebih kebudayaan merupakan salah satu misi dalam RPJMD tahun 2014-2019. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan umum urusan kebudayaan adalah (1) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional; (2) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk memujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 135 Indikator Perpustakaan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan pemustaka	18.480	25.213	31.926	24.667	31.243
2.	Peningkatan koleksi judul	1.706	2.336	3.692	4.786	6.038
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Capaian kinerja pada tahun 2014-2018 selengkapnya sebagaimana Tabelberikut.

Tabel 2. 136 Jumlah Perpustakaan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	1	1	3	3	3
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	34	34	34	36	56
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	6	6	8	16	19
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	16	16	16	43	43
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	2	4	15	16	16
	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	60	62	77	115	138

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2014-2018 tidak mengalami perubahan yaitu Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh desa/kelurahan 56 unit, perpustakaan tempat ibadah 19 unit, perpustakaan ekstensi 16 unit dan perpustakaan OPD 43 unit. Secara total jumlah perpustakaan di tahun 2018 ada 138 unit.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 137 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	15.840	22.135	26.646	15.777	14.319
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	2.640	3.078	5.280	8.890	16.924
2.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	15.940	39.163	42.186	43.586	47.331

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

Jumlah pengunjung di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Tegal mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 15.840 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 14.319 orang, sedangkan pengunjung perpustakaan keliling mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014 sebanyak 2.640 orang, pada tahun 2018 sebanyak 16.924 orang. Koleksi buku di perpustakaan Pemda juga mengalami peningkatan dari 15.940 buku di tahun 2014 hingga 47.331 buku di tahun 2018.

1) Hasil evaluasi RKPd sampai tahun 2018

Urusan Perpustakaan terdiri dari 1 program dan 9 indikator. Urusan Perpustakaan diampu oleh Dinas Arpus. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perpustakaan.

Tabel 2. 138 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2017 Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
1	Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	100	Dinas Arpus	★
2	Jumlah perpustakaan desa	41	36	56	155,55	Dinas Arpus	★
3	Jumlah perpustakaan instansi	54	54	48	88,89	Dinas Arpus	➡
4	Jumlah perpustakaan keliling	2	1	3	300	Dinas Arpus	★
5	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	16	14	19	135,71	Dinas Arpus	★
6	Jumlah perpustakaan silang terpadu	16	5	16	320	Dinas Arpus	★
7	Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah	21.600	20.160	14.319	71,02	Dinas Arpus	★
8	Jumlah kunjungan perpustakaan daerah	13.200	10.560	16.924	160,26	Dinas Arpus	★
9	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	40.000	39.000	47.331	121,36	Dinas Arpus	★

★ Sangat Tinggi
 ➡ Tinggi, Sedang
 ⬇ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Arpus, 2019.

Urusan Perpustakaan prosentase rata-rata Sangat Tinggi, ada permasalahan di Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah yang tidak memenuhi target dengan Status Capaian Sedang. Hal ini disebabkan fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap dan rendahnya koordinasi dengan pihak luar.

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka di tahun yang akan datang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, mengupayakan perluasan ruang baca, gedung dan lahan parkir, menambah koleksi judul buku dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait secara intensif, terutama UPTD Sekolah.

R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti

otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

1) Audit Kearsipan

Audit kearsipan merupakan penilaian tata kelola kearsipan yang dilaksanakan oleh LKD dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 48 OPD, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa. Baik atau tidaknya hasil audit dapat dilihat dari nilai LAKE (Laporan Audit Kinerja Eksternal LKD, Desa dan Ormas, dan nilai LAKI (Laporan Audit Kinerja Internal) OPD dan BUMD.

Tabel 2. 139 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	27	33
2.	Peningkatan jumlah OPD dan BUMD dengan Nilai LAKI Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian
3.	Peningkatan jumlah Desa dan Ormas dengan Nilai LAKE Cukup	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian	Blm dilakukan penilaian

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal belum melaksanakan audit kearsipan terhadap 48 OPD, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa.

2) Pengelolaan Arsip

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan kearsipan yang baik. OPD dan Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.

Tabel 2. 140 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	4	4	54	48	48
2.	Persentase jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	7,40	7,40	100	100	100
3.	Jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	14	29	49	63	77
4.	Persentase jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik.	4,98	10,32	17,44	22,41	27,40

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
5.	Jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik.	3	3	5	13	48
6.	Persentase jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik.	5,55	5,55	9,26	27,08	100

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal

Mendasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2018 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2014 dan 2015 dimana jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengolah arsip dengan baik sebanyak 7,4%. Persentase jumlah desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 sebanyak 4,98% menjadi 27,40% pada tahun 2018. Sama halnya dengan jumlah OPD yang telah digitalisasi kearsipan dengan baik dari tahun 2014-2018 juga terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 mencapai 100%.

3) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Kearsipan diampu oleh Dinas Arspus. Indikator kinerja Urusan Kearsipan sebanyak 3, sementara programnya sebanyak 3 pula. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kearsipan.

Tabel 2. 141 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						
1	Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik	48	48	48	100	Dinas Arpus	★
2	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan						
1	Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik	48	48	48	100	Dinas Arpus	★
3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi						
1	Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip	48	48	34	70,83	Dinas Arpus	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Arpus, 2019.

Dilihat dari prosentase rata-rata Capaian Kinerja Program (Outcome) Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal untuk Urusan Kearsipan dengan Status Capaian Tinggi, hal ini mengingat jumlah OPD di Kabupaten Tegal sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Ketatalaksanaan (SOTK) yang mulai tahun 2017 mengakibatkan berkurangnya jumlah OPD di Kabupaten Tegal berkurang dari 54 OPD menjadi 48 OPD. Namun pada kenyataannya adalah bahwa seluruh 48 OPD sudah mempunyai ruang arsip dan berfungsi dengan baik atau tercapai 100%.

Sedangkan OPD yang telah melaksanakan digitasi arsip sampai saat ini baru 34 OPD dari 48 OPD atau sekitar 70,83%. Hal ini sudah meningkat bila dibanding dengan tahun 2017 yang baru 18 OPD yang melakukan digitasi arsip. Hal ini karena terbatasnya sarana dan prasarana seperti komputer dan scanner pada tiap – tiap OPD, dan keterbatasan SDM pengelola kearsipan.

Pada tahun 2019 rencana akan dilaksanakan pembinaan untuk menerapkan pengelolaan arsip secara digital di 30 OPD, sehingga target sampai dengan tahun 2019 tercapai.

2.3.3. Fokus Layanan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.441.201 kg. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013-2016). Sedangkan jumlah produksi perikanan di perairan budidaya pada tahun 2017 sebanyak 1.933.115 kg, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2017 mencapai 20,43 kg/perkapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 142 Produksi Perikanan Tahun 2014–2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perikanan laut					
	- Produksi (kg)	866.234	796.631	1.315.879	1.441.201	1.343.621
	- Nilai (Rp 000)	6.875.228	7.447.623	9.436.612	10.603.486	11.343.111
2.	Perairan Umum					
	- Produksi (kg)	143.675	189.390	247.810	209.018	207.802
	-Nilai (Rp 000)	1.263.695	1.786.754	2.920.102	3.686.047	3.116.167
3.	Perikanan Budidaya					
	- Produksi (kg)	1.255.106	2.059.158	1.874.041	1.933.115	2.047.818
	-Nilai (Rp 000)	21.432.905	36.926.775	40.937.539	75.021.353	86.814.081
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	16,14	19,46	20,43	20,43	21,10

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2018

Tabel 2. 143 Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pengolahan hasil perikanan					
	- Produksi (kg)	6.024.607	5.668.973	3.603.151	3.212.586	3.409.674
	- Nilai (Rp.000,-)					

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2018

2) Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2017 jumlah produksi daging mencapai 9.784.502 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 4.69 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016, di mana produksi daging mencapai 9.675.621 kg dan konsumsi daging 4.69 kg/kapita/tahun, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Tegal. Konsumsi telur di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 4,80 kg/kapita/tahun, dengan jumlah produksi sebanyak 10.249.993 kg. Jumlah konsumsi susu di kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 0.43 kg/kapita/tahun. konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 144 Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	6.256.165	6.809.218	9.675.621	9.784.502	10.057.415
	Konsumsi(kg/kapita /th)	4,73	4,61	4,69	4,69	5,79
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.573.686	10.861.860	10.203.264	10.249.993	10.258.158
	Konsumsi(kg/kapita /th)	4,15	4,71	4,80	4,80	6,01
3.	Susu					
	Produksi (kg)	533.563	633.323	713.192	713.428	713.890
	Konsumsi(kg/kapita /th)	0,38	0,42	0,43	0,43	3,53

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal dan BPS Tahun 2018




3) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebanyak 14 dengan 8 program. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh DKPP. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2. 145 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir						
1	Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	8.083.746	11.343.111	140	DKPP	★
2	Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.514.155	86.814.081	573	DKPP	★
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan						
1	Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk	2	2	11	550	DKPP	★
1	Jumlah kegiatan masyarakat pengawasan sumber daya kelautan terlaksana	2	2	12	600	DKPP	★
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut						
1	Jumlah pemberdayaan masyarakat	2	2	3	150	DKPP	★
4	Program pengembangan budidaya perikanan						
1	Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162,510	1.610.100	2.047.818	127	DKPP	★
5	Program pengembangan perikanan tangkap						
1	Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.006.905	1.006.155	1.343.621	133	DKPP	★
6	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan						
1	Persentase penyuluh	93	90	90	100	DKPP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
	perikanan memiliki kompetensi						
2	Jumlah penyuluhan perikanan	18	15	17	113,33	DKPP	★
7	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						
1	Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1006.905	1.006.155	1.343.621	133	DKPP	★
2	Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	8.283.746	8.083.746	11.343.111	140	DKPP	★
3	Jumlah produksi perikanan darat (kg)	162.510	1.610.100	2.047.818	127	DKPP	★
4	Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.564.155	1.5.141.550	86.814.081	573	DKPP	★
8	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar						
1	Penanaman mangrove (Ha)	121	119	119,6	100,50	DKPP	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: DKPP, 2019.

Realisasi capaian target indikator program nilai produksi perikanan laut pada tahun 2018 tercapai sebesar 140 % dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya nilai produksi ini disebabkan karena meningkatnya produksi perikanan laut pada tahun 2018 yang mencapai 1.343.621kg dengan nilai produksi Rp. 11.343.111.000,-

Pada tahun 2018 target indikator nilai produksi perikanan darat tercapai 573% dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya persentase pencapaian target ini disebabkan selain meningkatnya produksi perikanan darat (2.047.818 Kg), juga dipengaruhi oleh harga jual dari beberapa komoditas perikanan yang cukup tinggi salah satunya adalah harga udang vaname.

Persentase capaian target indikator jumlah produksi perikanan darat pada tahun 2018 mencapai 127 % dengan status capaian sangat tinggi. Tingginya persentase pencapaian target produksi perikanan darat ini selain disebabkan karena berkembangnya jumlah pembudidaya ikan dan meningkatnya fungsi dari Balai Benih ikan (BBI). Selain itu juga didukung oleh kegiatan restocking di perairan umum.

B. Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup: (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota; (2). Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan (4). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tegal Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 146 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	37	37	37	37	37
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	597.705	771.697	905.829	1.053.957	950.771
	a. Wisatawan Manca Negara	123	308	1.721	1.470	3.805
	b. Wisatawan Nusantara	597.582	771.389	904.108	1.052.487	946.966
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	199.235	257.232	301.943	351.319	315.655

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2014-2018 sebanyak 37 DTW. Jumlah kunjungan ke-3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tersebut sebanyak 1.053.957 orang pada tahun 2017 dan Jumlah kunjungan wisata tahun 2018 sampai dengan bulan nopember sebanyak 950.771 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 946.966 dan wisatawan mancanegara sebesar 3.805 orang, hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013-2017).

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 147 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2014-2019

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2014	11,05
2	2015	35,18
3	2016	40,57
4	2017	41,23
5	2018	26,63

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal

Capaian tahun 2018 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah menurun. Destinasi obyek wisata yang dikelola masyarakat berkembang sehingga menjadi alternatif daerah kunjungan wisata bagi masyarakat di samping obyek wisata yang dikelola pemda.

1) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Pariwisata diampu oleh Disparpora. Terdapat 3 program dengan 6 indikator kinerja Urusan Pariwisata. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pariwisata pada tahun 2018.

Tabel 2. 148 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
1	Jumlah kunjungan Wisman	289	289	4.658	1771,10	Disparpora	★
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
1	Jumlah promosi pariwisata	4	3	3	100	Disparpora	★
2	Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara	426.081	426.081	1.179.668	278,17	Disparpora	★
4	Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)	1	1	2	200	Disparpora	★
3	Program Pengembangan Kemitraan						
2	Jumlah kampung wisata	4	4	4	100	Disparpora	★
3	Jumlah promosi wisata melalui media massa	3	2	2	100	Disparpora	★

★ Sangat Tinggi → Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disparpora, 2019.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah memenuhi target, yaitu 4.658 orang dibanding target sebanyak 289 orang.. Hal ini

mengindikasikan bila pariwisata di Kabupaten Tegal cukup dikenal wisatawan mancanegara.

Selain itu capaian yang menggembirakan adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari target sebanyak 426.081 orang, terealisasi 1.179.668 orang, atau dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 278,18%). Hal ini juga menunjukkan sektor pariwisata masih berpotensi untuk dikembangkan.

Pada indikator jumlah kampung wisata juga telah melebihi target yang diberikan pada tahun 2018, yaitu terealisasi 4 buah dari target 4 buah pada tahun 2018 ini, juga dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Membangun kampung wisata yang benar-benar eksis memang membutuhkan komitmen dan perhatian semua pihak, terutama pelaku pariwisata di Kabupaten Tegal dan pelaku pariwisata di tingkat nasional dan internasional.

C. Pertanian

1) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 149 Jumlah Penyuluh Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penyuluh PNS :					
	a. Pertanian	88	88	88	108	108
	b. Perikanan	6	6	-	-	-
	c. Kehutanan	15	15	-	-	-
2.	Penyuluh THL - TBPP	81	81	77	49	49
			81	81	81	81
3.	Penyuluh Swadaya :					
	a. Pertanian	44	132	-	-	
	b. Perikanan	15	11	-	-	
	c. Kehutanan	30	30	-	-	
	Jumlah	279	363			

Sumber : DISTANKP, Tahun 2018

Berdasarkan peraturan perundangan baru yang berlaku maka pada tahun 2017 penyuluh pertanian menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyuluh PNS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 93 orang penyuluh, maka di Tahun 2015 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 20 orang penyuluh menjadi 15 orang penyuluh pada Tahun 2015. Adapun penyuluh pertanian relatif tetap.

2) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2018

Tabel 2. 150 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	59.691	64.713	64.819	76.761	64.297
	Luas Panen (ha)	61.575	60.618	62.628	65.499	65.660
	Produksi (ton)	354.538	325.928	382.161	394.023	373.525
	Produktivitas (ton/ha)	5,76	5,38	6,10	6,02	5,69
2.	Jagung					
	Luas Tanam (ha)	16.038	17.650	0/S	12.799	10.028
	Luas Panen (ha)	15.384	15.423	16.141	15.699	7.982
	Produksi (ton)	114.344	100.731	121.994	118.288	45.069
	Produktivitas (ton/ha)	7,43	6,53	7,55	7,53	5,65
3.	Kedelai					
	Luas Tanam (ha)	43	35	92	68	151
	Luas Panen (ha)	43	31	90	60	104
	Produksi (ton)	59	49	166	108	154
	Produktivitas (ton/ha)	1,35	1,58	1,86	1,81	1,48
4.	Ketela Pohon					
	Luas Tanam (ha)	572	480	387	292	286
	Luas Panen (ha)	564	501	501	287	259
	Produksi (ton)	9.975	9.131	9.122	6.710	5.928
	Produktivitas (ton/ha)	17,68	18,24	18,22	23,35	22,89
5.	Ketela Rambat					
	Luas Tanam (ha)	177	177	83	50	38
	Luas Panen (ha)	168	168	95	55	35
	Produksi (ton)	1.744	1.744	933	637	346
	Produktivitas (ton/ha)	10,40	10,40	10,51	11,56	9,89
6.	Kacang Tanah					
	Luas Tanam (ha)	290	191	199	126	66
	Luas Panen (ha)	290	187	197	135	75
	Produksi (ton)	564	354	494	363	90
	Produktivitas (ton/ha)	1,94	1,89	2,51	2,69	1,20
7.	Kacang Hijau					
	Luas Tanam (ha)	33	159	55	11	9
	Luas Panen (ha)	8	142	58	14	0
	Produksi (ton)	7	167	60	16	0
	Produktivitas (ton/ha)	0,96	1,17	1,04	1,20	0
	Sayuran dan Buah Semusim					
1.	Bawang Merah					
	Luas Tanam (ha)	2.548	2.272	1.783	1.926	2.414
	Luas Panen (ha)	2.060	2.518	2.091	1.884	2.323
	Produksi (ton)	243.412	284.775	212.204	19.828	248.276

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Produktivitas (ton/ha)	11,82	11,31	10,15	10,52	106,86
2.	Cabe					
	Luas Tanam (ha)	539	484	303	327	360
	Luas Panen (ha)	536	543	353	328	397
	Produksi (ton)	4.628	3.994	3.130	3.581	38.705
	Produktivitas (ton/ha)	8,63	7,35	8,87	10,92	97,49
3.	Kentang					
	Luas Tanam (ha)	485	406	418	459	409
	Luas Panen (ha)	418	481	348	548	406
	Produksi (ton)	4.256	4.723	3.761	11.866	87.160
	Produktivitas (ton/ha)	10,18	9,83	10,81	21,65	214,68
4.	Kubis					
	Luas Tanam (ha)	1.214	1.280	1.179	1.162	1.090
	Luas Panen (ha)	1.190	1.280	1.276	1.202	1.108
	Produksi (ton)	17.545	17.445	21.313	22.619	197.015
	Produktivitas (ton/ha)	14,74	13,63	16,70	18,82	177,81
5.	Semangka					
	Luas Tanam (ha)	130	111	109	123	72
	Luas Panen (ha)	127	114	109	123	72
	Produksi (ton)	2.134	1.405	1.389	1.689	7.185
	Produktivitas (ton/ha)	16,80	12,32	12,74	13,73	99,79
	Tanaman Hias					
1.	Melati					
	Luas Tanam (ha)	2	13	1	-	10.000
	Luas Panen (ha)	371	338	337	341	3.419.250
	Produksi (ton)	9.542	8.505	5.807	4.796	5.263.728
	Produktivitas (ton/ha)	25,70	25,17	17,23	14,07	1,54
	Perkebunan Rakyat					
1.	Kelapa Dalam					
	Luas Tanam (ha)	4.575	4.286	4.186	3.665	3.370,66
	Luas Panen (ha)	2.399	2.383	2.283	2.123	2.027,40
	Produksi (ton)	1.774	2.257	2.155	1.887	1.807,94
	Produktivitas (ton/ha)	0,74	0,95	0,94	0,89	891,75
2.	Cengkeh					
	Luas Tanam (ha)	1.065	1.220	1.282	1.325	1.323,48
	Luas Panen (ha)	690	662	768	765	764,17
	Produksi (ton)	103	122	85	140	140,31
	Produktivitas (ton/ha)	0,15	0,18	0,11	0,18	183,61
3.	Teh					
	Luas Tanam (ha)	158	171	163	163	164,73
	Luas Panen (ha)	121	122	121	129	128,43
	Produksi (ton)	36	24	35	35	35,06
	Produktivitas (ton/ha)	0,30	0,20	0,29	0,27	273,02
4.	Tebu					
	Luas Tanam (ha)	5.130	5.458	3.548	3.265	2.687,30
	Luas Panen (ha)	5.130	5.458	3.548	3.265	2.669,18
	Produksi (ton)	19.713	18.997	15.872	14.299	30.912,06
	Produktivitas (ton/ha)	3,84	3,48	4,47	4,38	11,58

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2018

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2010–2014 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2012 produktivitas mencapai 5,94 ton/ha dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 5.76 ton/ha.Sedangkan untuk produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Pada tahun 2014 produktivitastanaman hias mencapai 25,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2011, 2012 masing-masing mencapai 3,50 ton/ha, 3,07 ton/ha.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas.

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\sum (P_i \times H_i)$).

Tabel 2. 151 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			-
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber Data : KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2018

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2017 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 215.027, 25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa :

- Untuk Tahun 2017 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

3) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 12,50% dan berdasar harga konstan mencapai 11,88% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.82. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel 2.80 di bawah ini.

Tabel 2. 152 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2013-2017

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	3.468.079,63	3.565.019,14	3.879.322,43	4.114.690,91	3.755.551,54
	- ADH Konstan	2.878.663,32	2.755.341,24	2.832.654,60	2.935.344,86	2.657.779,26
2.	Jumlah PDRB:					

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017*
	- ADH Berlaku	20.767.110,98	23.108.651,43	25.590.642,44	27.727.792,98	30.044.412,28
	- ADH Konstan	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	16,70	15,43	15,16	14,84	12,50
	- ADH Konstan	15,95	14,53	14,17	13,80	11,88

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

*

4) Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2017 jumlah produksi daging mencapai 9.784.502 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 4.69 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016, di mana produksi daging mencapai 9.675.621 kg dan konsumsi daging 4.69 kg/kapita/tahun, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Tegal. Konsumsi telur di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 4,80 kg/kapita/tahun, dengan jumlah produksi sebanyak 10.249.993 kg. Jumlah konsumsi susu di kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 0.43 kg/kapita/tahun. konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 153 Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu Tahun 2014– 2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	4.277.163	6.256.165	6.809.218	9.675.621	9.784.502
	Konsumsi (kg/kapita/th)	4,04	4,73	4,61	4,69	4,69
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.426.944	10.573.686	10.861.860	10.203.264	10.249.993
	Konsumsi (kg/kapita/th)	3,12	4,15	4,71	4,80	4,80
3.	Susu					
	Produksi (kg)	623.002	533.563	633.323	713.192	713.428
	Konsumsi (kg/kapita/th)	0,47	0,38	0,42	0,43	0,43

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal Tahun 2018

5) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Pertanian diampu oleh Distankp dan DKPP. Urusan Pertanian terdiri dari 10 program dan 33 indikator kinerja. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pertanian pada tahun 2018.




Tabel 2. 154 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
----	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------	---------------------

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
1	Jumlah sistem insentif pertanian	10	10,00	11,00	110,00	Dinas Tan & KP	★
2	jumlah petani yang terlatih pertahun	50	50,00	130,00	260,00	Dinas Tan & KP	★
3	Nilai Tukar Petani	112	111,00	108,36	97,62	Dinas Tan & KP	★
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						
1	Jumlah pasar induk pertanian	1	1,00	0	0	Dinas Tan & KP	↓
2	Jumlah promosi produk pertanian	4	4,00	4	100,00	Dinas Tan & KP	★
3	Jumlah petani bekerjasama dengan pelaku agribisnis	90	90,00	300	333,33	Dinas Tan & KP	★
4	Jumlah sarana prasarana infrastruktur pertanian	20	20,00	307	1.535,00	Dinas Tan & KP	★
5	Jumlah sistem informasi potensi pertanian	2	2,00	2	100,00	Dinas Tan & KP	★
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan						
1	Jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan	3	3,00	3	100,00	Dinas Tan & KP	★
2	Jumlah penyuluhan TTG	4	4,00	5	125,00	Dinas Tan & KP	★
3	Jumlah Rumah Pintar Petani (RPP)	5	4,00	15	375,00	Dinas Tan & KP	★
4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan						
1	Jumlah produksi padi (ton) (GKG)	356.538	358.538	366.255	102,15	Dinas Tan & KP	★
2	Jumlah produksi jagung (ton)	115.344	116.344	115.450	99,23	Dinas Tan & KP	→
3	Jumlah produksi bawang merah (ton)	25.341	26.341	16.196	61,49	Dinas Tan & KP	★
4	Jumlah produksi kentang (ton)	4.456	4.656	8.020	172,25	Dinas Tan & KP	★
5	Jumlah produksi cabe (ton)	4.828	5.028	2.643	52,57	Dinas Tan & KP	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
6	Jumlah produksi kelapa (ton)	1.780	1.780	1.814	101,91	Dinas Tan & KP	★
7	Jumlah produksi cengkeh (Ton)	106	110	110,22	100,20	Dinas Tan & KP	★
8	Jumlah produksi Teh (Ton)	46	56	56,40	100,71	Dinas Tan & KP	★
9	Jumlah produksi Gula (Ton)	9.486	9.516	7.516	78,99	Dinas Tan & KP	➡
10	Persentase RDKK yang diimplementasikan disusun tepat waktu (April)	100	100	100	100	Dinas Tan & KP	★
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perke bunan lapangan						
1	Jumlah Penyuluh yang Lulus Sertifikasi	58	48	41	107,89	Dinas Tan & KP	★
2	Jumlah Penyuluh Swadaya	187	165	173	110,71	Dinas Tan & KP	★
6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						
1	Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT	1,14	1,14	1,14	100,00	DKPP	★
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan						
1	Jumlah produksi daging (kg)	5.808.587	5.803.587	10.057.415	173,30	DKPP	★
2	Jumlah produksi susu (liter)	719.950	718.950	713.428	99,23	DKPP	★
3	Jumlah produksi telur (kg)	4.954.109	4.949.109	10.247.993	207,07	DKPP	★
8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						
1	Konsumsi daging (Kg/kapita/tahun)	10,10	10,10	5,79	57,33	DKPP	↓
2	Konsumsi telur (Kg/kapita/tahun)	3,50	3,50	6,02	172,00	DKPP	★
3	Konsumsi susu (Kg/kapita/tahun)	6,40	6,40	3,53	55,16	DKPP	↓
9	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Persentase Capaian Kinerja 2017	SKPD	Status Kinerja 2017
	1	Jumlah penerapan TTG peternakan	3	2,00	2,00	100,00	DKPP	★
10	Program Pengembangan Peternakan							
	1	Jumlah Ternak terpelihara di Taman Satwa	28	24,00	70,00	269,23	DKPP	★

 Sangat Tinggi
 Tinggi, Sedang
 Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Dinas Tan & KP; DKPP, 2019.

Capaian kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dapat dilihat dari salah satu alat ukur yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan Nilai Tukar Petani selama tahun 2018 (NTP= 108,36) berada di bawah target RPJMD senilai (NTP= 111). Hal ini berarti kemampuan/daya beli petani pada periode tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan keadaan pada tahun dasar, namun bila dibandingkan target NTP Tahun 2018 belum tercapai.

Pencapaian indikator produksi komoditas pertanian sangat fluktuatif, adakalanya pada tahun tertentu suatu komoditas dapat terpenuhi, namun pada tahun yang lain tidak dapat terpenuhi dari terget yang telah ditetapkan. Contoh kasus untuk produksi cengkeh pada tahun 2017 sama sekali tidak berproduksi, namun pada tahun 2018 produksinya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini faktor alam dan iklim sungguh masih sangat dominan terhadap produk-produk pertanian.

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019, program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak mempunyai indikator : Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT (Organisma Penyakit Tanaman) dengan target tahun 2018 sebesar 1,14 Hektar. Pada kenyataannya Indikator tersebut tidak mencerminkan output dari kegiatan-kegiatan yang ada pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak atau dengan kata lain penggunaan indikator program kurang tepat.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak lebih tepat menggunakan indikator persentase ternak tervaksinasi atau persentase ternak terobati. Oleh karena itu data capaian target indikator program tidak dapat disajikan karena data penurunan intensitas luas serangan OPT pada Dinas KPP tidak tersedia.

Pada tahun 2018, persentase capaian target indikator program peningkatan produksi hasil peternakan antara lain jumlah produksi daging (kg), jumlah produksi susu (liter), dan jumlah produksi telur (kg) tercapai dengan status pencapaian sangat tinggi bahkan jumlah produksi daging dan telur tercapai lebih dari 100%. Peningkatan produksi hasil peternakan ini didukung beberapa kegiatan antara lain kegiatan sentra peternakan rakyat, peningkatan sarana prasarana RPH penusupan dan pengolahan hasil peternakan.

Pada tahun 2018 persentase capaian target indikator program belum tercapai secara maksimal. Indikator konsumsi daging (Kg/kapita/tahun) dan

konsumsi telur dan susu (Kg/kapita/tahun) mendapat status capaian sangat rendah. Bahwasanya standar konsumsi protein hewani yang ditetapkan FAO, minimal enam gram/kapita/hari atau setara daging sebanyak 10,1 kg, telur 3,5 kg, dan susu 6,4 kg/kapita/tahun. Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi daging dan susu di Kabupaten Tegal masih tergolong sangat rendah atau masih dibawah standar FAO. Sedangkan untuk tingkat konsumsi telur sudah melebihi standart international (minimal).

Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian pada indikator konsumsi daging dan konsumsi susu ini disebabkan karena harga daging dan susu yang relatif lebih mahal dan juga faktor daya beli masyarakat yang masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konsumsi daging dan susu antara lain melalui kampanye gemar makan daging dan minum susu.

D. Perdagangan

1) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal dari tahun 2013 sampai tahun 2016 meningkat tetapi tahun 2017 mengalami penurunan akibat meningkatnya nilai impor. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 155 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2013- 2017

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai Ekspor	111.280.610	147.007.019	153.188.157.270	209.619.490.505	228.638.224.198
2.	Nilai Impor	21.239.567	20.782.118	64.630.930.460	16.312.612.489	54.801.884.058
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor - Nilai Impor)	90.041.043	126.224.901	88.557.226.810	193.306.878.015	173.836.380.139

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 2018

2) Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 15,73% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 29,13%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan dengan tren yang stabil meningkat, maka sektor perdagangan selainya menjadi sektor utama yang dikembangkan. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor

pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 156 Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor):					
	- ADH Berlaku	1.557.777,79	1.757.421,40	1.935.916,03	2.101.862,50	4.725.986,05
	- ADH Konstan	1.418.500,50	1.482.494,95	1.564.698,24	1.648.467,47	3.872.572,30
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	20.767.110,98	23.108.651,43	25.590.642,44	27.727.792,98	30.044.412,28
	- ADH Konstan	18.050.291,97	18.958.841,04	19.992.675,45	21.265.717,23	21.265.717,23
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) thd PDRB					
	- ADH berlaku	16,49	15,96	15,63	15,42	15,73
	- ADH Konstan	17,55	17,57	17,35	17,16	17,31

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2017

3) Hasil evaluasi sampai tahun 2018

Urusan Perdagangan terdiri dari 16 indikator kinerja dan 4 program. Urusan perdagangan diampu oleh Disdagkop UKM. Berikut indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perdagangan pada tahun 2018.

Tabel 2. 157 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan						
1	Jumlah lembaga perlindungan konsumen	5	5,00	5,00	100	Disdagkop UKM	★
2	Persentase pengaduan konsumen ditangani	90	80	90	112	Disdagkop UKM	★
3	Persentase alat ukur yang ditera	85	80	90	112	Disdagkop UKM	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						
1	Nilai ekspor non migas (Rp)	119.000.000	119.280.610	169.760.204	142,32	Disdagkop UKM	★
2	Volume ekspor non migas (ton)	210	195	61	31	Disdagkop UKM	↓
3	Ekspor bersih perdagangan (Rp)	101.000.000	100.000.000	199.306.877	199,31	Disdagkop UKM	★
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						
1	Jumlah pasar lelang daerah	1	1	1	100	Disdagkop UKM	★
2	Jumlah sistem informasi perdagangan	1	1	1	100	Disdagkop UKM	★
3	Jumlah pasar tradisional yang representatif	10 Pasar	8 Pasar	10 pasar	125	Disdagkop UKM	★
4	Jumlah retribusi pasar	26 Pasar	26 Pasar	26 Pasar	100	Disdagkop UKM	★
5	Jumlah alat kebersihan pasar	5 Unit	5	5	100	Disdagkop UKM	★
4	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan						
1	Jumlah kelompok pedagang kaki lima	55	50	60	110	Disdagkop UKM	★
2	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dibina	14	12	18	150	Disdagkop UKM	★
3	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	6.560	6.360	6.360	100	Disdagkop UKM	★
4	Jumlah kawasan PKL dan asongan	30	28	30	120	Disdagkop UKM	★
5	Jumlah kawasan PKL dan asongan yang dibina	20	15	12	80	Disdagkop UKM	➡

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disdagkop UKM, 2019.

Jumlah Pasar Tradisional yang representatif (sudah dilakukan perbaikan) dari target 8 pasar, sampai dengan tahun 2018, sudah 10 pasar yang representatif atau 125%, yaitu pasar Trayeman, Kemantran, Pagongan / Pepedan, Kedungsukun, Pangkah, Jatipuro, Lebaksiu, dan Bojong. Pasar Lebaksiu, Kesambi, Banjaranyar dan Bojong dianggap cukup representatif karena secara fisik sudah bagus tinggal penyempurnaan.

Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran yang tersedia, namun demikian ada permasalahan yaitu Pembangunan Pasar Lebaksiu tahun anggaran 2018 secara kontrak sudah selesai 100 % dan dapat berfungsi, namun secara perencanaan belum tuntas, sehingga perlu anggaran tambahan untuk penyempurnaannya.

E. Perindustrian

1) Produk Lokal dan Lembaga Usaha yang Terstandarisasi

Kabupaten Tegal memiliki potensi industri yang sangat besar baik industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil maupun Aneka. Potensi Industri tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Tegal. Dalam upaya mempersiapkan daya saing ekonomi daerah perlu adanya standarisasi produk dan lembaga usahanya. Peningkatan standarisasi produk dan Lembaga usaha dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 158 Produk Lokal dan Lembaga Usaha yang Terstandarisasi Tahun 2014 - 2018

Uraian	Kondisi Per Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Produk Lokal dan Lembaga Usaha yang Terstandarisasi	0.10%	0.10%	0.13%	0.13%	0.17%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018

2) IKM yang memperoleh Legalitas Usaha

Sektor industri di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri makanan, tekstil dan mesin. Industri makanan terutama didorong oleh adanya pabrik teh yang berskala nasional, serta industri kecil dan menengah yang memproduksi makanan ringan serta tempe dan tahu. Pertumbuhan industri makanan sangat pesat, untuk menjalan usahanya perlu adanya legalitas usaha dalam operasionalnya. Perkembangan IKM dibidang industri dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 159 IKM yang memperoleh Legalitas Usaha Tahun 2014- 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
--------	------	------	------	------	------

IKM yang memperoleh Legalitas Usaha	0.32%	0.39%	N/A	0.43%	0.45%
-------------------------------------	-------	-------	-----	-------	-------

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018

3) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Disperinaker dengan 4 program dan 5 indikator kinerja. Berikut tabel indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perindustrian pada tahun 2018.

Tabel 2. 160 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						
1	Jumlah pembinaan IKM	45	35	145	362,50	Disperinaker	★
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						
1	Jumlah Izin Usaha IKM Baru	35	30	94	313,33	Disperinaker	★
2	Jumlah kerjasama IKM	16	14	14	100	Disperinaker	★
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						
1	Jumlah produk SNI	12	9	7	77,78	Disperinaker	➡
4	Program Penataan Struktur Industri						
1	Jumlah klaster industri aktif	17	11	14	127,27	Disperinaker	★

★ Sangat Tinggi ➡ Tinggi, Sedang ↓ Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperinaker, 2019.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dilaksanakan oleh Disperinnaker dengan sasaran capaian jumlah pembinaan IKM. Oleh Disperinnaker, capaian sasaran jumlah pembinaan IKM ini tidak hanya dilakukan melalui program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi saja, Ketiga program lain juga turut menunjang untuk capaian sasaran ini. Dari target 35 IKM, jumlah IKM yang dibina pada tahun 2018 telah melebihi target dengan jumlah sebanyak 145 IKM yang meliputi 31 IKM Makanan Minuman di klaster makanan yang mendapat fasilitasi PIRT, 15 IKM Kabupaten Tegal penerima sertifikasi halal, 14 IKM penerima fasilitasi pendaftaran merk, 2 IKM yang mendapat pendampingan GKM, 3 IKM pendampingan pelatihan ISO, 20 IKM Pelatihan motivasi berprestasi, dan untuk pelatihan peningkatan teknologi dan kualitas produksi 20 IKM Batako, dan 20 IKM meubel. Sedangkan untuk Pelatihan keterampilan anyaman bamboo 20 IKM.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, memiliki capaian sasaran terselenggaranya Tasyakuran dalam rangka HUT Dekranas ke-38 Tahun 2018 dan keikutsertaan dalam Rakernas Dekranas 2018 serta Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) di JCC Senayan. Dalam pameran Kriya Nusa ini produk yang dipamerkan adalah batik tegalan, kain jumputan, dan kerajinan tas. IKM Batik yang diikuti diantaranya Arbat Collection dan Tirana Batik dengan perolehan omset dari kegiatan pameran ini mencapai Rp 16.100.000,-. Selain itu IKM batik Kab. Tegal juga ikut serta dalam pameran Hari Jadi Jateng ke - 68 di Pemalang yang diikuti beberapa IKM kerajinan diantaranya batik, kain jumputan, kerajinan kayu dll serta ikut serta dalam lomba desain motif batik untuk kategori pelajar dan umum.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, capaian kinerja pada masih belum optimal, tercapai 7 jumlah produk SNI atau yang setara (BSN), dan masih dalam proses dari target sebanyak 9 produk SNI. Kendala utama tidak tercapainya sasaran program ini karena prosedur persyaratan untuk memperoleh SNI sangat rumit. Sektor IKM utamanya industri kecil, masih banyak kelemahan dari sisi produksi dan manajemen. Disperinaker telah melakukan pembinaan rangka peningkatan kualitas produk baik melalui pendampingan-pendampingan. Sebagai rencana tindak lanjutnya adalah bekerja sama dengan BSN untuk memfasilitasi sertifikat SNI bagi pelaku usaha lainnya di Kabupaten Tegal salah satunya IKM Bola Kaki yang telah mendapat sertifikasi SNI dari BSN yang bekerjasama dengan UPS Tegal.

Program Penataan Struktur Industri, menargetkan ada 11 klaster industri aktif pada tahun 2018. Secara umum, klaster industri di Kabupaten Tegal sudah berjalan namun belum optimal karena luasnya cakupan rantai nilai dalam klaster. Agar lebih optimal, dalam membina klaster industri, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perinnaker berfokus pada pendekatan sentra atau Kelompok Usaha Bersama. Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan fasilitasi HAKI bagi IKM dalam klaster / sentra dan penerapan GKM.. Klaster industri existing ada di Kabupaten Tegal adalah klaster industri komponen kapal, shuttlecock, komponen otomotif, batik, makanan ringan, tahu dan kerupuk mie. Sementara klaster / kelompok baru yang terbentuk diantaranya : Pagubuyuban IKM MAPAN, Kelompok Pengrajin Otomotif Tegal Manufacture Part dan Kelompok Pengrajin Makanan Sentra Pariwisata Kecamatan Bojong dan Bumijawa, Kelompok Pengrajin bahan bangunan di Desa Tuwel, dan Meubel di Balapulang.

F. Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Adapun jumlah transmigran yang diberangkatkan selama Tahun 2014-2018 sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 2. 161 Jumlah Transmigran Tahun 2014 - 2018

Tahun	Lokasi	Jumlah	
		KK	Jiwa
2014	Kab Konawa Utara Sulawesi Tenggara	4	15
2015	Kab Bangka Barat Bangka Belitung	6	23
2016	Kab Pahuwato Provinsi Gorontalo	3	8
	Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo	4	14
2017	Kab Kolaka Timur Sulawesi Tenggara	2	13
	Kab Bukit Aren Provinsi Gorontalo	2	8
2018	Kab Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	3	15
JUMLAH		24	96




Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2018

1) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan transmigrasi terdiri dari 1 program dengan 2 indikator kinerja. Urusan Transmigrasi diampu oleh Disperinaker. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2018.

Tabel 2. 162 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018	
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi							
	1	Jumlah kerjasama transmigrasi	1	1	1	100	Disperinaker	★
	2	Jumlah transmigran	67	62	62	100	Disperinaker	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Disperinaker, 2019.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Untuk memberikan kesempatan pada masyarakat/keluarga yang tidak mempunyai aset/fasilitas tapi memiliki kemampuan untuk bekerjaterutama mengelolahan di bidang tanah dimungkinkan untuk mengikuti Transmigrasi diluar pulau Jawa. Capaian jumlah transmigran tahun 2018 adalah 3 KK dengan jumlah 13 jiwa. Secara komulatif jumlah sampai dengan 2018 adalah 62 KK, dimana sampai dengan tahun 2017 sudah diberangkatkan sebanyak 59 KK transmigran.

Adapun kerja sama yang dilakukan dengan daerah transmigrasi sebanyak 1 kerja sama yaitu dilakukan dengan lokasi wilayah transmigrasi yaitu Kabupaten Gorontalo Sulawesi Utara (Desa Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo).

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1) Perencanaan Penganggaran Pogram

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down & bottom-up. Perencanaan dan penganggaran program adalah untuk memastikan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan. Adapun pencapaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dan diharapkan 5 tahun kedepan dengan target 100% dapat diwujudkan.

Tabel 2. 163 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Disusun Tepat Waktu Tahun 2014-2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Berdasarkan data diatas maka penyusunandokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang.

2) Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi stakeholder rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial sesuai tahapan dalam tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut .:

Tabel 2. 164 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Keselaras Dokumen Perencanaan Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Pemkesos (%)	94	95	96	96	97

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

Tingkat keselarasn dokumen perencanaan daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

3) **PerencanaanPerekonomian dan Pengembangan Infrastruktur**

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerahyaitu Renja OPD di bidang perekonomian dan infrastruktur dapat menghasilkan kondisiperekonomian dan infrastruktur daerah yang baik sesuai dengan harapan masyarakat.Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur adalah untuk menghasilkan keselarasndokumen RKPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan Renja OPDpada rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur. Dengan keselarasn tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi dan kondisi infrastruktur di kabupaten Tegal. Tingkat keselarasn dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perangkat daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur sesuai tahapan dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 2. 165 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur T ahun 2014-2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Keselarasn Dokumen Perencanaan Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Ekbangtur (%)	94	94	95	96	96

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal,2018

Keselarasn dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun

perekonomian dan pengembangan infrastruktur belum dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat perbedaan dalam penerapan detail teknis kegiatan khususnya yang menyangkut konstruksi bangunan.

4) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk mengendalikan kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan dan mengevaluasi capaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian operasional kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta evaluasi kinerja pembangunan. Hasil pencapaian kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan serta capaian indikator pembangunan sesuai target dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 166 Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata - Rata Deviasi Capaian Kinerja Fisik (%)	18,05	20,88	17,21	13,75	15,05
2.	Rata - Rata Deviasi Capaian Kinerja Keuangan (%)	29,01	34,80	28,59	22,73	21,86
3.	Rata - Rata Deviasi (%)	23,53	27,84	22,90	18,24	18,46
4	Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan (%)	76,47	72,16	77,1	81,76	81,54

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2018

Tingkat kesesuaian rencana dan Realisasi Kegiatan dicerminkan dengan adanya rata-rata deviasi kegiatan yang dicapai. Semakin kecil deviasi antara rencana dan realisasi kegiatan semakin baik kinerja kegiatan pembangunan. Berdasarkan Tabel diatas, tingkat kesesuaian antara rencana dan realiasi kegiatan dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat. Namun dengan rata- rata deviasi kegiatan masih diatas 18% masih perlu upaya keras untuk mencapai deviasi dibawah 10%. Rata- rata deviasi kegiatan tahun 2015 masih tinggi disebabkan realisasi fisik dan keuangan tahun 2015 hanya mencapai 69,65 % karena banyak kegiatan infrastruktur strategis yang tidak terlaksana atau tidak selesai.

Tabel 2. 167 Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Sesuai Target Tahun 2014-2018

No	Indikator Pembangunan	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Indikator sasaran tercapai	123	123	132	159	178
	Jumlah Indikator sasaran	200	200	200	200	200
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	61,50	61,50	66,00	79,50	89,00
2.	Jumlah Indikator Program Tinggi/Sangat Tinggi	300	323	335	357	402
	Jumlah Indikator Program	518	518	518	518	518
	<i>Tingkat Capaian Tinggi/Sangat Tinggi (%)</i>	57,92	62,36	64,67	68,92	77,61
3.	Jumlah IKD tercapai	148	153	177	196	253
	Jumlah IKD	315	315	307	307	307
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	46,98	48,57	57,65	63,84	82,41
4.	<i>Tingkat Capaian Indikator Sesuai Target (%)</i>	55,47	57,48	62,78	70,75	83,01

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2018

Tingkat capaian indikator pembangunan sesuai target dapat dijadikan ukuran kinerja pembangunan yang dicerminkan dengan rata-rata indikator pembangunan yang tercapai baik indikator sasaran, indikator program maupun indikator kinerja daerah. Dengan tingkat ketercapaian > 80% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan di masa mendatang.




5) Hasil evaluasi RKPd sampai tahun 2018

Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 9 program dan 9 indikator kinerja. Urusan Perencanaan Pembangunan diampu oleh Bappeda dan BPBD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2018.

Tabel 2. 168 Evaluasi Kinerja Program RKPd Tahun 2018 Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Program Pengembangan data/informasi						
	1 Jumlah sistem informasi daerah aktif	3	3	3	100	Bappeda & Litbang	★
2	Program Kerjasama Pembangunan						
	1 Jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan	5	5	7,00	140,00	Bappeda & Litbang	★

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh						
1	Jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti	4	4	4	100	Bappeda & Litbang	★
4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar						
1	Cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan	18	16	16,00	100	Bappeda & Litbang	★
5	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah						
1	Jumlah aparatur perencana kabupaten yang memiliki kompetensi perencana	15	14	15,00	107,14	Bappeda & Litbang	★
6	Program perencanaan pembangunan daerah						
1	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	11	2	2,00	100,00	Bappeda & Litbang	★
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi						
1	Jumlah klaster yang difasilitasi	30	20	20,00	100,00	Bappeda & Litbang	★
8	Program perencanaan sosial budaya						
1	Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	5	5	6,00	120,00	Bappeda & Litbang	★
9	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana						
1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	2	2	6,00	100,00	BPBD	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: Bappeda & Litbang, BPBD, 2018

Indikator jumlah sistem informasi daerah aktif teralisasi 3 sistem informasi daerah aktif dari target kinerja 3 sistem informasi daerah aktif, atau

dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Sistem informasi daerah aktif meliputi SIPD (Sistem Informasi Profil/Pembangunan Daerah), SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Simas (Sistem Informasi Masyarakat Miskin). Kendala yang dihadapi dalam penyediaan sistem informasi daerah aktif adalah kurangnya SDM, komunikasi dan ketidaksepehaman dalam berjejaring dengan SKPD terkait.

Untuk indikator jumlah kerjasama pembangunan yang memanfaatkan tercapai 7 kerjasama dari target 5 kerjasama dengan demikian indikator ini berpredikat Sangat Tinggi (tercapai 140%). Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama pembangunan dengan IPB, BPPT, Kemendikbud, UPS, UGM, Unsoed dan Universitas Guna Dharma. Pada indikator jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti belum ada. Hal ini karena kebijakan yang ada saat ini masih bersifat makro (dalam lingkup Kabupaten) dan belum ada kebijakan satu sektor (lingkup kecamatan). Sedangkan indikator cakupan Pelayanan SPAM di Kota Kecamatan telah tercapai 16 Kecamatan dari target 12 kecamatan atau dengan predikat Sangat Tinggi (tercapai 133,33%). Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator ini adalah beberapa kecamatan memiliki kontur yang relatif susah untuk penyediaan SPAM dan belum disertai adanya saluran SPAM di setiap kecamatan.

Jumlah Aparatur Perencana Kabupaten yang memiliki kompetensi perencana adalah 12 orang, telah mencapai target yaitu 12 orang dengan status kinerja Sangat Tinggi (tercapai 100%). Permasalahan yang dihadapi adalah minat yang rendah terhadap jabatan fungsional termasuk fungsional perencana. Untuk itu rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu dengan arahan dan dorongan dari pimpinan kepada karyawan/wati agar mengikuti diklat fungsional dimaksud.

Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu ada 2, yaitu RKPD dan RKPD Perubahan. Untuk mewujudkan indikator ini reaktif tidak ditemui hambatan.

Indikator jumlah klaster yang difasilitasi adalah 25 klaster, sementara target indikator ini sebanyak 20 klaster. Pelaksanaan indikator ini melalui program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (FEDEP). Permasalahan yang dihadapi adalah keseriusan semua pihak dalam upaya mempertahankan klaster dan meningkatkan status sentra menjadi klaster.

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan sebanyak 6 dokumen terdiri dari RAD MDG's, RAD PUS, SPKD, RAD PPK (RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), Masterplan TIK, dan Kajian Pengembangan Situs Semedo. Jumlah ini di atas target sebanyak 5 dokumen, sehingga capaian kinerjanya Sangat Tinggi (tercapai 120%). Indikator ini dicapai melalui kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Sementara untuk indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana telah tercapai 6 dokumen dari target 2 dokumen.

B. Keuangan dan Aset Daerah

1) Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Dalam Pengelolaan Keuangan daerah terdapat fungsi Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan yang antara lain mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, berikut data capaian 5 tahun terakhir terkait indikator capaian Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 2. 169 Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2014 - 2018.

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (%)	90	92	93	95	95
2	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal tahun 2019

Capaian kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam tahun 2018 dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Namun untuk ketepatan penerbitan Sp2D secara tepat waktu belum bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan administrasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator sasaran RPJMD tahun 2014-2019, berikut data capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 170 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasa Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal tahun 2019

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2016 atau sudah 3 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, BPK masih menemukan beberapa permasalahan namun dampak permasalahan tersebut tidak material dalam

mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

2) Penyusunan Anggaran Daerah

APBD harus disusun mengikuti ketentuan Permendagri No 13 tahun 2006, dimana APBD harus disusun tepat waktu. Berikut capaian kinerja Program Penyusunan Anggaran Daerah 5 tahun Tahun 2014 - 2018.

Tabel 2. 171 Capaian Indikator Program Penyusunan Anggaran Daerah Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasi Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
APBD tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
APBD-P tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
b. SKPD yg Mengumpulkan RKA SKPD tepat waktu sesuai SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	5	10	15	20	25
c. RKA SKPD yg sesuai dengan SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA (%)	50	55	60	65	70

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal tahun 2018.

Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan.

3) Pengelolaan Barang Milik / Aset Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 tersebut maka dirata-rata menjadi indikator Pengelolaan BMD yang baik dan benar, berikut capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 172 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasi Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar (%)	20	30	40	50	60

Indikator	Realisasi Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah OPD yang telah mengelola BMD yang baik dan benar	11	17	22	24	24
Jumlah seluruh OPD	56	56	56	48	48

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal tahun 2018.

Dalam 5 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 60%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik /aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

4) Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan

Perencanaan, pengendalian dan operasional pendapatan melakukan upaya survei untuk mengidentifikasi laporan pajak daerah. Berikut data kinerja selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 173 Capaian Kinerja Realisasi Perencanaan Pendapatan Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasa Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Realisasi perencanaan pendapatan (%)	56,21	72,10	82,27	84,21	88,27

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal tahun 2019.

Perencanaan dan monev yang tertib dan terkendali masih kurang ditandai dengan persentase laporan pajak daerah yang tersaji belum teridentifikasi secara optimal disebabkan oleh keterlambatan didalam pelaporan masing-masing OPD setiap bulannya. Disamping itu juga dikarenakan sistem online perbankan belum sepenuhnya dilaksanakan secara host to host, sehingga terdapat jeda yang akhirnya terdapat selisih angka dan data, meskipun pada akhir periode menjadi sama. Sistem pengelolaan data dan penetapan pajak daerah belum optimal ditandai persentase potensi pajak yang ditetapkan masih kurang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak didalam membayar pajaknya. Untuk itu diperlukan updating data pajak secara menyeluruh dan komprehensif.

5) Pengelolaan PBB dan BPHTB

Pengelolaan PBB dan BPHTB merupakan salah satu pendatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 174 Capaian Kinerja Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasa Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih (%)	87,21	89,34	90,22	91,65	92,35

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal tahun 2019.

penerimaan pajak daerah belum maksimal. Faktornya adalah Kurangnya sosialisasi, publikasi, penyuluhan dan desiminasi ke Wajib Pajak; Spot-spot pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih sangat kurang; dan Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat mobile online, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.

6) Pajak non PBB dan BPHTB

Pajak Non PBB dan BPHTB merupakan salah satu pendatan daerah yang juga perlu ditingkatkan untuk mendukung kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 175 Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasa Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	89,21	89,34	90,22	92,65	93,37

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal tahun 2019.

Penerimaan pajak daerah non PBB dan BPHTB belum maksimal. Faktornya adalah Kurangnya sosialisasi, publikasi, penyuluhan dan desiminasi ke Wajib Pajak; Spot-spot pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih sangat kurang; dan Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat mobile online, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.




7) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Keuangan dari 1 program, 3 indikator dan diampu oleh BPKAD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

Tabel 2. 176 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Keuangan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	SKPD	Status Kinerja 2018
1	Rata-rata waktu Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	100	BPKAD	★
2	Jumlah Peraturan tentang APBD dan aset	7	7	8	100	BPKAD	★
		1 Perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 perbub penjabaran penetapan APBD, 1 perbub penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbub pengelolaan BMD,	1 perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 Perbup Penjabaran Penetapan APBD, 1 Perbub penjabaran perubahan APBD, 1 perbub penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbub pengelolaan BMD,	1 perda APBD, 1 perda perubahan APBD, 1 Perbup Penjabaran Penetapan APBD, 1 Perbub penjabaran perubahan APBD, 1 perbub penggeseran APBD, 1 perda pertanggungjawaban APBD, 1 perbub penjabaran pertanggungjawaban APBD, 1 Perda Pengeolaan BMD			
3	Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	2 (1 SIMDA keuangan dan 1 SIMDA BMD)	4 (1 SIMDA Keuangan Online berbasis cloud server 1 SIMDA BMD) 1 SP2D Online i-btl	5 (1 SIMDA Keuangan Online berbasis cloud server 1 SIMDA BMD) 1 SP2D Online, 1 E-budgeting	125,00	BPKAD	★

 Sangat Tinggi
  Tinggi, Sedang
  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: BPKAD, 2019.

BPKAD sebagai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah mempunyai indikator pada Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Rata-rata waktu Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Jumlah Peraturan tentang APBD dan Aset Daerah
- 3) Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi masing masing 100%, 100% dan 150%.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penunjang pengelolaan pendapatan untuk tahun ini memperoleh prestasi yang patut dibanggakan dalam rangka penggalian pendapatan daerah khususnya pajak bumi dan bangunan yang selama ini tidak pernah mencapai target, tetapi pada tahun 2018 telah mencapai target realisasi sebesar 105,16 % dan untuk BPHTB mencapai target realisasi sebesar 132,44 %.

C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Pendidikan dan Pelatihan ASN

Dengan Program Pendidikan dan Pelatihan ASN diharapkan persentase PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL, persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan sesuai dengan peraturan dan persentase PNS yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dan mendapatkan sertifikat/STTPL akan meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan dukungan anggaran yang cukup karena indeks dari kegiatan-kegiatan ini sudah ditentukan oleh Lembaga Adiminsitrasi Negara (LAN). Sebagai ilustrasi tersaji data jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan PNS yang mengikuti Pelatihan dasar dan pelatihan dalam jabatan.

Tabel 2. 177 Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim	54	24	32	53	37
2.	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional	18	253	374	234	111
3	Jumlah CPNS yang mengikuti Prajabatan	-	373	-	-	252

Sumber : BKD Kabupaten Tegal, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim jumlahnya relatif kecil dalam setiap tahun. Hal ini mengakibatkan sampai dengan tahun 2018, masih terdapat ± 209 pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpim. Jumlah ini akan semakin bertambah apabila dalam kurun waktu 5 tahun kedepan terdapat promosi jabatan. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional jumlahnya perlu ditingkatkan kembali. Sedangkan jumlah CPNS yang belum mengikuti prajabatan sampai

dengan tahun 2018 adalah tidak ada. Hal ini karena adanya moratorium penundaan pengadaan PNS sejak tahun 2015 sehingga tidak setiap tahun diselenggarakan diklat prajabatan.

2) Pengembangan Karir Dan Penilaian Kompetensi ASN

Dengan Program Pengembangan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN diharapkan persentase Jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi, persentase Jabatan Fungsional non guru dan non kesehatan terisi dan persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya akan bertambah secara signifikan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan keras BKD Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang bertugas dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data persentase jabatan struktural terisi, jumlah pejabat fungsional non guru/kesehatan, dan jumlah PNS yang telah mengikuti uji kompetensi mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan persentase PNS yang memiliki kompetensi, persentase jabatan struktural terisi dan persentase jabatan fungsional non guru dan non kesehatan akan bertambah.

Tabel 2. 178 Pengembangan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase jabatan struktural terisi	90 %	91 %	93 %	94 %	85 %
2.	Jumlah pejabat fungsional non guru/kesehatan pengangkatan pertama	-	6	34	22	37
3.	jumlah JPT dan Administrasi yang telah dilakukan uji kompetensi	6	43	1	44	434

Sumber: BKD, 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jabatan struktural terisi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahwa PNS di Kabupaten Tegal mendapatkan jaminan pengembangannya salah satunya melalui promosi dan mutasi jabatan. Sampai dengan tahun 2017, 94 % formasi jabatan sudah terisi, namun Pada tahun 2018 Kabupaten Tegal menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah yang mencalonkan kembali menjadi Calon Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi dan promosi. Hal ini menjadi salah satu kendala adanya kekosongan formasi jabatan sejumlah 147 jabatan. Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/kesehatan mulai tahun 2014-2018 jumlahnya semakin bertambah, namun hal ini belum dapat memenuhi kebutuhan formasi jabatan fungsional non guru/kesehatan.

Uji kompetensi terhadap PNS di Kabupaten Tegal dilakukan dalam rangka melakukan pemetaan kompetensi, sehingga jabatan struktural dapat diisi oleh PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai. Sampai dengan tahun 2018, baru kepala OPD yang menduduki JPT Pratama yang dipastikan sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sedangkan jabatan administrator

dan pengawas belum dilakukan sehubungan dengan kegiatan uji kompetensinya dilakukan pada tahun 2018.

3) Mutasi Dan Pengelolaan Data ASN

Dengan Program Mutasi Dan Pengelolaan Data ASN diharapkan persentase sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, persentase realisasi SK Kenaikan Pangkat yang tepat waktu dan tepat bayar dan persentase realisasi SK Pensiun tepat waktu akan tercapai. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras khususnya dari BKD Kabupaten Tegal dan pihak-pihak yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data jumlah SK Kenaikan Pangkat, Jumlah SK Pensiun dan jumlah SIM Kepegawaian yang sudah terbangun mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan kepada ASN di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 179 Data Pengelolaan ASN

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah SIM Kepegawaian	1	-	6	1	1
2.	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	986	994	1.012	1.036	1.565
3.	Jumlah SK Pensiun	274	258	439	463	491

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SIM Kepegawaian yang sudah terbangun sejumlah 9 SIM, dan masih terdapat ± 3 SIM yang harus dibangun dalam rangka menunjang layanan kepegawaian. Sedangkan SIM kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan SIMPEG sejumlah 3 SIM. Jumlah PNS dan CPNS tiap tahun pertumbuhannya selalu berkurang karena jumlah PNS pensiun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penambahan pegawai/CPNS, hal ini karena adanya moratorium penundaan pengadaan pegawai sebagaimana surat Menpan RB nomor: B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015.

4) Pembinaan Dan Kesejahteraan ASN

Dengan Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN diharapkan persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin semakin berkurang, dan persentase PNS yang mendapatkan pembekalan menjelang purna tugas semakin bertambah. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dalam rangka meningkatkan disiplin ASN, dan komitmen dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur birokrasi yang bersih dan melayani. Sebagai ilustrasi tersaji data jumlah PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin dan PNS yang mendapatkan pembekalan menjelang purna tugas selama kurun waktu 5 tahun seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 180 Data Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin	45	26	34	26	52
2.	Jumlah kasus-kasus kepegawaian	45	46	52	26	41

Sumber : BKD Kabupaten Tegal, 2019




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Namun dengan masih terbatasnya jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, diharapkan PNS yang sudah ada dapat bekerja secara maksimal dan memiliki tingkat disiplin tinggi yang diwujudkan dengan tidak adanya PNS yang mendapatkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun tingkat berat. Jumlah kasus-kasus kepegawaian yang ditangani persentasenya cukup kecil, namun ada kecenderungan tiap tahun mengalami kenaikan.

5) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Keuangan dari 3 program, 11 indikator dan diampu oleh BKD. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

Tabel 2. 181 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Akhir RPJMD (2019)	Target 2018	Realisasi 2018	Persentase Capaian (%)	OPD	Status Kinerja 2018
1	Program Pendidikan Kedinasan						
	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	200 PNS (II=11, III=36, IV=153)	40 PNS (II=0, III=8, IV=32)	37 PNS (II=0, III=0, IV=37)	92,50	BKD	★
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya						
	Jumlah Peserta Diklat Teknis	70 PNS	65 PNS	79 PNS	121,54	BKD	★
	Jumlah Peserta Diklat Fungsional	40 PNS	35 PNS	32 PNS	91,43	BKD	★
	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	94,00%	94,00	84,62	90,02	BKD	★
	Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	100,00	100,00	100,00	100,00	BKD	★
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
	Jumlah CPNS	2.000 CPNS	300 CPNS	0 CPNS	0	BKD	↓
	Jumlah PNS Tugas Belajar	24 PNS	21 PNS	5 PNS	23,81	BKD	★
	Jumlah Kasus Kepegawaian	40 kasus	43 kasus	41 kasus	104,88	BKD	★
	Jumlah PNS yang mendapat Hukuman Disiplin	20 PNS	21 PNS	52 PNS	-47,62	BKD	↓
	Jumlah Pejabat Struktural yang dinilai kompetensinya	6 Pejabat	30 Pejabat	329 Pejabat	1.096,67	BKD	★
	Jumlah Jabatan Fungsional Baru (non Guru dan Kesehatan)	43 JF	21 JF	37 JF	176,19	BKD	★

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.

Sumber: BKD, 2019.

1) Program Pendidikan Kedinasan

a) Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan

Pada tahun 2018 jumlah peserta Diklatpim adalah sejumlah 37 orang dari target 40 orang dan capaian kinerjanya adalah 92,50 %. Indikator Peserta Diklatpim dipengaruhi oleh alokasi anggaran, sehingga semakin besar anggaran yang disediakan maka akan semakin tinggi realisasi kinerja yang diperoleh. Terdapat ± 209 pejabat yang belum mengikuti Diklatpim merupakan salah satu permasalahan tersendiri karena dibutuhkan pendanaan yang cukup besar ± Rp 6.455.925.000,-, belum termasuk adanya promosi pejabat baru.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Jumlah Peserta Diklat Teknis

Jumlah Peserta Diklat Teknis ditargetkan untuk mengirimkan 65 orang. Untuk mencapai target tersebut, BKD telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal baik dengan pola cost sharing maupun penyelenggaraan sendiri dengan realisasi sejumlah 79 orang peserta dengan capaian kinerja 121.54 %. Tidak ada permasalahan yang menonjol dalam indikator ini selain belum maksimalnya BKD sebagai instansi teknis bidang Kediklatan.

b) Jumlah Peserta Diklat Fungsional

Jumlah Peserta Diklat Fungsional ditargetkan untuk mengirimkan 35 peserta dengan realisasi sebanyak 32 orang peserta dengan capaian kinerja sebesar 91,43 %. Diklat fungsional yang dilaksanakan oleh BKD adalah Diklat Jabatan Fungsional bagi Jabatan Fungsional Tertentu dengan pola cost sharing dan Diklat Jabatan Fungsional Dasar dan Penjurangan dengan pola pengiriman.

c) Persentase Jabatan Struktural yang Terisi

Indikator kinerja Presentasi Jabatan Struktural yang Terisi ditargetkan sebesar 94 % dan sampai dengan Akhir tahun 2018 jabatan struktural terisi sejumlah 84.62% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 90,02 %. Pada tahun 2018 Kabupaten Tegal menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah yang mencalonkan kembali menjadi Calon Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi dan promosi. Hal ini menjadi salah satu kendala adanya kekosongan formasi jabatan sejumlah 147 jabatan.

d) Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

Pada tahun 2018 terdapat 252 CPNS pengalihan dari Kementerian Kesehatan formasi bidan dan dari Kementerian Pertanian formasi Penyuluh Pertanian yang diangkat pada tahun 2017. Untuk mencapai indikator ini, BKD telah melaksanakan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dengan pola cost sharing dan pola pengiriman bagi 252 CPNS tersebut, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100 %.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Jumlah CPNS

Indikator kinerja Jumlah CPNS pada tahun 2018 ditargetkan sejumlah 2.000 orang, walaupun Surat Menpan dan RB tentang penundaan penambahan pegawai ASN sudah tidak berlaku dengan adanya kegiatan Penerimaan seleksi CPNS dengan formasi untuk Kabupaten Tegal sejumlah 304 formasi. Namun sampai dengan akhir tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara belum memberikan penetapan Nomor Induk Pegawai bagi 277

pelamar yang lulus seleksi, sehingga indikator jumlah CPNS pada tahun 2018 realisasi kinerjanya adalah 0 %.

b) Jumlah PNS Tugas Belajar

Indikator jumlah PNS Tugas Belajar ditargetkan sejumlah 21 orang dan terealisasi hanya sejumlah 5 orang Tugas Belajar dengan capaian kinerja sebesar 23,81 %. Rendahnya capaian kinerja dikarenakan indikator ini dipengaruhi oleh jumlah lembaga pemerintah pusat yang memberikan beasiswa tugas belajar. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pemerintah daerah tidak dapat memberikan beasiswa kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formalnya.

c) Jumlah Kasus Kepegawaian

Jumlah Kasus Kepegawaian pada tahun 2018 ditargetkan sejumlah 43 kasus. Sehubungan dengan target kinerja ini adalah target negative yaitu realisasi yang lebih rendah dari target yang telah ditetapkan merupakan prestasi, maka BKD telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Pembinaan Disiplin Pegawai, Pengelolaan Presensi Pegawai, dan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS. Adapun realisasi dari indikator kinerja ini adalah sejumlah 41 kasus kepegawaian yang ditangani atau sekitar 104.88%.

d) Jumlah PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sejumlah 21 PNS dengan realisasi sejumlah 52 kasus. Besarnya jumlah realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan mengakibatkan realisasi capaian untuk indikator kinerja ini sangat rendah yaitu sebesar - 47,62 % karena indikator ini dinyatakan berhasil apabila realisasi tercapai lebih sedikit daripada target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin lebih besar dari pada target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah berbanding terbalik atau sangat rendah. Adapun rinciannya adalah 18 pegawai dikenakan Hukuman Tingkat Ringan, 9 pegawai mendapatkan Hukuman Tingkat Sedang, dan 25 pegawai mendapatkan Hukuman Tingkat Berat. Besarnya jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin dikarenakan terdapatnya kasus-kasus pelanggaran disiplin yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diputuskan hukuman disiplinnya pada tahun 2018.

e) Jumlah Pejabat Struktural yang dinilai Kompetensinya

Indikator jumlah Pejabat Struktural yang dinilai Kompetensinya ditargetkan sejumlah 30 orang. Pada tahun 2018, Penilaian kompetensi dilakukan dalam rangka pengisian jabatan Administrator dan Pengawas dengan menggunakan metode penelusuran Kader Potensial (talent scouting) menjadi Kader Potensial (Talent Pool), dan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan metode Seleksi Terbuka. Oleh karena itu capaian realisasi pejabat struktural yang dinilai kompetensinya sangat besar yaitu sejumlah 329 orang atau 1.096,67 %. Kecilnya target yang ditetapkan karena pada saat penyusunan RPJMD Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PNS yang didalamnya mengatur tentang Pengisian Jabatan Struktural belum diterbitkan.

f) Jumlah Jabatan Fungsional Baru (non Guru dan Kesehatan)

Jumlah Jabatan Fungsional Baru (non guru dan kesehatan) ditargetkan sejumlah 21 orang. Adanya kebijakan Inpassing Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh BKN, dan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional tertentu dan rencana Pemberian Gaji dan Tunjangan Kinerja yang disesuaikan dengan Kelas Jabatan berdampak pada realisasi capaian kinerja indikator ini. Pada tahun 2018, realisasi Jumlah Jabatan Fungsional Baru sejumlah 37 orang dengan capaian kinerja sebesar 176.19 %.

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan fungsi perencanaan pembangunan.. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan upaya yang telah berjalan maka hasil kelitbang yang termamfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 semakin meningkat sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 182 Pemanfaatan Hasil Kelitbang dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasa Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
hasil kelitbang yang termamfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90,24	90,65	91,18	92,21	93,76

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2019.

Pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dimasa mendatang. Sistem pendataan dan pelaporan kelitbang yang belum terintegrasi dalam satu lembaga dimanamasing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbang belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi.Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yangmengedepankan proses kelitbang dan IPTEK, maka pengembangan danpenerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat.

E. Pengawasan

1) Pengawasan oleh Inspektorat (Wilayah I s.d. IV)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut.

2) Pengawasan Intern dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengawasan Intern dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan

oleh perangkat daerah maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauhmana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana rekomendasi atas temuan LHP. Sebagai ilustrasi tersaji data tingkat penyelesaian tindak lanjut LHP baik dari pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawas internal (APIP) mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 183 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	50,46	52,66	67,90	84,32	90,00
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	N/A	16,58	27,66	73,27	67,08
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten	70,78	51,28	47,27	71,11	43,81

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP yaitu justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2018 tidak segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

3) Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dilakukan dalam rangka pengawalan pencapaian tujuan organisasi, baik pada level perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan implementasi dari pengawasan intern berbasis risiko yang mengamankan hasil pengawasan intern harus dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menunjukkan perbaikan budaya kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil

Berdasarkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada

Pemerintah Kabupaten Tegal masih rendah jika dibandingkan hasil kerjanya. Hasil penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 184 Nilai SAKIP Tahun 2014-2018 (N-1)

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Skor	NA	52,56	50,58	55,46	57,01
2	Nilai	CC	CC	CC	CC	CC

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, efektifitas pencapaian tujuan pembangunan daerah yang dinilai dari hasil (*outcome*) program pada Pemerintah Kabupaten Tegal masih rendah.

4) Pembangunan Budaya Integritas.

Pembangunan budaya integritas dilakukan untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Program ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data unit kerja yang telah ditetapkan menuju WBK/WBBM sebagai berikut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 185 Unit Kerja Ditetapkan Menuju WBK/WBBM

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah unit kerja	-	-	2	8	8
2	Persentase	0	0	4,16	16,67	16,67

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan.

5) Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan.

Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan melalui perencanaan yang baik, instrumen pengawasan yang memadai dan kompetensi aparatus pengawas yang mencukupi diharapkan. Program ini diharapkan akan meningkatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki sertifikasi keahlian profesi baik nasional maupun internasional sebagai ukuran meningkatnya mutu pengawasan. Sebagai ilustrasi

tersaji data APIP yang memiliki sertifikat keahlian mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 186 Jumlah APIP Memiliki Sertifikasi Keahlian

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah APIP	-	-	-	-	1
2	%	0	0	0	0	1,96







Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2018




Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, APIP Kabupaten Tegal belum memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi keahlian profesional yang memadai. Hal ini perlu perhatian tersendiri karena tuntutan APIP ke depan semakin berat, terutama dalam perannya sebagai tenaga ahli profesional dalam proses litigasi/penegakan hukum terkait kasus yang menyebabkan kerugian negara/daerah.

6) Hasil evaluasi RKPD sampai tahun 2018

Urusan Pengawasan dari 3 program, 6 indikator dan diampu oleh Inspektorat. Berikut disajikan indikator, target dan capaian kinerja Urusan Pengawasan.

Tabel 2. 187 Evaluasi Kinerja Program RKPD Tahun 2018 Urusan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja 2018	Status Capaian 2018	
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						
	1	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	144	136	92	67,65	
	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	95,00	93,00	90,08	96,86	
3	Opini WTP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP		
2	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan						
		Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	35	25	45	180,00	
		Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	4	4	30	750,00	
3	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						
		Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	6	5	33	660,00	

 Sangat Tinggi  Tinggi, Sedang  Rendah, Sangat Rendah.
Sumber: Inspektorat Kabupaten Tegal 2019.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Berdasarkan data capaian kinerja program, dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, pada indikator Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan terealisasi 92 obyek pengawasan dari target sebesar 136 obyek pengawasan atau tercapai sebesar 67,65 %. Pada indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terealisasi sebesar 90,08 % dari target sebesar 93,00 % atau tercapai sebesar 96,86 %. Sedangkan pada indikator Opini WTP BPK, tercapai opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 yang diterima pada tahun 2018. Untuk opini LKPD Tahun 2018 baru didapatkan pada tahun 2019. Belum tercapaainya Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan disebabkan oleh banyaknya temuan BPK yang sulit ditindaklanjuti dan temuan pengembalian kerugian negara/daerah yang terkait dengan pihak ketiga serta beberapa temuan yang terkait dengan proses peradilan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan penghapusan melalui usulan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) kepada BPK RI, namun hingga saat ini belum ada keputusan. Permasalahan dalam pencapaian opini WTP untuk LKPD Tahun 2018 adalah penataan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal tersebut dikarenakan rentang kendali yang cukup panjang sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif. Permasalahan lainnya pada Sistem aplikasi yang terdapat pada BPKAD yang belum selesai. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah percepatan kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi aset tetap (BMD), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kegiatan monitoring, evaluasi, konsultasi, review, dan audit, serta optimalisasi peran pendampingan Inspektorat dalam penyusunan LKPD Tahun 2018 melalui asistensi, monitoring, dan review.

Dalam Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, pada indikator Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi tercapai 45 orang dari target sebesar 25 orang atau tercapai sebesar 180,00 %, dan pada indikator Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa terlaksana 30 pelatihan dari target 4 pelatihan atau tercapai 750 %. Pencapaian program ini tidak mendapatkan kendala karena terdapat peningkatan jumlah auditor dari pembentukan dan inpassing jabatan, dan banyaknya kegiatan pelatihan/diklat yang direncanakan pada tahun 2018 dengan anggaran yang mencukupi. Pencapaian tersebut berdampak positif pada peningkatan level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Tahun 2018, atas dasar penilaian dari BPKP RI Inspektorat Kabupaten Tegal telah mencapai Level 3.

Dalam Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, hingga akhir tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Tegal telah menyusun 33 kebijakan/prosedur pengawasan yang terdiri dari Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kepusuan Inspektur Kabupaten Tegal dari target sampai dengan akhir 2018 sebanyak 5 kebijakan/prosedur atau tercapai 660 %. Dalam program ini tidak terdapat kendala, dan faktor pendorong percepatan penyusunan kebijakan dan prosedur adalah berlakunya peraturan perundang-undangan dan upaya peningkatan kapabilitas APIP yang mengamanatkan pemerintah daerah menyusun beberapa kebijakan/prosedur tentang pengawasan.

F. Sekretariat DPRD

1) Peningkatan Fungsi Legislasi.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 5 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 188 Persentase integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	44,21	47,86	49,51	51,11	52,31

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel

Tabel 2. 189 Data raperda yang dianggarkan, prolegda, dan perda yang di tetapkan dari tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pembahasan Perda yang dianggarkan	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Prolegda	29	30	10	22	13
3.	Jumlah Perda ditetapkan	12	14	14	13	7

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Dari tabel diatas, bisa dilihat kemampuan anggaran untuk pembahasan Raperda cukup konsisten setiap tahun yaitu 7 (tujuh) Raperda, meskipun jumlah prolegda yang diagendakan dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, begitu juga dengan jumlah perda yang ditetapkan pada tahun 2015 dan 2016 dapat mencapai dua kali lipat (14) dari raperda yang dianggarkan (7), selanjutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 dari 7 raperda yang dianggarkan dapat

menghasilkan 7 buah perda.

2) peningkatan fungsi pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 190 Program peningkatan fungsi pengawasan tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	51,21	52,88	52,97	53,21	54,22

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019

Persentase integrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran

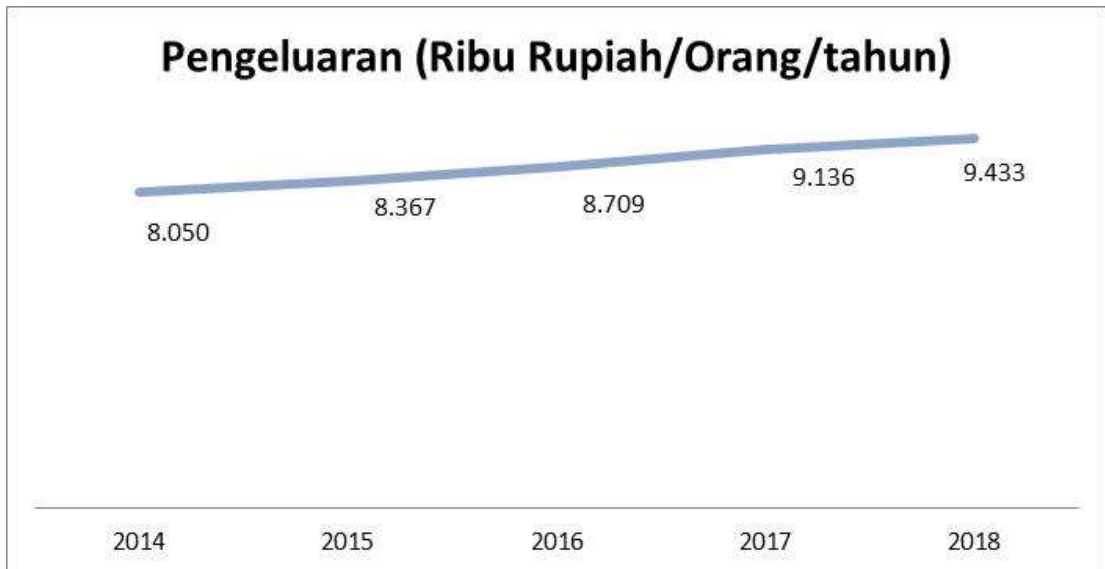
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

2.4.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Penghitungan paritas daya beli pada meode baru menggunakan 96 komoditi dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun.Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tegal mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tegal. Data tahun 2016 menunjukkan angka 8.709 ribu rupiah/orang/kapita, meningkat menjadi angkanya menjadi 9.433 ribu rupiah/orang/tahun.

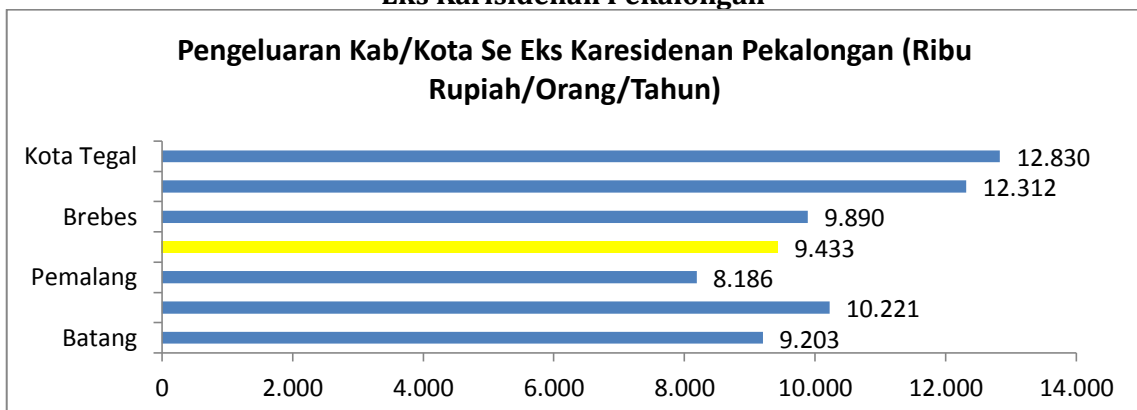
Gambar 2. 41. Pengeluaran per kapita disesuaikan



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten /Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Pengeluaran Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah 9.433 Ribu Rupiah/Orang/Tahun menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pengeluaran paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (8.186 Ribu Rupiah/orang/tahun) sedangkan Pengeluaran yang paling tinggi adalah Kota Tegal (12.830 ribu rupiah/orang/tahun).

Gambar 2. 42. Perbandingan Angka Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2018.

2.4.2. Pengeluaran Konsusi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.

Tabel 2. 191 Rata-rata Pengeluaran (Rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Tegal

TAHUN	MAKANAN	NON MAKANAN
2014	310.000	225.860
2015	340.313	281.668
2016	377.317	346.992
2017	451.189	350.816
2018	449.371	402.025

Sumber : BPS Kabupaten Tegal

Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Tegal mencapai Rp.402.025 atau 52,78% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 13,94% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan rokok masing-masing sebesar 34,05% dan 14,57% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,59%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 192 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2018

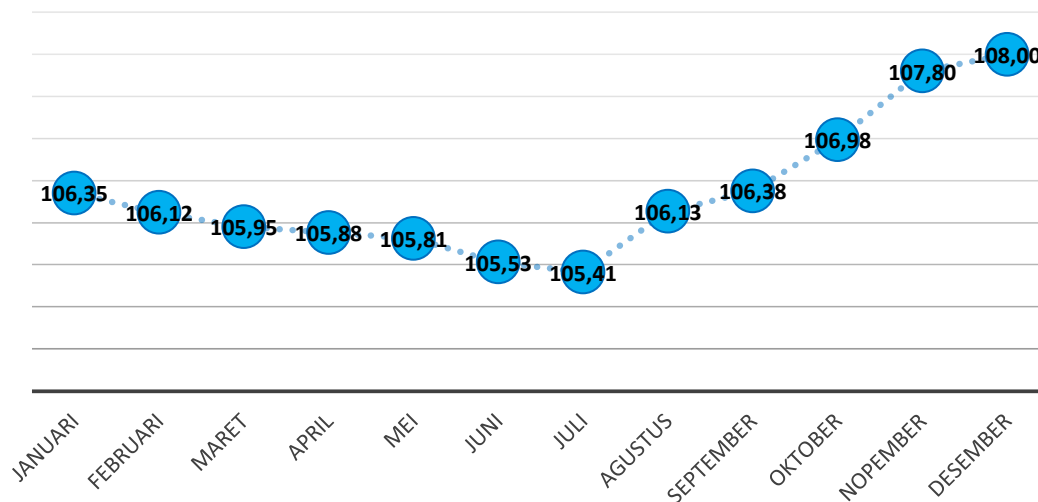
MAKANAN	%	NON MAKANAN	%
Padi-padian	13,94	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	43,38
Umbi-umbian	0,59	Aneka Barang dan Jasa	25,90
Ikan, Udang, Cumi, Kerang	3,33	- Kesehatan	6,21
Daging	3,20	- Pendidikan	6,46
Telur dan Susu	5,07	- Lainnya	13,22
Sayur-sayuran	6,73	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	5,94
Kacang-kacangan	3,63	Barang Tahan Lama	15,27
Buah-buahan	4,07	Pajak, pungutan dan Asuransi	4,85
Minyak dan Kelapa	2,35	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	4,66
Bahan Minuman	3,64		
Bumbu-bumbuan	2,63		
Konsumsi Lainnya	2,18		
Makanan dan Minuman Jadi	34,05		
Rokok	14,57		
Jumlah	100	Jumlah	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal

2.4.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Mulai Bulan Januari 2013, penghitungan nilai tukar petani menggunakan diagram timbang yang baru, yaitu diagram timbang tahun 2012 yang merupakan hasil Survei penyempurnaan Diagram Timbang Tahun 2007.

Gambar 2. 43. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber : Data Olah, BPS Kabupaten Tegal

Kondisi petani Kabupaten Tegal tahun 2018 secara umum mengalami surplus. Hal tersebut terlihat dari NTP yang berada diatas 100. Keadaan tersebut menunjukkan nilai yang diterima petani dari komoditas pertanian naik lebih besar dibandingkan kenaikan nilai yang dibayar petani untuk barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Pada Januari 2018 NTP Kabupaten Tegal mencapai 106,35 sedangkan di akhir tahun, NTP mengalami kenaikan sebanyak 1,65 dibandingkan bulan Januari atau NTP mencapai 108,00 di Bulan Desember 2018. NTP tertinggi dicapai pada bulan Desember 2018 yaitu mencapai 108,00. Sedangkan capaian NTP terendah pada bulan Juli 2018 yaitu hanya mencapai 105,41.

Kenaikan nilai NTP akan terjadi apabila perubahan nilai It (Indeks yang diterima petani) lebih besar dibandingkan perubahan nilai Ib (Indeks yang dibayar petani). Sebaliknya penurunan nilai NTP terjadi apabila perubahan nilai It (Indeks yang diterima petani) lebih kecil dibandingkan perubahan nilai Ib (Indeks yang dibayar petani). Kenaikan NTP tertinggi pada bulan Januari 2018 yaitu naik sebesar 1,35 dari bulan Desember 2017, disusul Bulan November dan Agustus yaitu terdapat kenaikan sebesar 0,81 dan 0,72 dibandingkan bulan sebelumnya. Selama tahun 2018, penurunan NTP terendah terjadi pada bulan Juni yaitu NTP turun sebesar 0,28 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan lainnya terjadi pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli.

Indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun 2018 relatif mengalami kenaikan, hal ini ditunjukkan oleh perubahan nilai indeks dari bulan januari ke bulan desember yang naik sebesar 11,06persen. Pada awal tahun 2017, yaitu pada bulan Januari It berada pada posisi 153.67 dan terus berfluktuasi hingga nilai It di bulan Desember sebesar 164,73

Perubahan It terbesar terjadi pada Bulan Januari sebesar 3,56 disusul Bulan Oktober dan Mei yaitu sebesar 2,82 dan 1,63. Pada Januari 2018 terjadi kenaikan It

di seluruh sub sektor. Kenaikan terbesar terjadi pada sub sektor tanaman pangan. Kenaikan harga gabah menjadi pemicu kenaikan It pada sub sektor tersebut. Kenaikan It yang cukup besar pada Bulan Oktober terjadi pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Perlu diketahui bahwa kedua sub sektor tersebut menjadi dua penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai NTP. Perubahan yang terjadi pada kedua sub sektor tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai NTP. Kenaikan It di Bulan Oktober pada sub sektor tanaman pangan terjadi baik pada kelompok padi maupun palawija. Kenaikan harga pada kelompok palawija lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga pada kelompok padi. Sedangkan pada sub sektor hortikultura di Bulan Oktober terjadi karena kenaikan harga terjadi pada kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenaikan It di bulan Mei 2018, di sumbang oleh kenaikan It pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat yang memiliki kenaikan It tertinggi di bulan Mei. Disusul oleh sub sektor hortikultura dan perikanan yang memiliki kenaikan It tertinggi kedua dan ketiga di Bulan Mei 2018.

Penurunan It hanya terjadi pada bulan Maret, yaitu terjadi penurunan sebesar 0,11 dari bulan sebelumnya. Hampir semua sub sektor pada bulan Maret memiliki It yang turun kecuali sub sektor hortikultura yang mengalami kenaikan pada It.

Tabel 2. 193 Perkembangan Indeks Terima (It) dan Indeks Bayar (Ib) Tahun 2018

No.	Bulan	I _t	Perubahan	No	Bulan	I _b	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Januari	153,67	3,56	1.	Januari	144,49	1,54
2.	Februari	154,41	0,74	2.	Februari	145,50	1,01
3.	Maret	154,30	-0,11	3.	Maret	145,63	0,13
4.	April	154,33	0,03	4.	April	145,76	0,13
5.	Mei	155,96	1,63	5.	Mei	147,39	1,64
6.	Juni	157,07	1,11	6.	Juni	148,84	1,45
7.	Juli	157,65	0,57	7.	Juli	149,55	0,71
8.	Agustus	158,92	1,28	8.	Agustus	149,74	0,19
9.	September	159,47	0,55	9.	September	149,91	0,17
10.	Oktober	162,29	2,82	10.	Oktober	151,69	1,78
11.	November	163,59	1,30	11.	November	151,76	0,06
12.	Desember	164,73	1,14	12.	Desember	152,53	0,78

Sumber: Data Olahan, BPS Kabupaten Tegal

Indeks yang dibayar petani (Ib) terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) dan kelompok biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM). Kelompok IKRT terdiri dari beberapa sub kelompok, yaitu bahan makanan, perumahan, sandang dan aneka barang jasa (kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, serta transportasi dan komunikasi. Perubahan Indeks harga konsumsi rumah tangga (IKRT) mencerminkan angka inflasi/deflasi di wilayah pedesaan. Sedangkan Kelompok BPPBM terdiri dari bibit, obat-obatan, pupuk, sewa, upah buruh tani, penambahan barang modal dan lainnya,

Pada Januari 2018 nilai Ib mencapai 144,46 dan terus naik hingga mencapai 152,53 di Bulan Desember atau naik sebesar 8,04. Nilai Ib terus naik disetiap bulannya. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai 1,78

persen. Sedangkan kenaikan terkecil terjadi di bulan November yang hanya naik sebesar 0,06.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase dependency ratiomaka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2014-2018 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 194 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penduduk Produktif	938.298	929.207	945.509	949.810	953.218
2.	Penduduk Non	481.834	495.683	483.877	483.705	484.007
3.	RasioKetergantungan	51,35	53,34	51,17	50,92	50,77

Sumber BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019

Rasio ketergantungan Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir relatif berimbang, proporsi penduduk produktif dan nonproduktif relatif sama. Hal ini mengindikasikan bonus demografi belum terjadi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan angka kelahiran masih di atas rata-rata 2 kelahiran/per keluarga. Di samping itu jumlah penduduk lansia semakin bertambah yang menyumbang angka penduduk non produktif yang tinggi. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 195 Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan 2015-2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015	2016	2017
Tidak/Belum Pernah Sekolah/ <i>No Schooling</i>	26.674	Data tidak rilis	18.461
Tidak/Belum Tamat SD <i>Not Yet Completed Primary School</i>	116.290		125.182
Sekolah Dasar/ <i>Primary School</i>	222.308		223.117
Sekolah Menengah Pertama/ <i>Junior High School</i>	127.281		118.775
Sekolah Menengah Atas/ <i>Senior High School</i>	56.974		77.285
Sekolah Menengah Atas Kejuruan/ <i>Vacation Senior High School</i>	47.203		77.960
Diploma I/II/III/Akademi <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	6.860		13.343
Universitas/ <i>University</i>	25.881		42.039
Jumlah/Total	629.471		696.162

Sumber: BPS, 2018

Data pada tahun 2016 tidak dirilis oleh BPS karena tidak dilakukan survei berkenaan dengan data tersebut. Sementara itu penduduk yang tidak/belum sekolah semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi sekolah penduduk meningkat setiap tahunnya. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 196 Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama 2015-2017

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	2017
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries</i>	130.016	Data tidak rilis	121.080
Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	109.606		139.419
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel/ <i>Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants, and Hotels</i>	164.067		188.514
Jasa Kemasyarakatan/ <i>Community, Social, and Personal Services</i>	60.085		91.947
Lainnya/Others (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/ <i>Mining and Quarrying, Electricity, Gas and Water, Contructions, Transportation, Storage and Communication, Financing, Insurance, Real Estate, and Bussiness Services</i>)	105.792		104.202
Jumlah/Total	596.566		645.162

Sumber: BPS, 2018.

Data pada tahun 2016 tidak dirilis oleh BPS karena tidak dilakukan survei berkenaan dengan data tersebut. Angka sektor pertanian menunjukkan penurunan pada tahun-tahun terakhir. Hal ini karena sektor pertanian semakin tidak menarik bagi keluarga petani, utamanya anak muda. Untuk itu diperlukan strategi agar kaum muda tertarik menjadi petani dan menggeluti usaha pertanian.

2.3 Isu Strategis Daerah

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Merealisasikan agenda SDGs menjadi strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal pada 5 tahun ke depan. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal masih tinggi. Jumlah penduduk

misikin di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 114,06 ribu jiwa atau 7,94% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini turun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017), di mana pada tahun 2017 mencapai 141,80 ribu jiwa atau 9,9%.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah / Swasta / Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa. Sasaran dan permasalahan pokok penyebab kemiskinan sudah terdata dengan baik, yang utama adalah terbangunnya komitmen semua pemangku kepentingan untuk menyepakati program dan kegiatan di sektor nya masing-masing agar target penurunan angka kemiskinan pada 5 tahun ke depan dapat tercapai.

b. Tingkat Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Isu pengangguran harus dapat diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan program oleh Pemerintah Daerah, antara lain dengan memperluas lapangan pekerjaan, melalui upaya menarik investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri agar mendirikan ruang usaha padat karya. Untuk itu perlu kemudahan prosedur investasi dan ketersediaan peruntukan tata ruang industri yang memadai. Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, dan cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat dan juga menyesuaikan bakat yang dimiliki masyarakat dengan usaha baik itu melalui pendidikan formal, kursus, ataupun lain-lain. Untuk upaya ini dalam 5 tahun ke depan, perlu pengembangan dan revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 63,50 pada Tahun 2013, menjadi 64,10 pada Tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 65,04 pada Tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 65,84 pada Tahun 2016, kemudian menjadi 66,44 pada Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2017 sebesar 1,24 lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,9. Komponen utama yang menjadi tolok ukur pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah dari sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Derajat kesehatan dan status kesehatan masyarakat diukur melalui Angka Harapan Hidup

d. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif

Kondisi daya saing Kabupaten Tegal secara singkat dapat dilihat pada tabel PDRB berdasar Pengeluaran. Tabel tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 85% perekonomian Kabupaten Tegal ditunjang dari konsumsi masyarakat, sekitar 24% ditunjang dari investasi, dan mengimpor sekitar 19% total perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Tegal masih relatif belum kuat dan investasi masih relatif kecil. Meskipun demikian, tren negatif nett ekspor (ekspor - impor) selalu mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi berjalan di rel yang benar; walaupun belum dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri (self sufficiency).

Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi lokal, diantaranya pembangunan pasar tradisional, fasilitasi merk, fasilitasi SNI, dan pendampingan manajemen pelaku usaha. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

e. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Isu terkait dengan infrastruktur antara lain infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, dan sanitasi. Total panjang jalan di Kabupaten Tegal 958,32 km (terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten), Kondisi Jalan Kabupaten yang terkategori baik saat ini tidak lebih dari 50% dari total 847 km, kalau dilihat dari strategis dan fungsinya seharusnya ada upaya distribusi pembagian kewenangan jalan kepada desa, sehingga dengan adanya anggaran DD/ADD di Desa maka menjadi potensi dalam akselerasi dalam pencapaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal.

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai, 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhhuri, Dukuhwaru, dan Balapulung dimana didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara dimana memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus. Dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng dimana Perkembangan masing-masing kecamatan masih tergolong lamban karena terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Wilayah 4 ini yang perlu perhatian khusus untuk agar dapat sejajar dengan kecamatan lainnya. Beberapa permasalahan dalam pengembangan wilayah antara lain pembangunan infrastruktur belum berorientasi bagaimana mensinergikan anatara wilayah perkotaan dengan wiayah wilayah yang masih tertinggal, sedangkan khusus untuk wilayah perbatasan jaringan infrastruktur yang ada masih sangat terbatas.

f. Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal, jika dilihat dari

delapan aspek yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, e-government sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

g. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara.

Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya.